



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA



KAJIAN FISKAL REGIONAL

TRIWULAN I TAHUN 2026

KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL
PERBENDAHARAAN PROVINSI SUMATERA BARAT

Korwil DJPb Sumbar
ambo
amanah, melayani, berakhlak, optimis



Tim **PENYUSUN**

Pembina

Mohammad Dody Fachrudin
Kepala Kanwil DJPb Prov. Sumatera Barat

Penanggung Jawab

Bayu Setiawan Yuniarto
Kepala Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II

Editor

Abdullah Al Mizan
Kepala Seksi Pembinaan Pelaksanaan
Anggaran IIA

Andi Permana Putera
Kepala Seksi Pembinaan Pelaksanaan
Anggaran IIB

Solikhin
Kepala Seksi Pembinaan Pelaksanaan
Anggaran IIC

Kontributor

Ery Setyawan Meilisa Kusumawati
Lyssa Zulya Zalyra Rezi Eka Putra
Farid Fahlevi

Design dan Layout

Meilisa Kusumawati

“*Alam takambang jadi guru*”

*Belajar dari fenomena alam dan situasi lingkungan
untuk menjadi pribadi yang bijaksana*



Kata PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh
Salam sejahtera bagi kita semua*



Penyusunan Kajian Fiskal Regional merupakan aktivitas telaah makro sebagai bagian dari monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran di daerah. Sebagai salah satu output strategis dari pelaksanaan fungsi Kanwil Ditjen Perbendaharaan sebagai *Regional Chief Economist* dan *Financial Advisor*, Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumatera Barat telah menyusun **Kajian Fiskal Regional (KFR) Triwulan I Tahun 2026**.

Kajian Fiskal Regional ini mengulas mengenai dinamika perkembangan kebijakan fiskal baik pusat maupun daerah dalam rangka mendorong laju perekonomian dan perbaikan indikator kesejahteraan masyarakat lingkup Provinsi Sumatera Barat selama triwulan I tahun 2026.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Kajian Fiskal Regional Triwulan I Tahun 2026 ini masih terdapat kekurangan dikarenakan berbagai keterbatasan yang kami hadapi. Oleh karena itu, segala masukan yang bersifat membangun sangat kami harapkan dalam rangka menyempurnakan kajian ini.

Akhirnya, kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah terlibat dalam penyusunan kajian ini. Kami berharap kajian ini mampu memberikan manfaat dan khazanah baru bagi para pemangku kepentingan baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, akademisi, dan terlebih bagi masyarakat Sumatera Barat khususnya dalam peningkatan peran fiskal bagi perekonomian serta mendorong pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Sumatera Barat.

***"Tingkatkan Produktivitas untuk Transformasi
Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan"***

Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Padang, 29 Mei 2026



Ditandatangani secara elektronik
Mohammad Dody Fachrudin
Kepala Kantor Wilayah DJPb
Provinsi Sumatera Barat

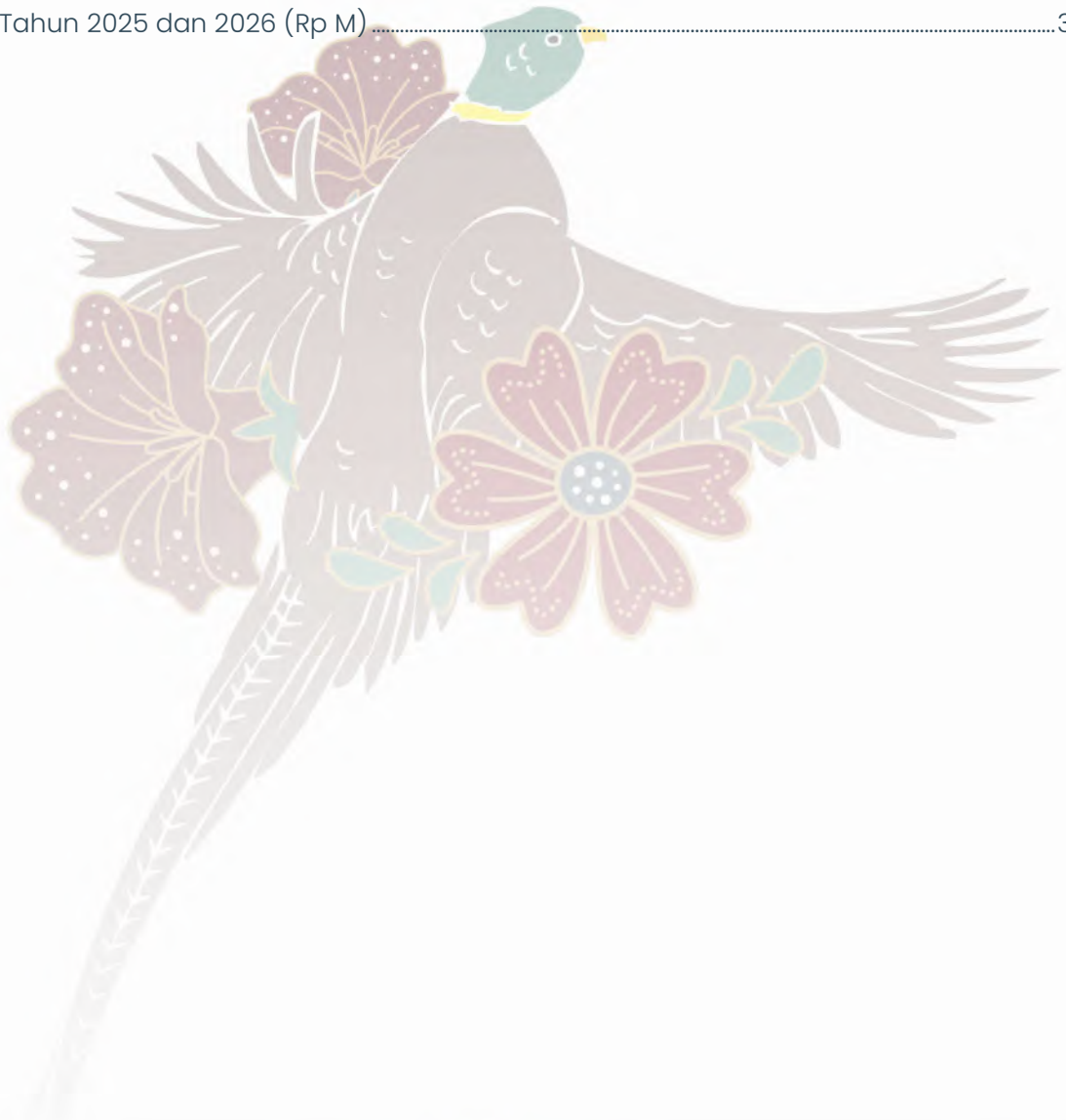


DAFTAR ISI

BAB I ANALISIS EKONOMI REGIONAL	1
1.1 Analisis Indikator Makro Ekonomi	1
1.1.1 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	1
1.1.2 Kontribusi Fiskal terhadap Pembentukan PDRB	4
1.1.3 Tingkat Inflasi	6
1.1.4 Statistik Perbankan Regional	8
1.2 Analisis Perkembangan Indikator Kesejahteraan dan Pembangunan	9
1.2.1 Nilai Tukar Petani (NTP)	9
1.2.2 Nilai Tukar Nelayan (NTN)	10
1.2.3 Indikator Pembangunan Manusia (IPM)	10
1.2.4 Tingkat Kemiskinan	12
1.2.5 Tingkat Ketimpangan (<i>Gini Ratio</i>)	14
1.2.6 Kondisi Ketenagakerjaan dan Tingkat Pengangguran	15
BAB II ANALISIS FISKAL REGIONAL	18
2.1. Analisis Laporan Realisasi Anggaran	18
Pelaksanaan APBN	18
2.1.1. Pendapatan Negara	19
2.1.2. Belanja Negara	24
2.2. Pelaksanaan APBD Tingkat Provinsi	33
2.2.1. Pendapatan Daerah	34
2.2.2. Belanja Daerah	35
2.2.3. Surplus/Defisit APBD	38
2.2.4. Pembiayaan Daerah	39
2.2.5. Analisis Tingkat Kemandirian Daerah	39
2.2.6. Rasio Pajak Daerah (<i>Local Tax Ratio</i>)	40
BAB III KESIMPULAN DAN REKOMENDASI	41
3.1. Kesimpulan	41
3.2. Rekomendasi	42
DAFTAR PUSTAKA	43

DAFTAR TABEL

Tabel I. 1 Statistik Perbankan Regional Sumatera Barat (Juta Rupiah)	8
Tabel II. 1 I-Account APBN Wilayah Sumatera Barat Triwulan I Tahun 2025–2026 (dalam miliar Rp)	18
Tabel II. 2 Sepuluh Bagian Anggaran dengan Pagu Belanja Tertinggi	26
Tabel II. 3 Realisasi Transfer ke Daerah Triwulan I 2026 (dalam miliar Rp)	32
Tabel II. 4 I-Account APBD Konsolidasi Sumatera Barat Triwulan I Tahun 2025 dan 2026 (Rp M)	33

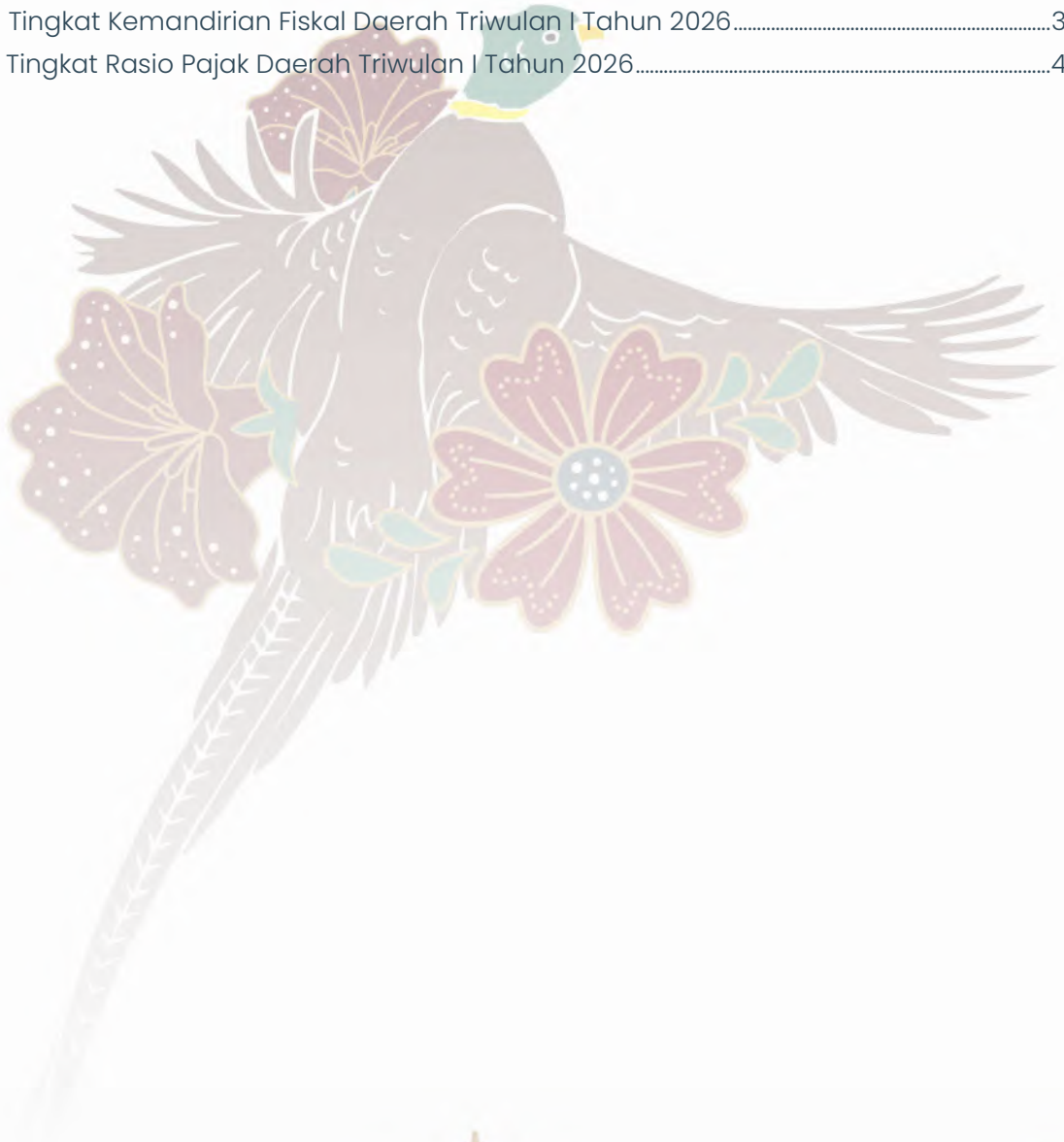


DAFTAR GRAFIK GAMBAR

Grafik I. 1 Pertumbuhan Ekonomi Sumatera Barat dan Nasional per Triwulan, Tahun 2022– Triwulan I 2026 (persen yoy)	1
Grafik I. 2 Pertumbuhan dan Distribusi PDRB Provinsi Sumatera Barat Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2025.....	2
Grafik I. 3 Nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran Dengan Kontribusi Besar (Triliun Rupiah)	3
Grafik I. 4 PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Dengan Kontribusi Besar (Triliun Rupiah)	4
Grafik I. 5 Pengeluaran Fiskal dan Share Terhadap Pembentukan PDRB Tahun 2020 – Triwulan I 2026 (%).....	5
Grafik I. 6 Belanja Pemerintah Menurut Jenis, Tahun 2023 – Triwulan I 2026.....	5
Grafik I. 7 Tren Inflasi (% yoy) Sumatera Barat dan Indonesia Tahun 2024 – TW I 2026.....	6
Grafik I. 8 Tren Inflasi (% mtm) Sumatera Barat dan Indonesia Tahun 2024 – TRIWULAN I 2026.....	7
Grafik I. 9 Perkembangan NTP, It, Ib di Sumatera Barat Tahun 2024 – Triwulan I 2026.....	9
Grafik I. 10 Perkembangan NTN Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2024 – Triwulan. I 2026	10
Grafik I. 11 Perkembangan IPM Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2021–2025	11
Grafik I. 12 IPM Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025.....	12
Grafik I. 13 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Sumatera Barat 2021–2025	12
Grafik I. 14 Persentase Penduduk Miskin Provinsi di Pulau Sumatera, September 2025.....	13
Grafik I. 15 Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) di Sumatera Barat Tahun 2020–2025	14
Grafik I. 16 Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)) di Sumatera Barat Tahun 2020–2025	14
Grafik I. 17 Perkembangan Ketimpangan (Gini Ratio) Provinsi Sumatera Barat.....	15
Grafik I. 18 Perkembangan Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Sumatera Barat, 2022–2026.....	16
Grafik I. 19 Distribusi Pekerja Berdasarkan Status Pekerjaan Utama Februari 2026.....	16
Grafik I. 20 Distribusi Pekerja Berdasarkan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, Februari 2026.....	17
Grafik II. 1 Realisasi dan Komposisi Pendapatan Negara Triwulan I Tahun 2026 (dalam miliar Rp).....	20
Grafik II. 2 Pertumbuhan Penerimaan Perpajakan Triwulan I Tahun 2025–2026.....	21
Grafik II. 3 Penerimaan Pajak per Sektor (dalam miliar Rupiah)	22
Grafik II. 4 4 Pertumbuhan PNB Triwulan I Tahun 2025–2026.....	23
Grafik II. 5 Realisasi dan Komposisi Belanja Negara Triwulan I Tahun 2025.....	24
Grafik II. 6 Pertumbuhan Belanja Pemerintah Pusat Triwulan I Tahun 2025–2026.....	25
Grafik II. 7 Pagu dan Realisasi Belanja per Fungsi Tahun 2026.....	28
Grafik II. 8 Analisis Kontribusi BPP terhadap PDRB Tahun 2025–2026.....	29

DAFTAR GRAFIK & GAMBAR

Grafik II. 9 Pagu dan Realisasi Belanja Prioritas Nasional s.d. Triwulan I 2026	30
Grafik II. 10 Pertumbuhan Transfer ke Daerah Tahun 2025–2026.....	31
Grafik II. 11 Pendapatan Daerah Triwulan I Tahun 2025–2026 (Rp M).....	34
Grafik II. 12 Komponen Pendapatan Asli Daerah Triwulan I Tahun 2025–2026 (Rp M).....	35
Grafik II. 13 Belanja Daerah Triwulan I Tahun 2025–2026 (Rp M).....	35
Grafik II. 14 Belanja Daerah Berdasarkan Fungsi Pemerintahan Triwulan I Tahun 2025 (Rp M).....	36
Grafik II. 15 Analisis Kontribusi Belanja Daerah terhadap PDRB Tahun 2024–2026.....	38
Grafik II. 16 Tingkat Kemandirian Fiskal Daerah Triwulan I Tahun 2026.....	39
Grafik II. 17 Tingkat Rasio Pajak Daerah Triwulan I Tahun 2026.....	40



RINGKASAN EKSEKUTIF

Perkembangan Indikator Ekonomi Makro dan Kesejahteraan

- Ekonomi Sumatera Barat pada triwulan I tahun 2026 tumbuh sebesar 5,02 persen (yoy), meningkat cukup signifikan dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 4,55 persen, bahkan sangat signifikan jika dibandingkan triwulan sebelumnya yang sebesar 1,69 persen.
- Berdasarkan hasil pemantauan BPS Provinsi Sumatera Barat pada empat kabupaten/kota pengukur tingkat inflasi di Provinsi Sumatera Barat, yaitu Kota Padang, Kota Bukittinggi, Kabupaten Dharmasraya, dan Kabupaten Pasaman Barat, tercatat bahwa terjadi inflasi (yoy) tahun 2026 pada Januari sebesar 3,92 persen, Februari sebesar 4,39 persen, dan Maret sebesar 3,37 persen.
- Pada tahun 2025, IPM Provinsi Sumatera Barat mencapai 77,27 atau berada pada level tinggi, meningkat 1,10 persen dibandingkan tahun 2024 yang tercatat sebesar 76,43.
- Jumlah penduduk miskin Sumatera Barat mengalami penurunan dari 5,42 persen atau 315,43 ribu jiwa pada September 2024 menjadi 312,30 ribu jiwa (5,31 persen) pada September 2025.
- *Gini ratio* Provinsi Sumatera Barat mengalami penurunan dari 0,287 pada September 2024 menjadi 0,280 pada September 2025. Secara spasial, *gini ratio* Sumatera Barat tersebut masih lebih baik dibandingkan dengan *gini ratio* nasional yang tercatat sebesar 0,363 pada September 2025.
- Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Sumatera Barat pada Februari 2026 mengalami penurunan menjadi 5,51 persen dibanding Februari 2025 yang sebesar 5,69 persen, atau mengalami penurunan 0,01 poin persen dibanding November 2025 yang sebesar 5,52 persen
- NTP Sumatera Barat pada Januari 2026 sebesar 126,80 persen, Februari 2026 sebesar 124,77 persen, dan Maret 2026 sebesar 123,15 persen. Sedangkan NTN bulanan pada Triwulan I 2026 secara berturut-turut sebesar 106,35 pada Januari, 107,05 pada Februari, dan 111,14 pada Maret.

RINGKASAN EKSEKUTIF

Kondisi Fiskal Regional di Sumatera Barat

- Hingga Triwulan I 2026, kinerja APBN Regional Sumatera Barat menunjukkan tekanan pada sisi pendapatan dan peningkatan signifikan pada sisi belanja. Pendapatan negara terealisasi sebesar Rp1,58 triliun atau terkontraksi 17,26 persen (yoy), terutama akibat penurunan penerimaan perpajakan dan melemahnya penerimaan perdagangan internasional seiring turunnya harga CPO dan kebijakan sentralisasi PPN. Di sisi lain, Belanja Negara mencapai Rp9,90 triliun dan tumbuh 33,27 persen (yoy), didorong percepatan belanja modal, pembayaran THR ASN, dan dukungan pemulihan pasca-bencana sehingga APBN regional mengalami defisit sebesar Rp8,33 triliun.
- Dari sisi struktur APBN, realisasi Belanja Pemerintah Pusat mencapai Rp2,46 triliun dengan pertumbuhan 26,02 persen (yoy), terutama berasal dari kenaikan Belanja Pegawai, Belanja Barang, dan Belanja Modal untuk pembangunan infrastruktur. Sementara itu, Transfer ke Daerah (TKD) terealisasi sebesar Rp7,45 triliun atau tumbuh 35,85 persen (yoy), dengan komponen terbesar berasal dari DAU, DAK, dan DBH. Namun demikian, Dana Desa mengalami penurunan signifikan dan DAK Fisik hingga akhir triwulan I masih belum terealisasi.
- Kinerja APBD Konsolidasi Sumatera Barat hingga Triwulan I 2026 menunjukkan pertumbuhan positif pada sisi pendapatan daerah yang mencapai Rp25,50 triliun atau tumbuh 18,31 persen (yoy), terutama didorong oleh peningkatan Pendapatan Transfer. Struktur pendapatan daerah masih didominasi oleh transfer dari pemerintah pusat sebesar 83,41 persen, sedangkan kontribusi PAD baru mencapai 16,51 persen. Kondisi ini menunjukkan tingkat kemandirian fiskal daerah di Sumatera Barat masih relatif rendah.
- Realisasi Belanja Daerah mencapai Rp4,44 triliun atau terkontraksi 2,06 persen (yoy), dengan struktur belanja yang masih didominasi Belanja Operasi dan Belanja Pegawai. Belanja Modal mengalami penurunan signifikan akibat lambatnya pelaksanaan kegiatan fisik dan pengadaan barang/jasa pada awal tahun. Dengan realisasi pendapatan yang lebih tinggi dibandingkan belanja, APBD Konsolidasi Sumatera Barat mencatat surplus sebesar Rp3,43 triliun, sementara pembiayaan daerah meningkat didorong pemanfaatan SILPA tahun sebelumnya.

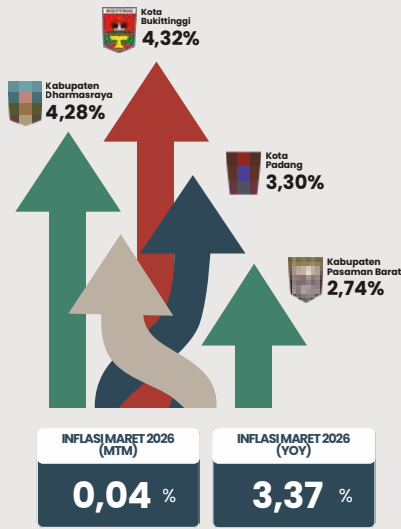
DASHBOARD MAKRO EKONOMI

TRIWULAN I TAHUN 2026



INFLASI DAN PEREKONOMIAN REGIONAL

INFLASI PER MARET 2026

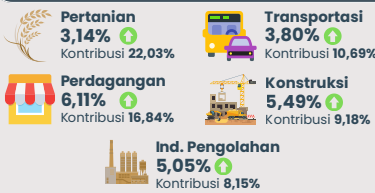


PERTUMBUHAN EKONOMI TRIWULAN I 2026

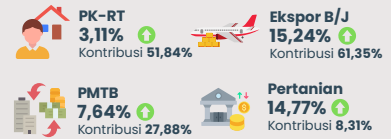


STRUKTUR PDRB TRIWULAN I 2026

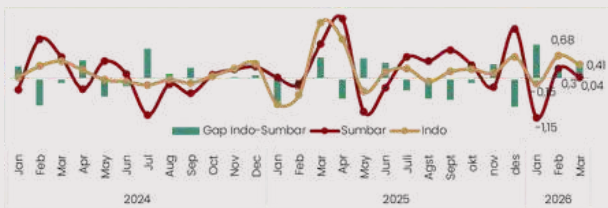
LAPANGAN USAHA



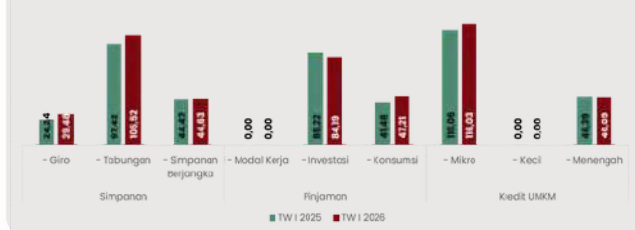
PENGELUARAN



TREN INFLASI (MARET 2026, YOY)

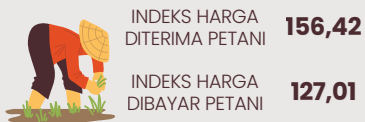


STATISTIK PERBANKAN REGIONAL TRIWULAN I 2026



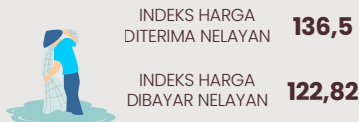
INDIKATOR KESEJAHTERAAN

NILAI TUKAR PETANI (NTP) TRIWULAN I 2026



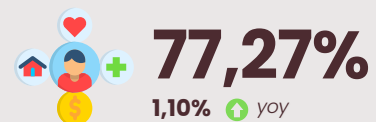
INDEKS NTN 123,15 1,30% m-t-m

NILAI TUKAR NELAYAN (NTN) TRIWULAN I 2026



INDEKS NTN 111,14 3,82% m-t-m

INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA TRIWULAN I 2026

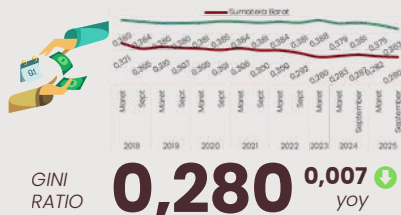


UMUR HARAPAN HIDUP: 74,69 TH
HARAPAN LAMA SEKOLAH: 14,31 TH
RATA-RATA LAMA SEKOLAH: 9,77 TH
PENGELUARAN PER KAPITA: Rp12,04

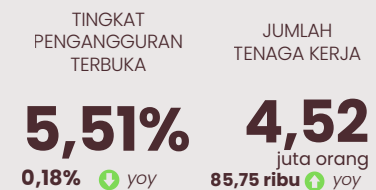
TINGKAT KEMISKINAN SEPTEMBER 2025



GINI RATIO (RASIO GINI) SEPTEMBER 2025



KONDISI KETENAGAKERJAAN FEBRUARI 2026



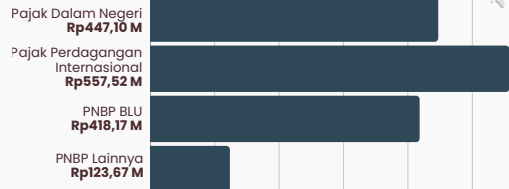
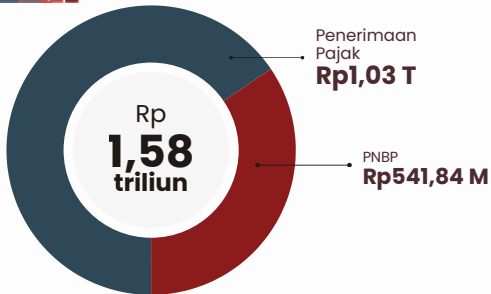
DASHBOARD FISKAL REGIONAL

TRIWULAN I TAHUN 2026

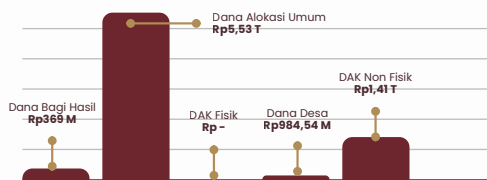
APBN PER 31 MARET 2026



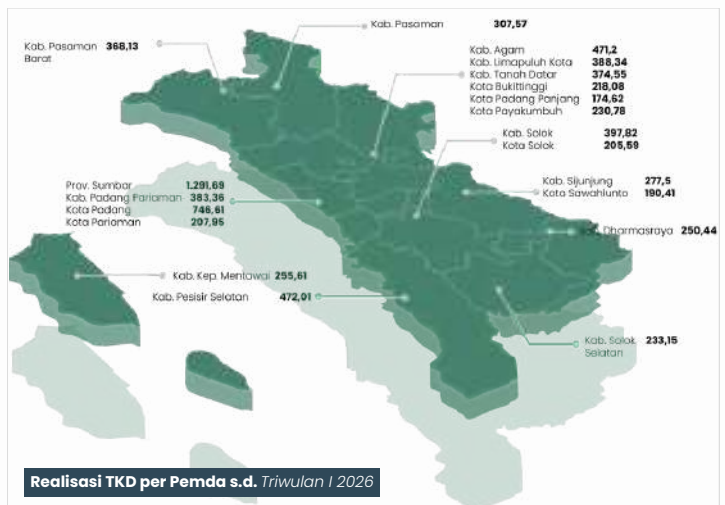
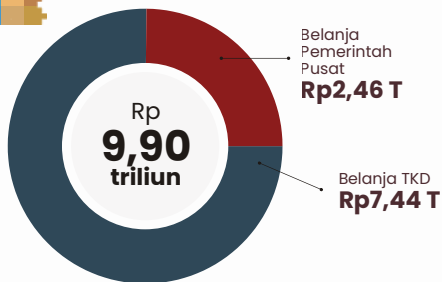
REALISASI PENERIMAAN NEGARA S.D. TRIWULAN I TAHUN 2026



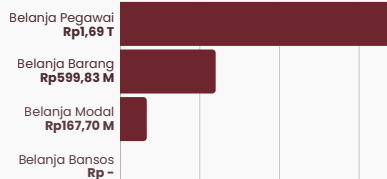
Belanja Transfer ke Daerah



REALISASI BELANJA NEGARA S.D. TRIWULAN I TAHUN 2026



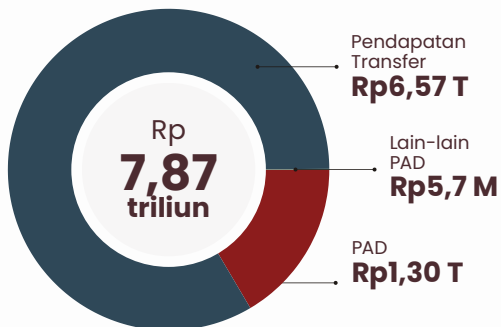
Belanja Pemerintah Pusat



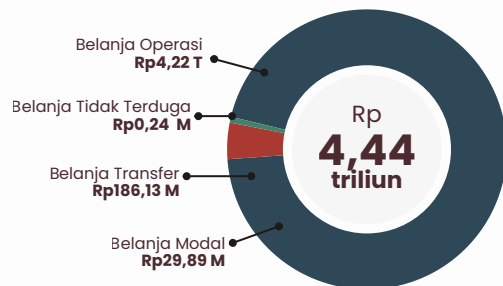
APBD PER 31 MARET 2026



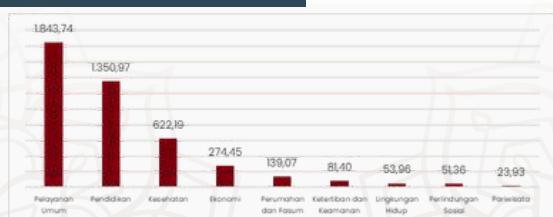
REALISASI PENERIMAAN DAERAH S.D. TRIWULAN I TAHUN 2026



REALISASI BELANJA DAERAH S.D. TRIWULAN I TAHUN 2026



Belanja Daerah per Fungsi



Peran APBN dan APBD sebagai **instrumen fiskal ekspansif** untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkelanjutan, dan pemerataan pembangunan.

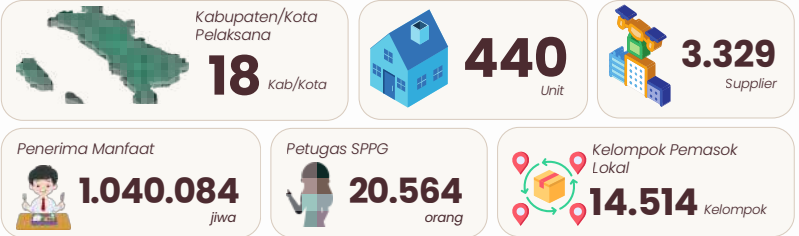
IMPLEMENTASI PROGRAM NASIONAL MAKAN BERGIZI GRATIS (MBG)

DAMPAK FISKAL DAN EKONOMI DARI PROGRAM MBG DI SUMATERA BARAT
S.D. TRIWULAN I 2026



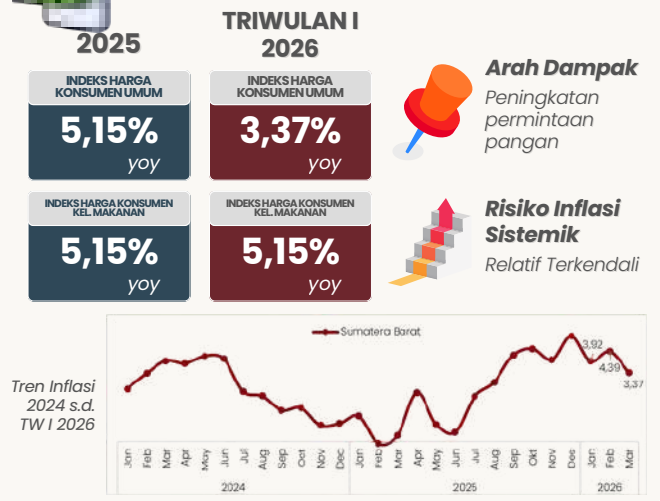
OVERVIEW

Karakter belanja Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang bersifat reguler dan berulang sepanjang tahun menjadikan program ini sebagai sumber permintaan pangan yang stabil dan berkelanjutan, sehingga mampu menjaga kesinambungan rantai pasok lokal sekaligus menjadi penopang konsumsi agregat dan aktivitas produksi-distribusi di tengah perlambatan ekonomi.

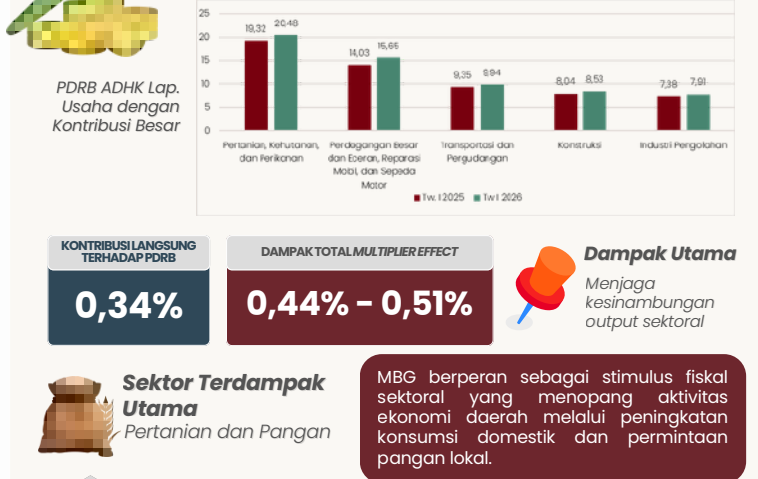


DASHBOARD DAMPAK MBG TERHADAP FISKAL DAN EKONOMI REGIONAL

JALUR HARGA (PRICE CHANNEL)

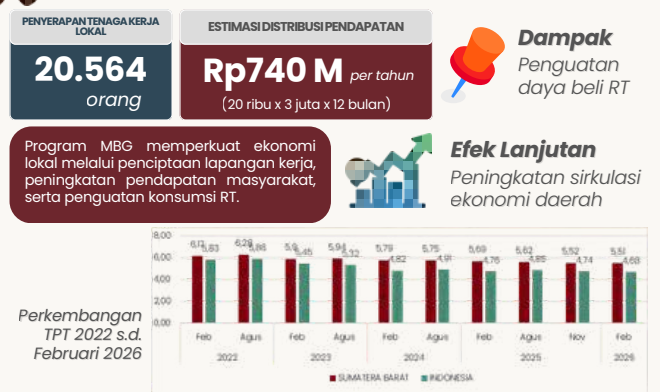


JALUR PERTUMBUHAN EKONOMI

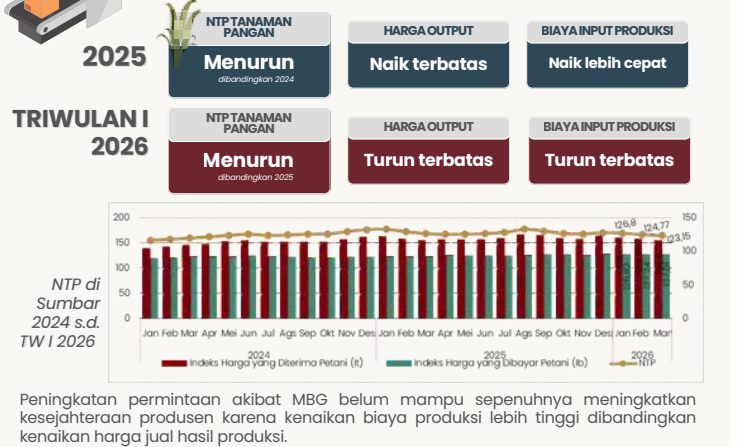


Program MBG mendorong peningkatan permintaan pangan sehingga kelompok makanan mengalami inflasi lebih tinggi dibandingkan inflasi umum. Namun tekanan harga masih bersifat sektoral dan belum berkembang menjadi inflasi regional yang sistemik.

DISTRIBUSI PENDAPATAN DAN TENAGA KERJA



JALUR PRODUKSI (PRODUCTION CHANNEL)



REKOMENDASI KEBIJAKAN

- Penguatan Sisi Penawaran**
 - Peningkatan produktivitas pertanian.
 - Stabilisasi harga input produksi.
 - Penguatan infrastruktur distribusi pangan.
- Efisiensi Distribusi dan Rantai Pasok**
 - Integrasi supplier lokal dengan SPPG.
 - Penguatan sistem logistik pangan daerah.
- Penguatan Kandungan Lokal**
 - Meningkatkan proporsi bahan pangan lokal dalam rantai pasok MBG.
 - Memperluas keterlibatan UMKM dan kelompok tani lokal.
- Penguatan Dampak Fiskal Regional**
 - Optimalisasi multiplier effect melalui belanja berbasis produksi lokal.
 - Sinkronisasi MBG dengan program pengentasan kemiskinan dan ketahanan pangan daerah.

CAPAIAN DAN TANTANGAN UTAMA

CAPAIAN POSITIF

- MBG efektif menjaga permintaan domestik di tengah perlambatan ekonomi.
- Mendorong pertumbuhan sektor pertanian dan pangan.
- Memperkuat distribusi pendapatan masyarakat.
- Memberikan multiplier effect terhadap ekonomi regional.

TANTANGAN UTAMA

- Penurunan NTP menunjukkan manfaat ekonomi belum optimal di tingkat produsen.
- Tekanan biaya input masih tinggi.
- Rantai pasok lokal perlu diperkuat untuk mengurangi kebocoran ekonomi keluar daerah.

TRANSFORMASI DAN RESILIENSI EKONOMI SUMATERA BARAT

DINAMIKA PERTUMBUHAN, TRANSFORMASI STRUKTUR EKONOMI, DAN KETAHANAN PASCAPANDEMI SERTA PASCABENCANA

2010 S.D. TRIWULAN I 2026

OVERVIEW

Ekonomi Sumatera Barat mengalami empat fase utama: (1) ekspansi 2010-2014, (2) moderasi dan transformasi jasa 2015-2019, (3) disrupsi pandemi 2020-2021, (4) pemulihan dan rebound pascabencana 2022-triwulan I 2026



Struktur ekonomi masih didominasi konsumsi rumah tangga, sektor pertanian, dan perdagangan.



Dalam jangka panjang terlihat penguatan sektor jasa, transformasi digital, serta peningkatan resiliensi ekonomi daerah

PERTUMBUHAN EKONOMI TRIWULAN I 2026



5,02%
(year on year)

PERTUMBUHAN EKONOMI TRIWULAN IV 2025 - TRIWULAN I 2026

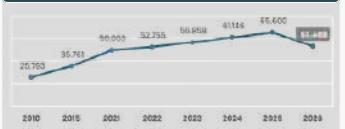


3,15%
(q-to-q)

TOTAL PDRB TRIWULAN I 2026



TREND PDRB (LAP. USAHA) Harga Konstan (Rp T) Triwulan I 2010 s.d. 2026



TIMELINE 5 FASE EKONOMI SUMATERA BARAT

1 2010-2014

EKSPANSI DAN PENGUATAN FONDASI EKONOMI



- Meningkatnya aktivitas perdagangan dan urbanisasi ekonomi wilayah perkotaan
- Konsumsi RT mendominasi kontribusi namun masih berbasis *domestic demand*
- PMTB meningkat signifikan dan konsumsi pemerintah meningkat stabil
- Stabilitas didukung oleh meningkatnya pendapatan, inflasi yang relatif terkendali, pertumbuhan sektor perdagangan, meningkatnya aktivitas UMKM/informal
- Ekonomi yang tumbuh stabil, berbasis konsumsi domestik, ditopang sektor pertanian dan perdagangan
- Mulai mengalami penguatan sektor jasa dan investasi

DATA KUNCI

PDRB LAPANGAN USAHA	Rp 25,79 T → Rp 33,41 T
KONSUMSI RUMAH TANGGA	Rp 14,01 T → Rp 20,43 T
PEMB. MODAL TETAP BRUTO	Rp 7,02 T → Rp 11,81 T

2 2015-2019

MODERASI PERTUMBUHAN DAN PENGUATAN SEKTOR JASA



- Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan masih menjadi kontributor terbesar PDRB Sumbar
- Penguatan sektor tersier sebagai transformasi ekonomi dengan peningkatan aktivitas perdagangan, transportasi, informasi dan komunikasi, jasa keuangan, dan akomodasi-makan minum
- Meningkatnya penggunaan teknologi dan digitalisasi layanan
- Pertumbuhan ekonomi stabil namun lebih moderat dan meningkatnya arah ekonomi ke sektor jasa
- Sektor pertanian masih menjadi fondasi utama ekonomi daerah

DATA KUNCI

FORB SEKTOR INFORMASI KOMUNIKASI	Rp 2,46 T → Rp 3,86 T
PDRB SEKTOR PERDAGANGAN	Rp 5,33 T → Rp 6,95 T
PEMB. MODAL TETAP BRUTO	Rp 12,84 T → Rp 17,78 T

3 2020-2021

DISRUPSI PANDEMI DAN UJI KETAHANAN EKONOMI



- Pandemi menyebabkan perlambatan signifikan pada aktivitas ekonomi terutama sektor rentan a.l. perdagangan, akomodasi-makan minum, transportasi, dan jasa
- Perubahan pola aktivitas ekonomi masyarakat secara drastis. Aktivitas ekonomi berbasis tatap muka mengalami perlambatan tajam, sementara aktivitas berbasis digital mulai meningkat
- APBN menjadi *shock absorber* untuk menjaga stabilitas ekonomi dan menjaga daya beli masyarakat
- Perlambatan signifikan konsumsi masyarakat dan investasi
- Sektor pertanian masih menjadi bantalan ekonomi daerah

DATA KUNCI

PDRB SEKTOR INFORMASI KOMUNIKASI	Rp 4,36 T → Rp 4,94 T
KONSUMSI FEMERIN TAH	Rp 5,44 T → Rp 5,88 T
PEMB. MODAL TETAP BRUTO	Rp 18,2 T → Rp 18,8 T

4 2022-2025

PEMULIHAN EKONOMI DAN REBOUND PASCAPANDEMI



- Pemulihan dan penguatan kembali perekonomian serta peningkatan konsumsi RT
- Rebound* pada sektor perdagangan dan transportasi pasca-pandemi
- Resiliensi ekonomi Sumbar cukup baik dalam menghadapi tekanan pasca-pandemi
- Konsumsi pemerintah memainkan peran penting untuk menjaga stabilitas dan APBN sebagai stimulus ekonomi
- Terdapat perlambatan di kuartal IV 2025 akibat bencana hidrometeorologi dan mengganggu aktivitas ekonomi, distribusi barang, mobilitas, dan aktivitas produksi
- Terfundanya investasi dan konstruksi

DATA KUNCI

TOTAL PDRB LAP. USAHA	Rp 52,76 T → Rp 65,6 T
PDRB SEKTOR PERDAGANGAN	Rp 7,24 T → Rp 8,91 T
PDRB SEKTOR TRANSPORTASI	Rp 4,89 T → Rp 6,24 T

5 TRIWULAN I 2026

PEMULIHAN PASCABENCANA DAN PENGUATAN REGIONAL



- Aktivitas ekonomi masyarakat membaik terutama dengan percepatan rehabilitasi infrastruktur di wilayah terdampak
- Ekonomi Sumbar meningkat signifikan dan menunjukkan perlambatan ekonomi akibat bencana bersifat sementara
- Akomodasi makan minum tumbuh paling tinggi menunjukkan meningkatnya aktivitas wisata dan perjalanan
- Konstruksi menguat sebagai dampak rehabilitasi pasca bencana
- Sektor informasi dan komunikasi menjadi sektor strategis
- Meningkatnya aktivitas ekspor dan penguatan investasi

DATA KUNCI

PERTUMBUHAN EKONOMI	5,02% year on year
SEKTOR AKOMODASI MAKAN MINUM	17,77% y-o-y
SEKTOR KONSTRUKSI	8,02% y-o-y
SEKTOR INFORMASI DAN KOMUNIKASI	15,24% y-o-y
SEKTOR NET EKSPOR	9,02% y-o-y

INSIGHT UTAMA KAJIAN

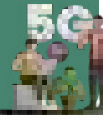
1 PERTANIAN TETAP MENJADI FONDASI EKONOMI

Kontributor terbesar sepanjang periode 2010-2026 dan menjadi bantalan ekonomi terutama saat pandemi dan bencana



2 TRANSFORMASI MENUJU EKONOMI BERBASIS TEKNOLOGI DAN DIGITAL

Perdagangan, transportasi, informasi dan komunikasi, serta akomodasi-makan minum menjadi sektor dengan pertumbuhan tercepat



3 KONSUMSI RUMAH TANGGA TETAP MENDOMINASI

Struktur ekonomi di Sumbar masih berbasis *domestic demand* sehingga konsumsi RT menjadi motor penggerak utama



4 APBN BERPERAN SEBAGAI SHOCK ABSORBER

APBN terbukti menjadi bantalan untuk menjaga stabilitas dan daya beli masyarakat serta stimulus ekonomi di Sumbar



KESIMPULAN

Perekonomian Sumbar menunjukkan kemampuan adaptasi dan resiliensi yang cukup kuat dalam menghadapi perlambatan ekonomi nasional akibat pandemi COVID-19 maupun bencana alam. Tantangan utama yaitu memperkuat transformasi ekonomi, meningkatkan investasi dan produktivitas, memperluas hilirisasi sektor unggulan, dan memperkuat ketahanan ekonomi daerah terhadap risiko global dan geografis



REKOMENDASI KEBIJAKAN

- Memperkuat transformasi ekonomi dan sektor unggulan daerah
- Meningkatkan investasi produktif dan kualitas infrastruktur
- Mendorong hilirisasi komoditas unggulan (CPO, gambir, dan hasil pertanian)
- Memperkuat ketahanan ekonomi daerah terhadap risiko global dan geografis

SUMBER DATA

BPS PROV. SUMATERA BARAT
Seri PDRB Lapangan Usaha dan Pengeluaran 2010-Triwulan I 2026
<https://sumbar.bps.go.id>



BAB 1

ANALISIS EKONOMI REGIONAL



Burung Kuu Rajo (*Argusianus argus*) adalah salah satu burung yang terdapat di dalam suku Phasianidae. Kuu Rajo mempunyai bulu berwarna cokelat kemerahan dan kulit kepala berwarna biru. Burung jantan dewasa berukuran sangat besar, panjangnya dapat mencapai 200 cm. Di atas kepalanya terdapat jambul dan bulu tengkuk berwarna kehitaman. Burung jantan dewasa juga memiliki bulu sayap dan ekor yang sangat panjang, dihiasi dengan bintik-bintik besar menyerupai mata serangga atau ocelli. Burung betina berukuran lebih kecil dari burung jantan, panjangnya sekitar 75 cm, dengan jambul kepala berwarna kecokelatan.

Foto: <https://thelife-animal.blogspot.com/>



BAB I ANALISIS EKONOMI REGIONAL

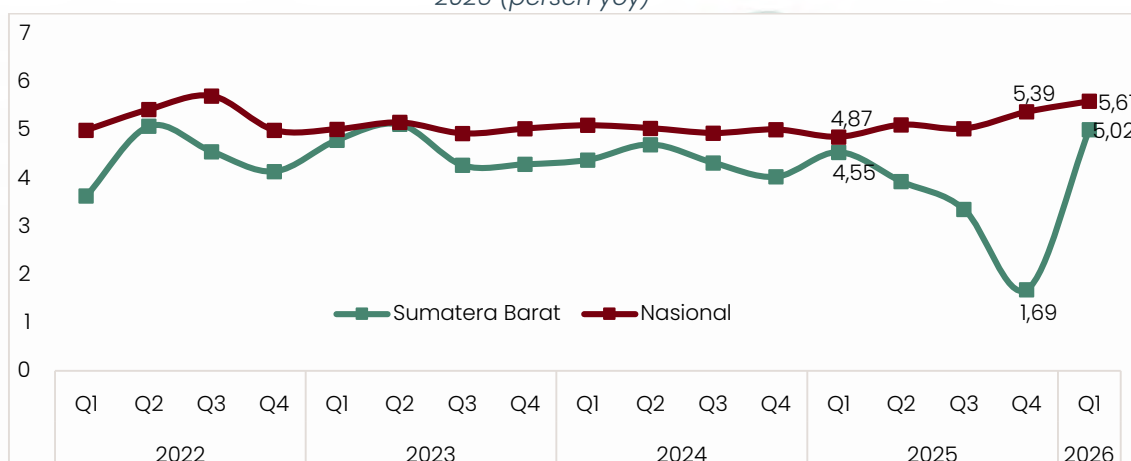
1.1 Analisis Indikator Makro Ekonomi

1.1.1 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

a. Kondisi Perekonomian

Ekonomi Sumatera Barat pada triwulan I 2026 tumbuh sangat signifikan dibanding triwulan sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa pemulihan ekonomi terus berlanjut. Kondisi perekonomian Provinsi Sumatera Barat pada triwulan I 2026 tumbuh sebesar 5,02 persen (yoy). Secara spasial, pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Barat lebih rendah dibandingkan pertumbuhan ekonomi regional Pulau Sumatera yang sebesar 5,13 persen (yoy), dan juga angka tersebut masih lebih rendah dibandingkan pertumbuhan ekonomi secara nasional yang sebesar 5,61 persen (yoy).

Grafik I.1 Pertumbuhan Ekonomi Sumatera Barat dan Nasional per Triwulan, Tahun 2022 – Triwulan I 2026 (persen yoy)



Sumber: BPS, diolah

Sumatera Barat menyumbang sebesar 6,83 persen terhadap perekonomian di Pulau Sumatera dan hanya menyumbang 1,51 persen terhadap perekonomian nasional. Dibanding sepuluh provinsi di Pulau Sumatera, pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat menempati posisi tertinggi keempat setelah Kepulauan Riau (7,04 persen), Lampung (5,08 persen), dan Sumatera Selatan (5,34 persen).

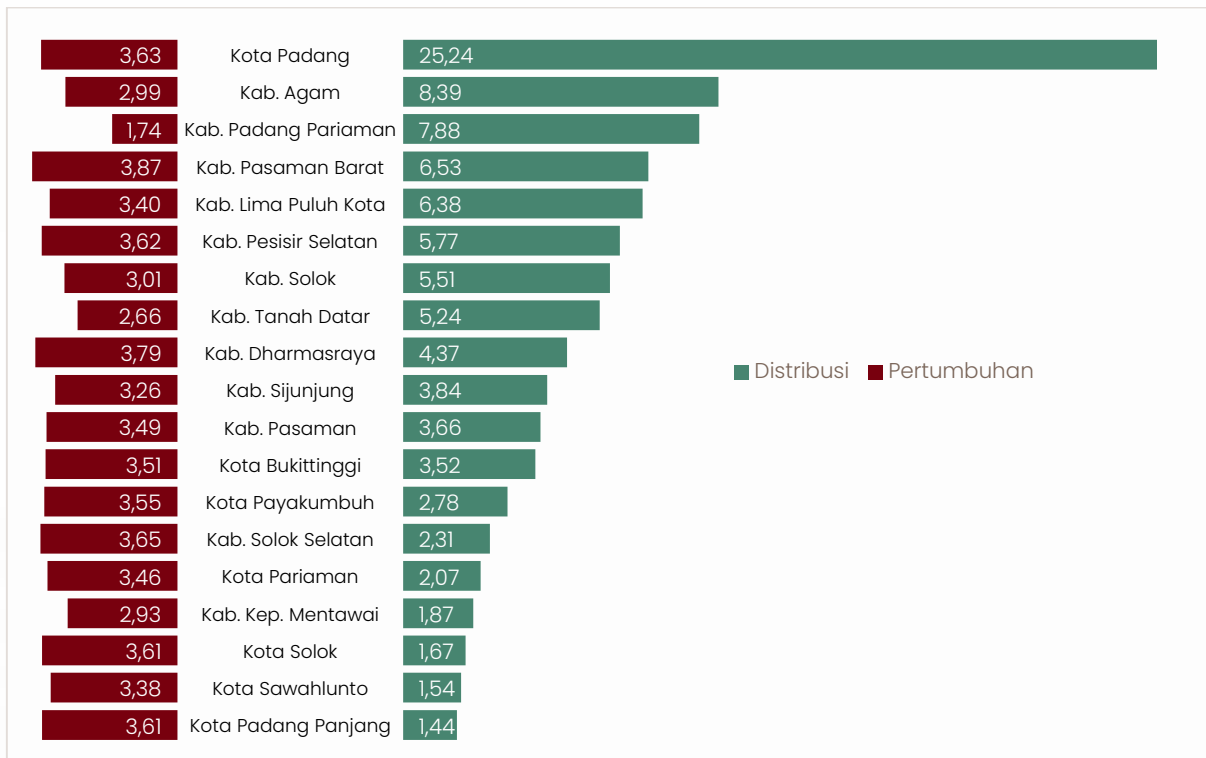
Struktur perekonomian di Provinsi Sumatera Barat didominasi oleh Kota Padang dengan kontribusi pada tahun 2025 sebesar 25,24 persen terhadap PDRB Provinsi Sumatera Barat atau senilai 88,99 triliun; diikuti oleh Kabupaten Agam sebesar 8,39 persen atau senilai Rp29,60 triliun; Kabupaten Padang Pariaman sebesar 7,88 persen atau senilai Rp27,79 triliun; Kabupaten Pasaman Barat sebesar 6,53 persen atau senilai Rp23,01 triliun; dan Kabupaten Lima Puluh Kota sebesar 6,38 persen atau senilai Rp22,49 triliun.

Pada tahun 2025, pertumbuhan ekonomi (yoy) Provinsi Sumatera Barat di seluruh kabupaten/kota tumbuh positif dengan pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Kabupaten Pasaman Barat sebesar 3,87 persen (yoy); diikuti oleh Kabupaten Dharmasraya sebesar 3,79



persen (yoy); dan Kabupaten Solok Selatan sebesar 3,65 persen (yoy). Sementara itu, Kabupaten Padang Pariaman mengalami pertumbuhan ekonomi terendah di antara kabupaten/kota lain di Sumatera Barat, yakni sebesar 1,74 persen.

Grafik I. 2 Pertumbuhan dan Distribusi PDRB Provinsi Sumatera Barat Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2025



Sumber: BPS Sumatera Barat, diolah

Pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat pada triwulan I 2026 tumbuh positif jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, maupun kondisi setahun sebelumnya. Pada triwulan I 2026 terjadi peningkatan produksi komoditas pertanian, seperti jagung, daging ayam ras, telur ayam ras, dan produksi berbagai komoditas perikanan. Aktivitas angkutan penumpang dan barang juga terpantau meningkat seiring dengan momentum Ramadhan dan Hari Raya Idulfitri yang jatuh pada triwulan I 2026. Momentum tersebut juga berhasil meningkatkan konsumsi rumah tangga terutama pada kelompok bahan makanan & minuman, restoran, rekreasi & budaya, serta peralatan rumah tangga. Sejalan dengan hal itu, konsumsi pemerintah juga tercatat mengalami kenaikan yang dipicu oleh pemberian THR. Di sisi lain, Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) menguat, ditopang oleh impor barang modal dan proyek pasca-bencana. Sementara itu, terjadi *rebound* pada ekspor lewat komoditas unggulan. Kondisi tersebut mendorong perekonomian Provinsi Sumatera Barat pada triwulan I 2026 tumbuh signifikan dibandingkan dengan triwulan IV 2025, maupun triwulan I 2025.

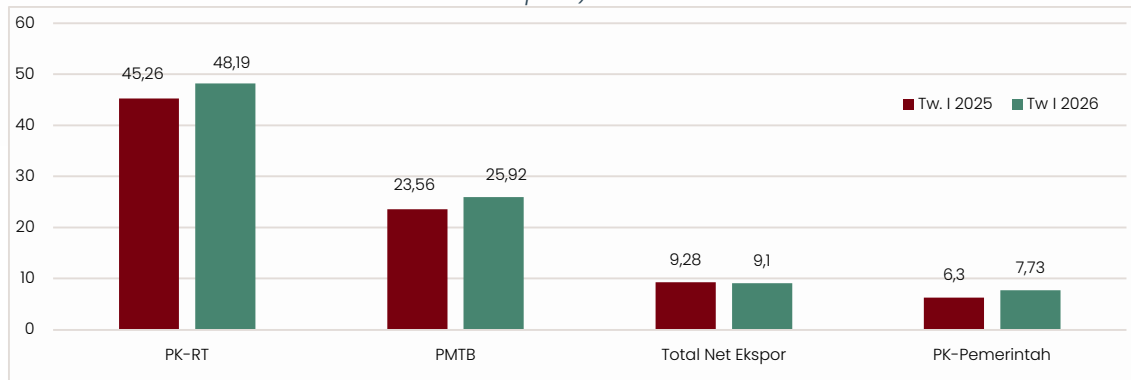


b. Nominal PDRB

1) Berdasarkan PDRB Pengeluaran

Struktur PDRB Nominal Sumatera Barat menurut komponen pengeluaran atas dasar harga berlaku triwulan I 2026 tidak menunjukkan perubahan yang signifikan jika dibandingkan dengan kondisi triwulan I 2025.

Grafik I. 3 Nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran Dengan Kontribusi Besar (Triliun Rupiah)



Sumber: BPS Sumatera Barat, diolah

Perekonomian Sumatera Barat masih didominasi oleh komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT) yang mencakup lebih dari separuh PDRB Sumatera Barat yaitu sebesar 51,84 persen atau senilai Rp48,19 triliun, diikuti oleh komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) yang berkontribusi sebesar 27,88 persen atau senilai Rp25,92 triliun, komponen Total Net Ekspor dengan kontribusi 9,79 persen atau senilai Rp9,1 triliun; serta komponen Konsumsi Pemerintah yang berkontribusi sebesar 8,31 persen atau senilai Rp7,73 triliun.

Pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat pada triwulan I 2026 tumbuh positif jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Seluruh komponen pengeluaran mengalami pertumbuhan, mencerminkan ekspansi ekonomi yang merata dari sisi permintaan agregat. Sebagai penyumbang utama PDRB dari sisi pengeluaran, ekspor dan konsumsi rumah tangga sama-sama tumbuh positif. Namun demikian, pertumbuhan ekspor tercatat lebih tinggi dibandingkan konsumsi rumah tangga. Komponen Ekspor Barang dan Jasa tumbuh sebesar 15,24 persen, sedangkan pertumbuhan pada komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah sebesar 14,77 persen. Kinerja ekspor luar negeri terutama didorong oleh komoditas CPO, sementara distribusi domestik didukung oleh peningkatan permintaan antar daerah. Di sisi lain, tingginya pertumbuhan konsumsi pemerintah didorong oleh peningkatan belanja pegawai, khususnya melalui pemberian Tunjangan Hari Raya (THR). Sementara itu, PMTB menjadi sumber pertumbuhan terbesar pada triwulan I tahun 2026, yakni sebesar 1,99 persen.

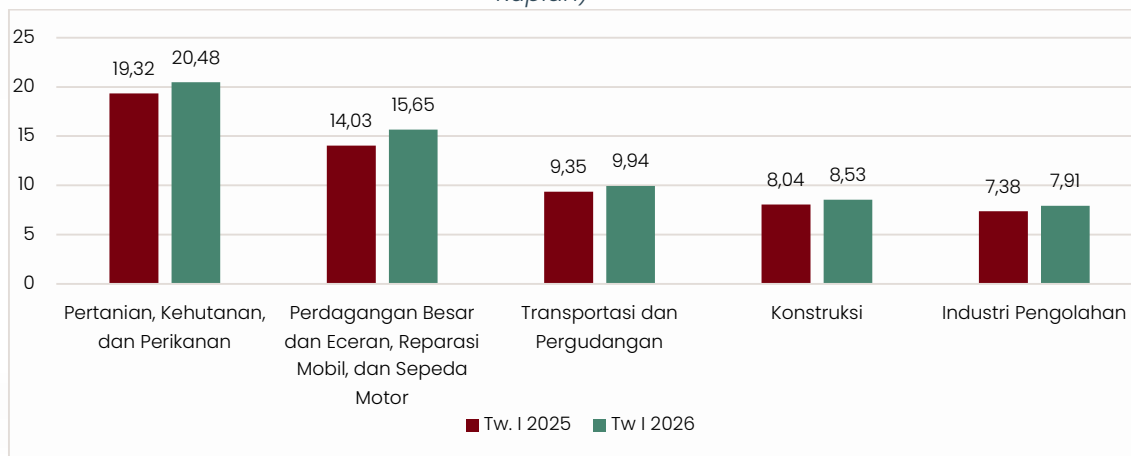
2) Berdasarkan PDRB Per Sektor Lapangan Usaha

Struktur PDRB Nominal Sumatera Barat berdasarkan lapangan usaha atas dasar harga berlaku triwulan I tahun 2026 secara kontribusi tidak menunjukkan banyak perubahan dibanding kondisi triwulan I tahun 2025. Perekonomian Sumatera Barat masih didominasi oleh lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 22,03



persen atau senilai Rp20,48 triliun; diikuti oleh lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 16,84 persen atau senilai Rp15,65 triliun, Transportasi dan Pergudangan sebesar 10,69 persen atau senilai Rp9,94 triliun, Konstruksi sebesar 9,18 persen atau senilai Rp8,53 triliun, serta Industri Pengolahan sebesar 8,15 persen atau senilai Rp7,91 triliun. Peranan kelima lapangan usaha tersebut dalam perekonomian Sumatera Barat mencapai 66,89 persen.

Grafik I. 4 PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Dengan Kontribusi Besar (Triliun Rupiah)



Sumber: BPS Sumatera Barat, diolah

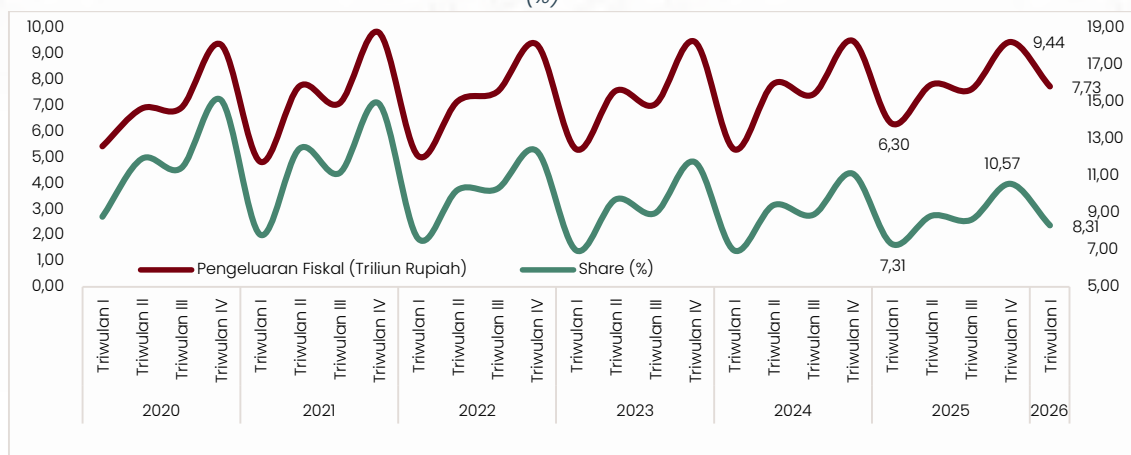
Peningkatan pada sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan didorong oleh terjadinya peningkatan yang signifikan pada jumlah produksi jagung, daging ayam ras telur ayam ras, dan daging sapi pada triwulan I 2026 dibandingkan triwulan I 2025. Selain itu juga terjadi kenaikan produksi komoditas sub Lapangan Usaha Perikanan di antaranya produksi ikan kembung, ikan tuna, ikan tongkol, ikan mas, ikan nila, dan komoditas lainnya yang cukup tinggi di atas 5 persen. Sedangkan peningkatan pada sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor terjadi sebagai dampak peningkatan aktivitas perdagangan secara *online*, baik untuk kebutuhan harian, puasa maupun persiapan lebaran. Pada lapangan usaha angkutan udara juga terdapat kenaikan jumlah penumpang serta barang yang diangkut, terutama dipengaruhi oleh momentum Ramadhan dan Hari Raya Idulfitri.

1.1.2 Kontribusi Fiskal terhadap Pembentukan PDRB

Pada triwulan I 2026, aktivitas fiskal memberikan kontribusi sebesar 8,31 persen terhadap pembentukan PDRB dengan realisasi sebesar Rp7,73 triliun. Sedangkan atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp4,06 triliun. Jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya, kontribusi pemerintah mengalami peningkatan sebesar 14,77 persen (yoy).



Grafik I. 5 Pengeluaran Fiskal dan Share Terhadap Pembentukan PDRB Tahun 2020 – Triwulan I 2026 (%)

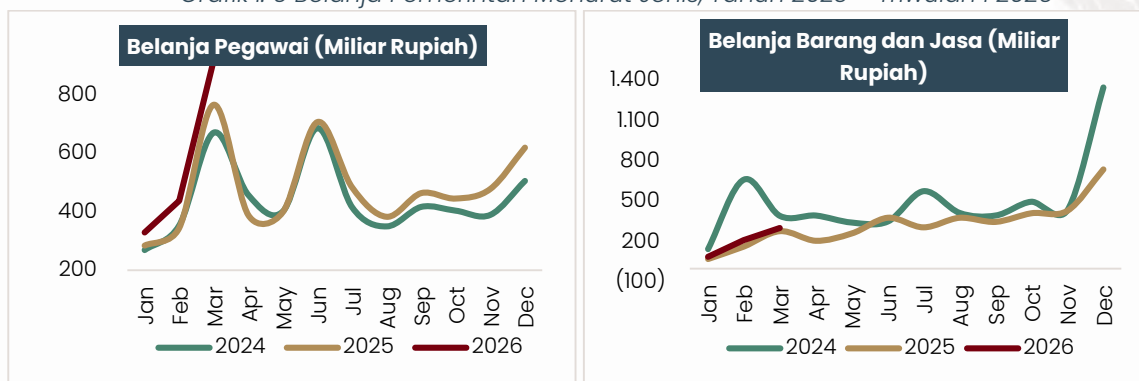


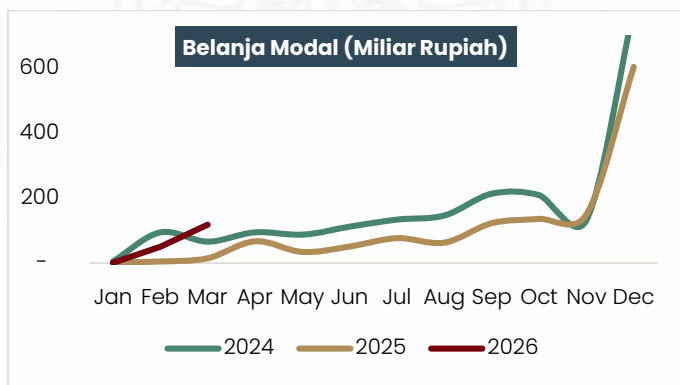
Sumber: BPS Sumatera Barat, diolah

Tren pergerakan kontribusi aktivitas fiskal terhadap PDRB setiap tahun selalu sama, di mana terjadi peningkatan yang cukup signifikan pada periode triwulan IV, sementara pada triwulan I terjadi tren penurunan. Hal ini terkait dengan pola realisasi belanja pemerintah baik yang bersumber dari APBN maupun APBD yang masih terkonsentrasi pada akhir tahun anggaran yaitu periode triwulan IV. Pola realisasi belanja pemerintah, baik dari belanja barang maupun belanja modal selalu menumpuk pada akhir tahun anggaran.

Berdasarkan grafik 1.8 di atas dapat terlihat bahwa belanja pegawai selalu tinggi pada momen menjelang Hari Raya Idulfitri dan tahun ajaran baru. Peningkatan belanja pegawai pada momen tersebut berkaitan dengan pemberian Tunjangan Hari Raya (THR), bonus insentif, dan Gaji 13. Realisasi belanja pegawai pada triwulan I 2026 merupakan yang tertinggi dibanding tahun-tahun sebelumnya. Sementara itu, pola realisasi belanja barang dan jasa terlihat selalu menumpuk pada akhir tahun yang umumnya disebabkan karena adanya penyesuaian anggaran yang biasanya terpusat pada beberapa bulan terakhir tahun anggaran, adanya kewajiban untuk menyerap anggaran secara maksimal pada akhir tahun, serta adanya tekanan untuk memenuhi target kinerja anggaran yang turut memengaruhi realisasi belanja barang pada akhir tahun anggaran. Pola realisasi belanja modal juga mirip dengan pola realisasi belanja barang dan jasa, yaitu selalu menumpuk pada akhir tahun anggaran yang umumnya disebabkan karena adanya proses pengadaan yang rumit dan perubahan prioritas sehingga membuat banyak pengeluaran modal terjadi pada akhir tahun anggaran.

Grafik I. 6 Belanja Pemerintah Menurut Jenis, Tahun 2023 – Triwulan I 2026



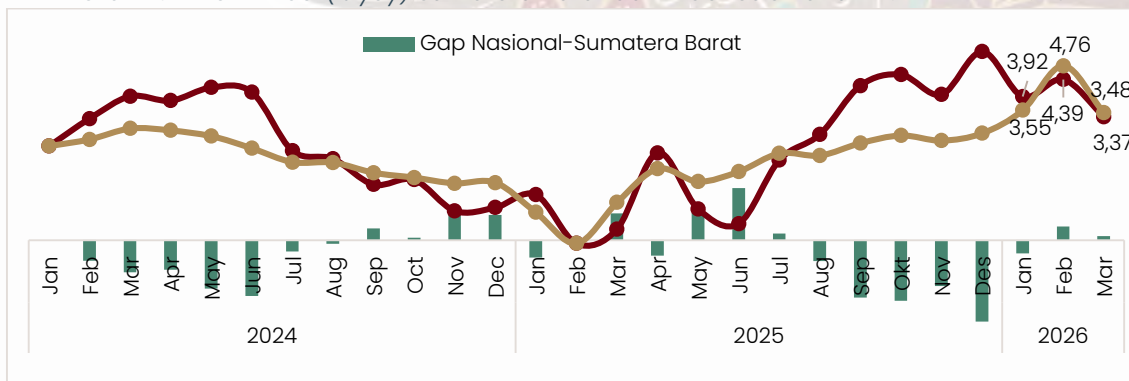


Sumber: Sintesa, diolah

1.1.3 Tingkat Inflasi

Berdasarkan hasil pemantauan BPS Provinsi Sumatera Barat tahun 2026 pada empat kabupaten/kota pengukur tingkat inflasi di Provinsi Sumatera Barat yaitu Kota Padang, Kota Bukittinggi, Kabupaten Dharmasraya dan Kabupaten Pasaman Barat tercatat bahwa terjadi inflasi (yoy) pada bulan Januari sebesar 3,92 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 111,12; pada bulan Februari sebesar 4,39 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 111,45; dan pada bulan Maret tercatat sebesar 3,37 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 111,49. Selama triwulan I tahun 2026, inflasi yoy tertinggi terjadi di Kabupaten Pasaman Barat pada Januari (4,29 persen), serta di Kota Bukittinggi pada Februari (5,17 persen) dan Maret (4,32 persen). Sementara itu, yang terendah pada bulan Januari terjadi di Dharmasraya sebesar 3,35 persen, sedangkan bulan Februari dan Maret inflasi terendah terjadi di Kabupaten Pasaman Barat yakni sebesar 3,81 persen dan 2,74 persen.

Grafik I. 7 Tren Inflasi (% yoy) Sumatera Barat dan Indonesia Tahun 2024 - TW I 2026



Sumber: BPS, diolah

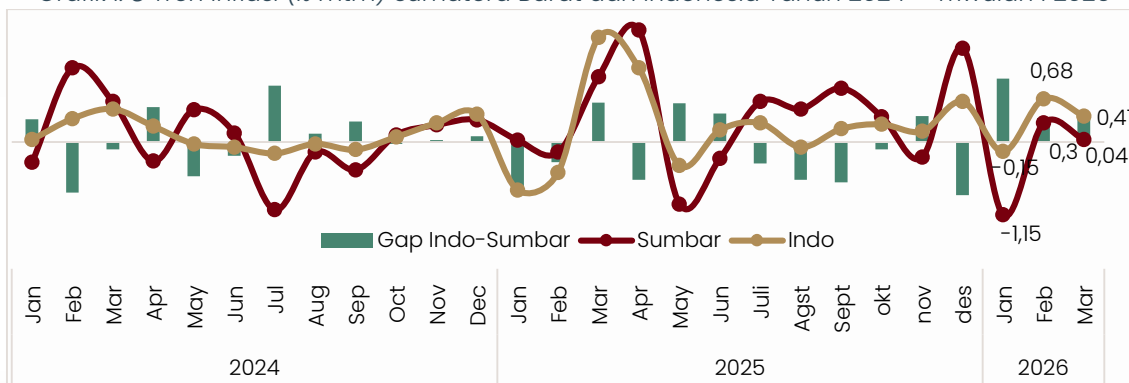
Inflasi yoy di Sumatera Barat selama triwulan I 2026 cenderung berfluktuatif dan searah dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Tingginya tingkat inflasi pada triwulan I 2026 terutama berkaitan erat dengan tingginya curah hujan dan dampak bencana alam akhir tahun 2025 yang masih dirasakan hingga triwulan I 2026. Selain itu, peningkatan permintaan barang dan jasa pada Bulan Ramadhan serta Hari Raya Idulfitri juga turut memperkuat tekanan harga pada periode ini. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa inflasi pada momen hari besar keagamaan bersifat musiman dan berbasis gangguan pasokan, sehingga memerlukan respons cepat TPID melalui pengamanan pasokan, kelancaran distribusi, dan stabilisasi harga pangan



strategis. Sejalan dengan triwulan sebelumnya, meningkatnya inflasi di triwulan I 2026 juga didorong oleh peningkatan harga emas perhiasan seiring dengan penguatan harga emas global. Komoditas utama penyumbang inflasi (yoy) pada triwulan I 2026 yakni emas perhiasan dan tarif listrik

Berdasarkan 4 kabupaten/kota pengukur inflasi di Sumatera Barat, selama triwulan I 2026 tercatat deflasi mtm pada bulan Januari sebesar 1,15 persen, serta inflasi mtm pada bulan Februari 0,30 persen dan bulan Maret 0,04 persen.

Grafik I. 8 Tren Inflasi (% mtm) Sumatera Barat dan Indonesia Tahun 2024 – Triwulan I 2026



Sumber: BPS Sumatera Barat, diolah

Deflasi mtm di Sumatera Barat yang terjadi pada bulan Januari terutama disebabkan oleh penurunan indeks harga pada kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau serta Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga dengan andil inflasi sebesar 1,20 persen dan 0,11 persen. Komoditas utama penyumbang deflasi pada Januari adalah cabai merah dan tarif air minum PAM. Selanjutnya, pada bulan Februari terjadi inflasi mtm, sebagai dampak kenaikan indeks harga pada kelompok Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga serta kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya dengan andil inflasi masing-masing sebesar 0,14 persen. Komoditas utama penyumbang inflasi mtm bulan Februari adalah tarif air minum PAM dan emas perhiasan. Sementara itu, inflasi yang terjadi di bulan Maret terutama disebabkan oleh meningkatnya indeks harga pada kelompok Makanan, Minuman dan Tembakau serta kelompok Transportasi dengan andil inflasi masing-masing sebesar 0,06 persen dan 0,05 persen. Komoditas utama penyumbang inflasi mtm pada bulan Maret adalah daging ayam ras, jengkol dan bensin.

Secara umum selama triwulan I 2026, inflasi Sumatera Barat belum sesuai target sasaran inflasi daerah yang sebesar 2,5%±1%. Namun demikian, pengendalian inflasi tidak terlepas dari komitmen serta kolaborasi tim pengendalian inflasi dengan *stakeholder* terkait dalam menjaga realisasi inflasi sesuai target dan sasaran inflasi. Kegiatan yang sudah dilakukan pada triwulan I tahun 2026 di antaranya adalah:

- 1) Menjamin keterjangkauan harga melalui pelaksanaan sidak pasar terpadu tim pengendalian inflasi Sumatera Barat, pemantauan IPH komoditas pangan penyumbang inflasi secara rutin setiap minggu, serta kegiatan Gerakan Pangan Murah (GPM).
- 2) Memastikan ketersediaan pasokan dengan melaksanakan *launching* bantuan pangan untuk masyarakat, berupa beras dan minyak goreng untuk periode Februari–Maret 2026 sebagai dukungan pemenuhan kebutuhan pokok.



- 3) Memastikan kelancaran distribusi barang dan jasa dengan cara melakukan pendistribusian beras SPHP dan stok pangan komersial oleh Bulog serta intensifikasi distribusi komoditas pangan strategis oleh Toko Tani Indonesia Center (TTIC)
- 4) Melakukan komunikasi efektif pada pihak-pihak terkait yang dapat mendorong pengendalian inflasi di Sumatera Barat, salah satunya yakni mengikuti rapat koordinasi rutin mingguan terkait pengendalian inflasi yang difasilitasi Kemendagri setiap minggu. Selain itu, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat juga melakukan HLM TPID untuk antisipasi pengendalian inflasi menjelang Bulan Ramadhan dan Hari Raya Idulfitri, pembentukan sekretariat bersama TPID Provinsi/Kabupaten/Kota, dan merumuskan kesepakatan untuk fasilitasi kerja sama antar daerah kabupaten/kota yang surplus dengan yang defisit berdasarkan prognosis neraca pangan yang disusun oleh Dinas Pangan Provinsi.

1.1.4 Statistik Perbankan Regional

Tabel 1.1 Statistik Perbankan Regional Sumatera Barat (Juta Rupiah)

No	Indikator (Rp Juta)	TW I 2025	TW I 2026	Growth (%)
1	Simpanan	166.081.560	179.631.697	8,16
	- Giro	24.244.555	29.483.058	21,61
	- Tabungan	97.420.331	105.517.578	8,31
	- Simpanan Berjangka	44.416.675	44.631.059	0,48
2	Pinjaman yang diberikan	239.769.184	247.439.953	3,20
	- Modal Kerja	88.221.096	84.191.153	-4,57
	- Investasi	41.484.043	47.213.812	13,81
	- Konsumsi	110.064.046	116.034.988	5,42
3	Kredit UMKM	91.971.840	90.331.195	-1,78
	- Mikro	46.385.134	46.093.328	-0,63
	- Kecil	36.201.309	34.723.494	-4,08
	- Menengah	9.385.397	9.514.374	1,37

Sumber: Bank Indonesia, diolah

Jumlah Simpanan Keuangan masyarakat di Provinsi Sumatera Barat selama triwulan I 2026 mencapai Rp179,63 triliun atau tumbuh sebesar 8,16 persen (yoy). Menurut komponen, simpanan masyarakat di Provinsi Sumatera Barat sepanjang triwulan I 2026, simpanan berupa Giro mencapai Rp29,48 triliun atau tumbuh sebesar 21,61 persen (yoy), simpanan berupa Tabungan mencapai Rp105,52 triliun atau tumbuh sebesar 8,31 persen (yoy), serta simpanan berupa Simpanan Berjangka mencapai Rp44,63 triliun atau tumbuh sebesar 0,48 persen (yoy).

Total Pinjaman yang diberikan kepada masyarakat di Sumatera Barat sepanjang triwulan I 2026 mencapai Rp247,44 triliun atau tumbuh sebesar 3,20 persen (yoy). Menurut komponen pinjaman masyarakat sepanjang triwulan I 2026, pinjaman untuk Modal Kerja mencapai Rp84,19 triliun atau mengalami penurunan sebesar 4,57 persen (yoy), pinjaman untuk Investasi mencapai Rp47,21 triliun atau tumbuh sebesar 13,81 persen (yoy), serta pinjaman untuk Konsumsi mencapai Rp116,03 triliun atau tumbuh sebesar 5,42 persen (yoy).

Jumlah Kredit UMKM di Sumatera Barat sepanjang triwulan I 2026 mencapai Rp90,33 triliun atau turun sebesar 1,78 persen (yoy). Menurut komponen Kredit UMKM, kredit untuk Usaha Mikro mencapai Rp46,09 triliun atau mengalami penurunan sebesar 0,63 persen (yoy), kredit untuk



Usaha Kecil mencapai Rp34,72 triliun atau mengalami penurunan sebesar 4,08 persen (yoy), serta kredit untuk usaha Menengah mencapai Rp9,51 triliun atau tumbuh sebesar 1,37 persen (yoy).

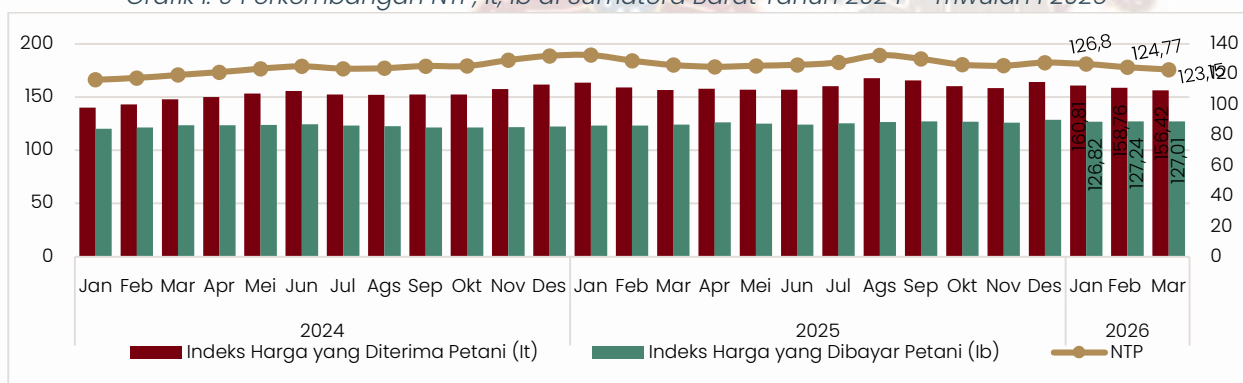
1.2 Analisis Perkembangan Indikator Kesejahteraan dan Pembangunan

1.2.1 Nilai Tukar Petani (NTP)

Nilai Tukar Petani (NTP) merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk melihat tingkat kemampuan/daya beli petani di pedesaan. NTP juga menunjukkan daya tukar (*term of trade*) dari produk pertanian dengan barang dan jasa yang dikonsumsi maupun untuk biaya produksi. NTP diukur dengan membandingkan indeks harga yang diterima petani (It) terhadap indeks harga yang dibayar petani (Ib). Semakin tinggi NTP, maka secara relatif semakin kuat pula kemampuan/daya beli petani.

NTP Sumatera Barat sepanjang triwulan I 2026 nilainya berada di atas 100 yang menggambarkan bahwa konsumsi petani mampu dipenuhi oleh pendapatannya. NTP yang di atas 100 juga mencerminkan harga jual produk pertanian yang diterima petani lebih tinggi dibandingkan dengan harga barang-barang yang dikonsumsi petani. Pada Januari 2026, NTP Sumatera Barat tercatat sebesar 126,80 atau mengalami penurunan sebesar 0,72 persen dibandingkan dengan NTP Desember 2025 yang tercatat sebesar 127,72. Indeks harga yang diterima petani sebesar 160,81 atau lebih tinggi dibandingkan indeks harga yang dibayar petani yaitu sebesar 126,82. Sedangkan NTP Sumatera Barat pada Februari 2026 sebesar 124,77, yang turun kembali 1,60 persen dibanding bulan sebelumnya. Indeks harga yang diterima petani sebesar 158,76 atau lebih tinggi dibandingkan indeks harga yang dibayar petani yaitu sebesar 127,24. Sementara itu, pada Maret 2026, NTP Sumatera Barat sebesar 123,15, mengalami penurunan 1,30 persen dibanding bulan sebelumnya. Indeks harga yang diterima petani sebesar 156,42 atau lebih tinggi dibandingkan indeks harga yang dibayar petani yaitu sebesar 127,01.

Grafik I. 9 Perkembangan NTP, It, Ib di Sumatera Barat Tahun 2024 – Triwulan I 2026



Sumber: BPS Sumatera Barat, diolah

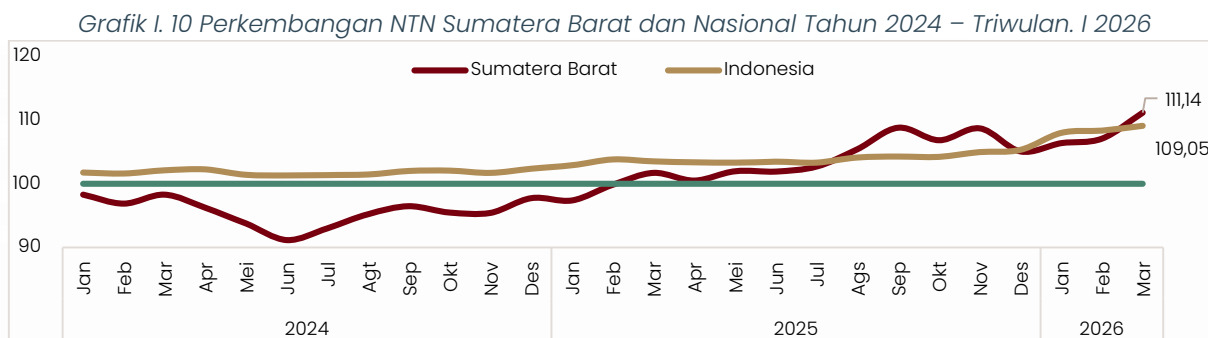
Lebih lanjut, jika dilihat per subsektor, penurunan NTP pada triwulan I 2026 terjadi karena penurunan NTP pada beberapa subsektor. Subsektor Hortikultura selalu mengalami penurunan NTP setiap bulannya pada triwulan I 2026. Sebaliknya, NTP Perikanan konsisten mengalami peningkatan angka NTP setiap bulannya. Sementara itu, subsektor lainnya mengalami fluktuasi angka NTP pada periode tersebut.



1.2.2 Nilai Tukar Nelayan (NTN)

Nilai Tukar Nelayan (NTN) adalah rasio antara indeks harga yang diterima nelayan dengan indeks harga yang dibayar nelayan. Secara konseptual, NTN mengukur kemampuan tukar produk perikanan tangkap yang dihasilkan nelayan dengan barang atau jasa yang dikonsumsi oleh rumah tangga nelayan dan keperluan mereka dalam menghasilkan produk perikanan tangkap. NTN diukur dengan membandingkan indeks harga yang diterima nelayan (It) terhadap indeks harga yang dibayar nelayan (Ib). Semakin tinggi NTN, maka secara relatif semakin kuat pula kemampuan/daya beli nelayan.

NTN Sumatera Barat sepanjang triwulan I 2026 tercatat di atas 100. Hal ini menunjukkan bahwa daya beli nelayan di Provinsi Sumatera Barat pada triwulan I 2026 sudah optimal. NTN pada bulan Januari sebesar 106,35, meningkat 0,66 persen pada bulan Februari menjadi 107,05, dan terjadi peningkatan kembali pada bulan Maret sebesar 3,82 persen menjadi 111,14. Meski demikian, bila dibandingkan dengan capaian nasional, NTN Sumatera Barat relatif lebih rendah, kecuali pada bulan Maret, di mana NTN Sumatera Barat sebesar 111,14, atau lebih besar dibanding NTN Indonesia yang sebesar 109,05.



Sumber: BPS Sumatera Barat, diolah

1.2.3 Indikator Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjadi ukuran kualitas hidup karena mengukur pencapaian hasil pembangunan dari suatu daerah/wilayah berdasarkan sejumlah komponen dasar kualitas hidup yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak. Semakin tinggi nilai IPM, menunjukkan pencapaian pembangunan manusianya semakin baik. Pembangunan manusia di Provinsi Sumatera Barat terus mengalami peningkatan. IPM Provinsi Sumatera Barat kembali membaik pada tahun 2025 seiring dengan perbaikan kinerja ekonomi yang berpengaruh positif terhadap indikator konsumsi riil per kapita.

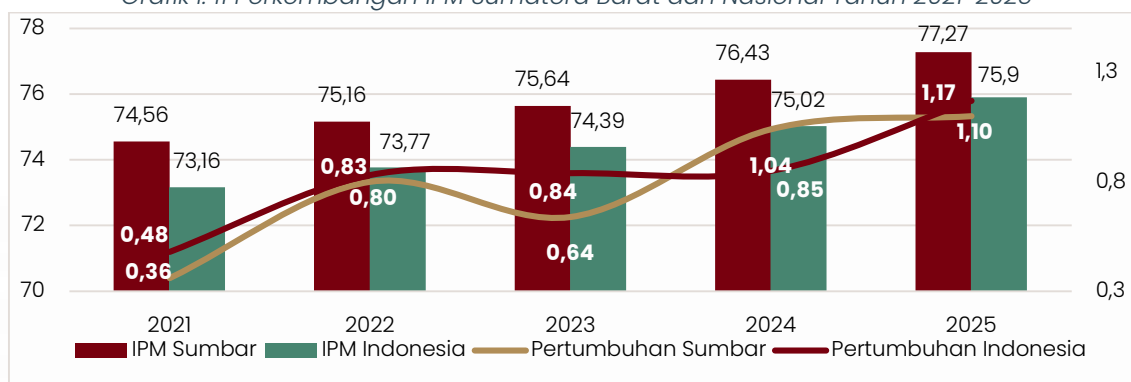
Pada tahun 2025, IPM Provinsi Sumatera Barat mencapai 77,27 persen, meningkat 1,10 persen dibandingkan tahun 2024 yang tercatat sebesar 76,43. Peningkatan IPM terjadi pada semua dimensi, baik umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak. Jika dilihat dari komponennya, dimensi umur panjang dan hidup sehat yang diukur berdasarkan Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH) mencapai 74,69 tahun, atau meningkat 0,32 tahun (0,43 persen) dibandingkan tahun 2024. Harapan Lama Sekolah (HLS) penduduk usia 7 tahun mencapai 14,31 tahun pada tahun 2025, atau setara dengan lamanya waktu yang dibutuhkan untuk menamatkan pendidikan hingga setingkat Perguruan Tinggi tingkat II, dan angka ini meningkat 0,01 tahun (0,07 persen) dibandingkan tahun 2024. Sementara itu, rata-rata Lama Sekolah (RLS) penduduk usia 25 tahun ke atas mencapai 9,77 tahun, atau setara dengan waktu yang dibutuhkan untuk



menamatkan pendidikan sampai dengan tingkat SMP atau sederajat, dan angka ini meningkat 0,33 tahun (3,50 persen) dibandingkan tahun 2024. Di sisi lain, dimensi standar hidup layak yang direpresentasikan dengan pengeluaran riil per kapita (yang disesuaikan) masyarakat Indonesia mencapai Rp12,04 juta per tahun, atau meningkat 2,76 persen dibandingkan tahun 2024 yang tercatat sebesar Rp11,72 juta per tahun.

Sejak tahun 2016, status pembangunan manusia di Sumatera Barat meningkat dari level “sedang” menjadi “tinggi”, dengan rata-rata peningkatan sebesar 0,90 persen per tahun selama periode 2021-2025. Peningkatan IPM pada tahun 2025 terjadi pada seluruh Kabupaten/Kota di Sumatera Barat sehingga pada tahun 2025 terdapat 6 kota pada level IPM sangat tinggi, 12 kabupaten/kota dengan status tinggi, dan 1 kabupaten dengan status IPM sedang, yakni Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Grafik I. 11 Perkembangan IPM Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2021-2025



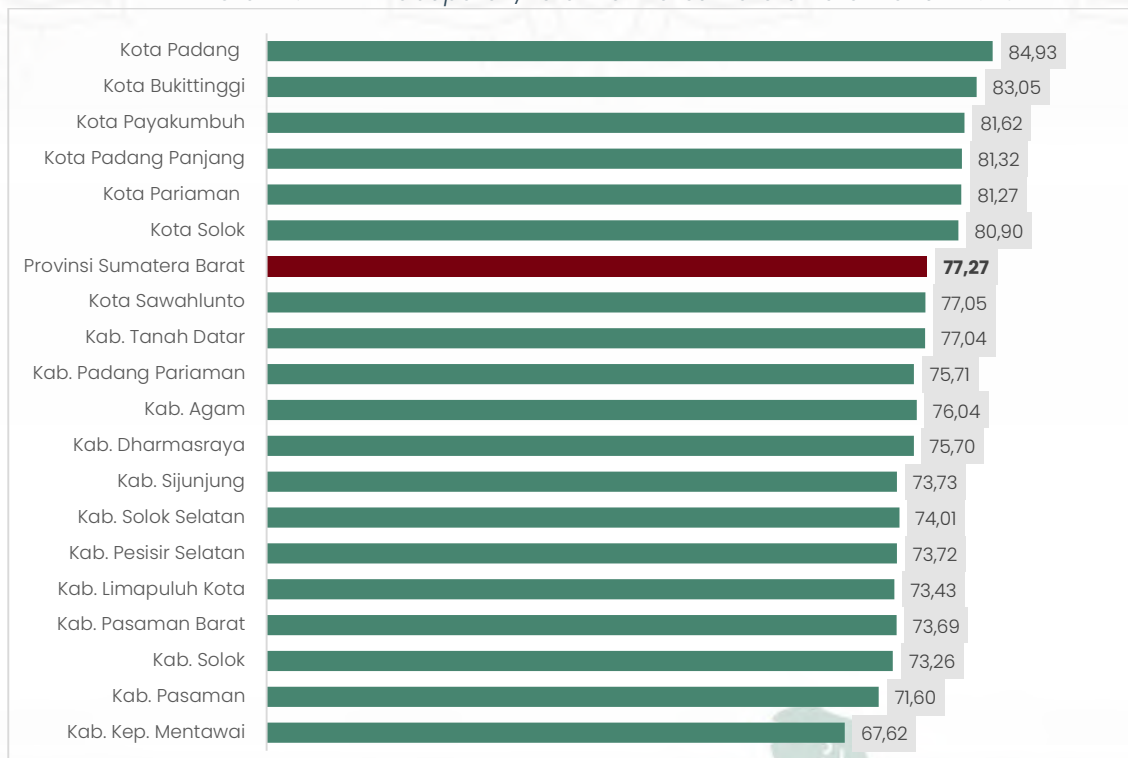
Sumber: BPS, diolah

Apabila dibandingkan dengan IPM Nasional, IPM Sumatera Barat berada di atas IPM Nasional yang tercatat sebesar 75,90 pada tahun 2025. Secara spasial, IPM wilayah Sumatera Barat berkisar antara 67,62 (Kabupaten Kepulauan Mentawai) hingga 84,93 (Kota Padang). Sebaliknya, jika dilihat berdasarkan pertumbuhan IPM, Kepulauan Mentawai merupakan Kabupaten dengan pertumbuhan tertinggi yaitu sebesar 1,42 persen sedangkan kabupaten/kota dengan pertumbuhan terendah yaitu Kota Sawahlunto yang meningkat sebesar 0,48 persen.

Berdasarkan wilayah, terdapat enam Kabupaten/Kota yang memiliki IPM di atas IPM Provinsi Sumatera Barat, yaitu Kota Padang (84,93), Kota Bukittinggi (83,05), Kota Payakumbuh (81,62), Kota Padang Panjang (81,32), Kota Pariaman (81,27), dan Kota Solok (80,90). Sedangkan wilayah yang memiliki IPM di bawah IPM Provinsi Sumatera Barat adalah Kota Sawahlunto (77,05), Kabupaten Tanah Datar (77,04), Kabupaten Agam (76,04), Kabupaten Padang Pariaman (75,71), Kabupaten Dharmasraya (75,70), Kabupaten Solok Selatan (74,01), Kabupaten Sijunjung (73,73), Kabupaten Pesisir Selatan (73,72), Kabupaten Pasaman Barat (73,69), Kabupaten Lima Puluh Kota (73,43), Kabupaten Solok (73,26), Kabupaten Pasaman (71,60), dan Kabupaten Kepulauan Mentawai (67,62).



Grafik I. 12 IPM Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025

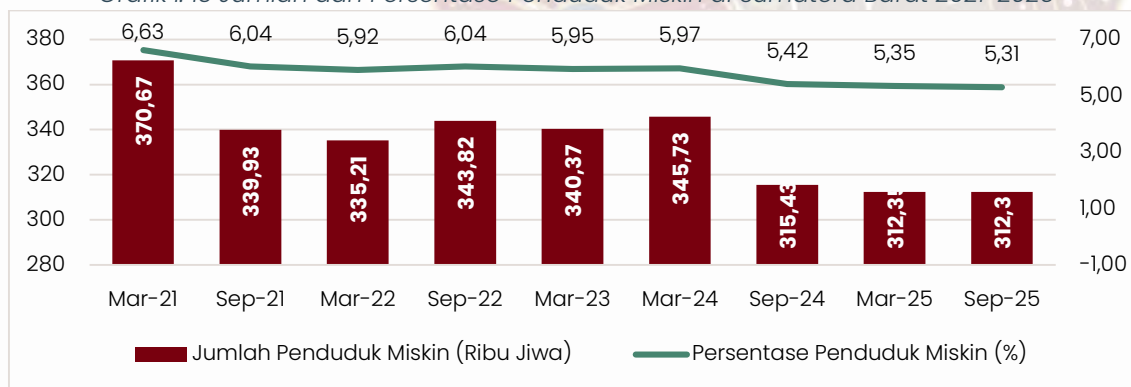


Sumber: BPS Sumatera Barat, diolah

1.2.4 Tingkat Kemiskinan

Secara umum, pada lima tahun terakhir, tingkat kemiskinan di Sumatera Barat cenderung berfluktuatif baik dari sisi jumlah maupun persentasenya. Pada tahun 2025, jumlah penduduk miskin Sumatera Barat dalam setahun terakhir turun dari 5,42 persen atau sebanyak 315,43 ribu jiwa (September 2024) menjadi 5,31 persen atau sebanyak 312,30 ribu jiwa (September 2025).

Grafik I. 13 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Sumatera Barat 2021–2025



Sumber: BPS Sumatera Barat, diolah

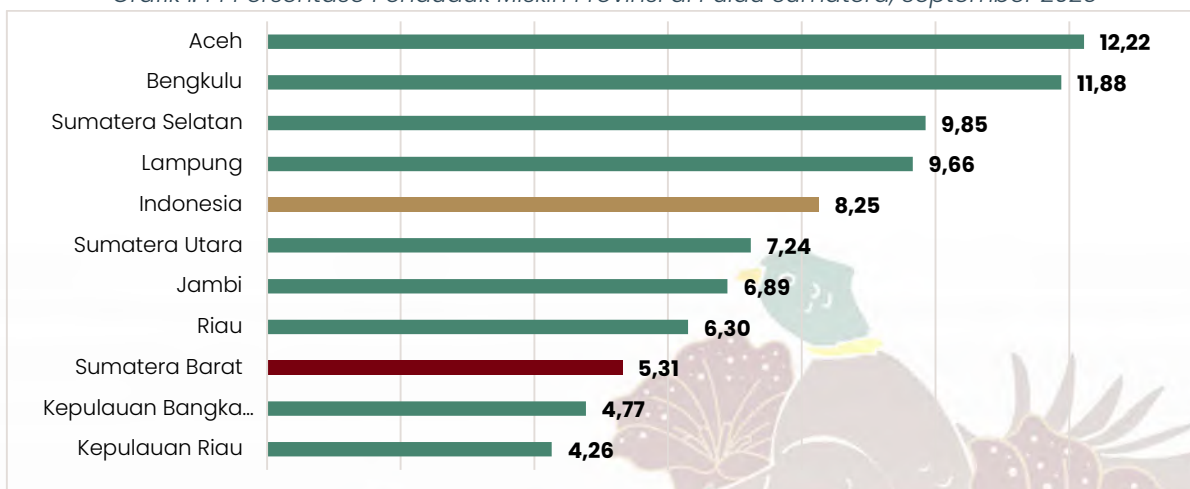
Jumlah penduduk miskin di Sumatera Barat pada September 2025 tercatat mencapai 312,30 ribu jiwa, berkurang sekitar 3.130 orang dibandingkan September 2024 yang tercatat sebanyak 315,43 ribu jiwa. Sementara berdasarkan tempat tinggal pada periode September 2025, jumlah penduduk miskin perkotaan turun sebesar 10.510 jiwa dan di pedesaan turun sebesar 7.370 jiwa jika dibandingkan dengan periode September 2024.



Untuk menekan angka kemiskinan di Sumatera Barat khususnya di daerah pedesaan, Pemerintah Provinsi telah melakukan berbagai program dan kegiatan baik di bidang pertanian secara luas, perdagangan (UMKM) maupun pariwisata dalam rangka mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran terbuka. Alokasi APBD untuk sektor unggulan juga telah diperbesar sehingga efeknya dapat dirasakan oleh masyarakat.

Persentase penduduk miskin Sumatera Barat lebih rendah dari kemiskinan nasional yang tercatat sebesar 8,25 persen pada September 2025. Sementara jika dibandingkan dengan seluruh provinsi di regional Sumatera, persentase penduduk miskin di Sumatera Barat berada di posisi ke-3 terendah, di mana Provinsi Aceh menjadi wilayah dengan persentase penduduk miskin tertinggi (12,22 persen) dan Provinsi Kepulauan Riau yang terendah (4,26 persen).

Grafik I. 14 Persentase Penduduk Miskin Provinsi di Pulau Sumatera, September 2025

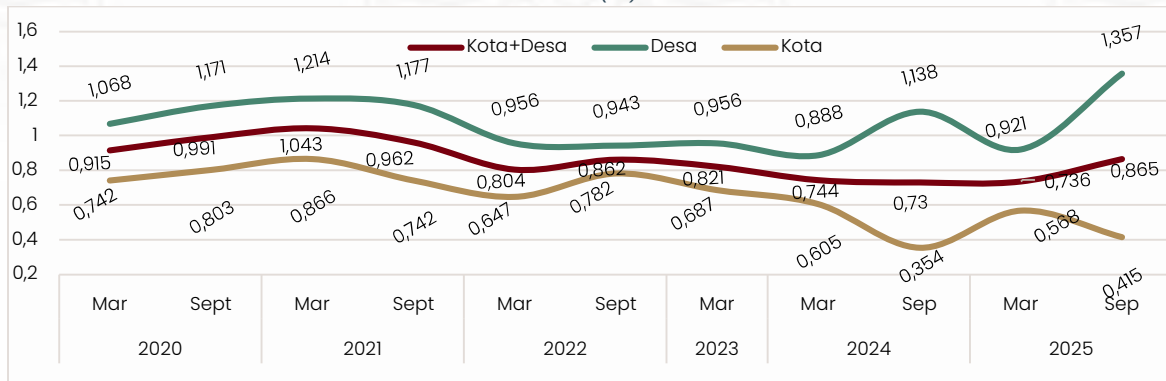


Sumber: BPS, diolah

Indikator kemiskinan berikutnya adalah kedalaman kemiskinan yang tercermin dari indeks kedalaman kemiskinan (PI). Indeks kedalaman kemiskinan (PI) digunakan untuk mengukur rata-rata persentase gap/kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Data BPS menunjukkan PI di Sumatera Barat pada September 2025 sebesar 0,865, atau terjadi peningkatan PI sekitar 0,135 poin dibanding bulan September 2024 yang tercatat sebesar 0,730. Hal ini dapat diartikan bahwa secara rata-rata persentase jarak antara pengeluaran penduduk miskin dengan garis kemiskinan di Provinsi Sumatera Barat pada September 2025 sedikit melebar dibandingkan September 2024. Secara spasial, nilai PI di pedesaan masih lebih tinggi dibandingkan dengan perkotaan yang sebesar 0,415, sementara di pedesaan sebesar 1,357.



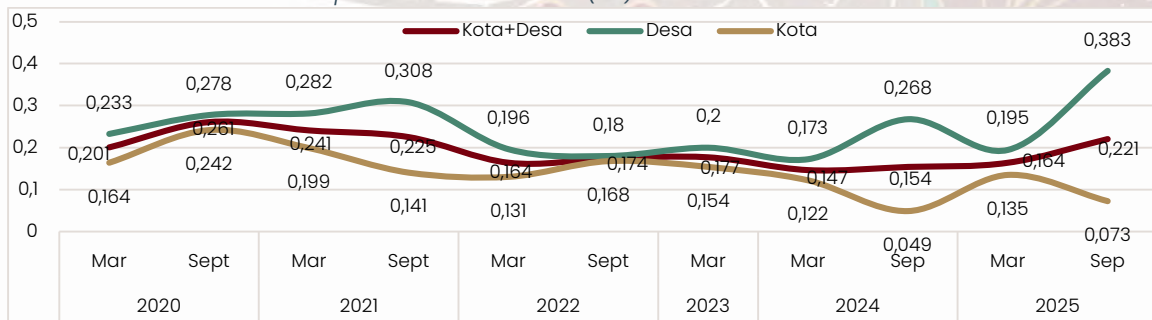
Grafik I. 15 Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) di Sumatera Barat Tahun 2020–2025



Sumber: BPS Sumatera Barat, diolah

Indikator kemiskinan lainnya adalah Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) yang menggambarkan ketimpangan pengeluaran antar penduduk miskin. Angka dari Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) tidak bisa diinterpretasikan namun hanya bisa dilakukan perbandingan yang mana ketika angka P2 semakin tinggi berarti ketimpangan pengeluaran antar penduduk miskin semakin tinggi. Sejalan dengan P1, indeks keparahan kemiskinan (P2) di Sumatera Barat pada September 2025 mengalami peningkatan sebesar 0,067, atau meningkat dari 0,154 pada September 2024 menjadi 0,221 pada September 2025. Hal ini menandakan bahwa ketimpangan antar penduduk miskin di Provinsi Sumatera Barat semakin besar. Nilai P2 pedesaan juga relatif lebih tinggi dibandingkan di daerah perkotaan yang sebesar 0,073, sedangkan di pedesaan sebesar 0,383. Artinya pengeluaran antar penduduk miskin yang tinggal di pedesaan cenderung lebih timpang dibandingkan pengeluaran antar penduduk miskin yang tinggal di perkotaan.

Grafik I. 16 Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) di Sumatera Barat Tahun 2020–2025



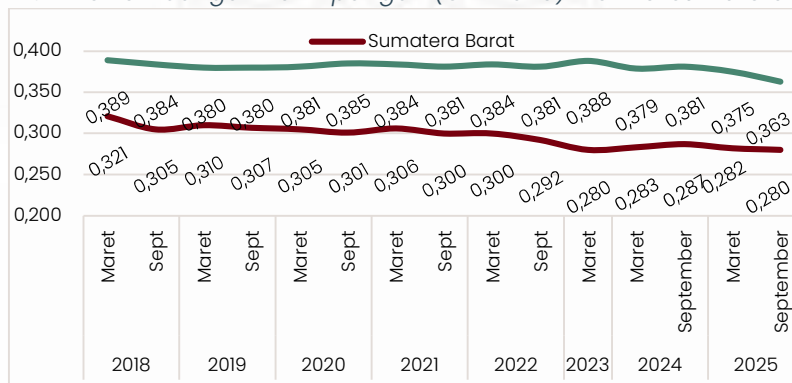
Sumber: BPS Sumatera Barat, diolah

1.2.5 Tingkat Ketimpangan (Gini Ratio)

Salah satu metode yang digunakan untuk mengukur pemerataan pendapatan adalah *gini ratio*. Nilai *gini ratio* berkisar antara 0 sampai dengan 1, semakin kecil angka *gini ratio* maka akan semakin baik karena mengindikasikan peningkatan pemerataan distribusi ekonomi penduduk suatu wilayah atau berkurangnya tingkat ketimpangan ekonomi. Selain itu, penurunan ketimpangan juga mengindikasikan adanya kesempatan yang sama bagi masyarakat untuk mendapatkan akses terhadap sumber daya ekonomi dan sosial.



Grafik I. 17 Perkembangan Ketimpangan (Gini Ratio) Provinsi Sumatera Barat



Sumber: BPS, diolah

Tingkat ketimpangan atau ketidakmerataan ekonomi Sumatera Barat dari tahun 2018 sampai 2025 berfluktuatif. *Gini ratio* Provinsi Sumatera Barat pada September 2025 tercatat sebesar 0,280 atau mengalami penurunan sebesar 0,007 poin jika dibandingkan *gini ratio* pada September 2024. Secara spasial, *gini ratio* Sumatera Barat tersebut masih lebih baik dibandingkan dengan *gini ratio* nasional yang tercatat sebesar 0,363, bahkan berada pada urutan terendah ke-3 di Sumatera dan terendah ke-7 di Indonesia. Jika dilihat berdasarkan daerah tempat tinggal, *gini ratio* di daerah perkotaan selalu lebih besar daripada daerah pedesaan yang mana *gini ratio* perkotaan tercatat sebesar 0,301 sedangkan daerah pedesaan tercatat sebesar 0,236. Hal ini menunjukkan tingkat ketimpangan di area perkotaan lebih tinggi dibandingkan daerah pedesaan. Selanjutnya pada distribusi pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah di Provinsi Sumatera Barat tercatat sebesar 23,89 persen yang berarti pengeluaran penduduk secara rata-rata berada pada kategori tingkat ketimpangan rendah. Jika dirinci menurut wilayah, di daerah perkotaan angkanya tercatat sebesar 23,03 persen sedangkan untuk pedesaan tercatat sebesar 25,83 persen yang berarti baik di daerah perkotaan maupun pedesaan di Provinsi Sumatera Barat masuk kategori ketimpangan rendah.

1.2.6 Kondisi Ketenagakerjaan dan Tingkat Pengangguran

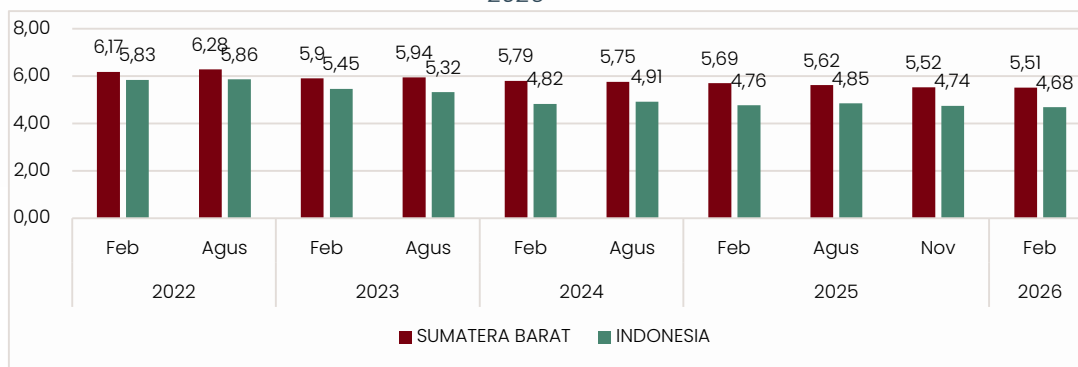
Membbaiknya kondisi perekonomian mampu meningkatkan penyerapan tenaga kerja sebanyak 85,75 ribu pada Februari 2026 dibanding periode yang sama pada tahun sebelumnya. Pada Februari 2026, penduduk usia kerja di Sumatera Barat terdapat sebanyak 4,52 juta orang, bertambah sebesar 67,65 ribu orang yang terdiri atas angkatan kerja sebanyak 3,24 juta orang (bertambah sebesar 84,70 ribu orang) dan bukan angkatan kerja sebanyak 1,28 juta orang (berkurang 17,05 ribu orang). Komposisi angkatan kerja Sumatera Barat terdiri atas 3,06 juta orang bekerja (bertambah 85,75 ribu orang) dan 178,68 ribu orang pengangguran (berkurang 1,05 ribu orang). Jika dirinci, dari 3,06 juta orang yang bekerja, terdapat sebanyak 1,83 juta orang pekerja penuh (bertambah 4,07 ribu orang), sebanyak 889,15 ribu orang pekerja paruh waktu (bertambah 77,71 ribu orang), dan sebanyak 338,70 ribu orang setengah pengangguran (bertambah 3,96 ribu orang).

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tenaga kerja yang tidak terserap oleh pasar kerja dan menggambarkan kurang termanfaatkannya pasokan tenaga kerja. TPT Sumatera Barat hasil Sakernas Februari 2026 sebesar 5,51 persen, yang berarti dari 100 orang Angkatan kerja, terdapat sekitar 5 sampai 6 orang



penganggur. Angka ini turun sebesar 0,18 persen poin dibandingkan dengan Februari 2025. TPT Perkotaan tercatat sebesar 6,83 persen, lebih tinggi dibandingkan TPT Perdesaan yang tercatat sebesar 3,83 persen. TPT Perkotaan mengalami penurunan sebesar 0,51 persen poin dan TPT Perdesaan mengalami penurunan sebesar 0,02 persen poin dibanding Februari 2025.

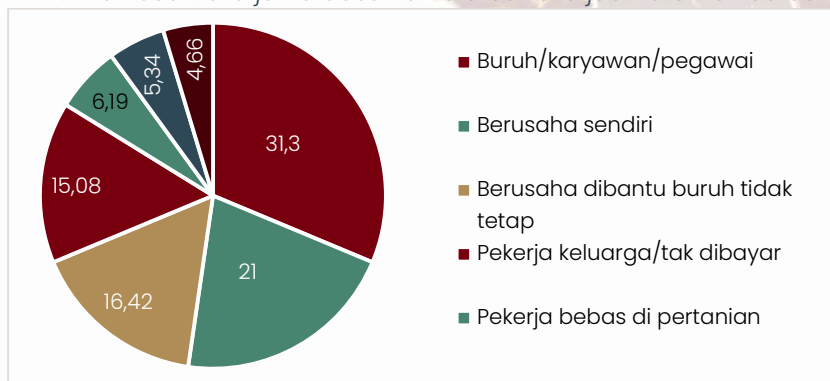
Grafik I. 18 Perkembangan Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Sumatera Barat, 2022-2026



Sumber: BPS Sumatera Barat, diolah

Pada Agustus 2025, penduduk bekerja di Sumatera Barat paling banyak berstatus buruh/karyawan/pegawai, yaitu sebanyak 959,12 ribu orang atau sebesar 31,30 persen, sementara yang paling sedikit berstatus Berusaha Dibantu Buruh Tetap sebesar 142,76 ribu orang atau sebesar 4,66 persen.

Grafik I. 19 Distribusi Pekerja Berdasarkan Status Pekerjaan Utama Februari 2026

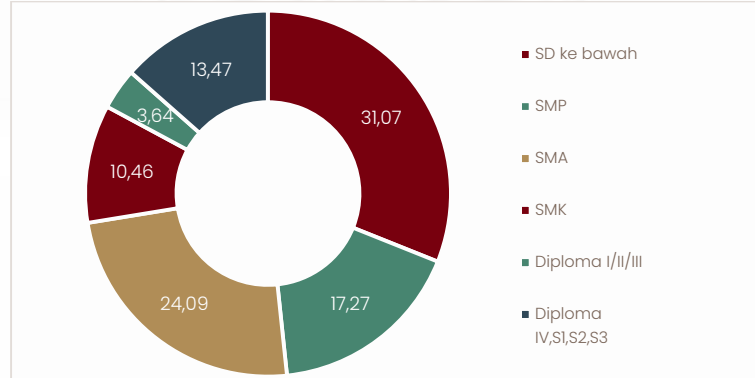


Sumber: BPS Sumatera Barat, diolah

Apabila dilihat dari latar belakang pendidikannya, penduduk bekerja di Sumatera Barat masih didominasi oleh yang berpendidikan SD ke bawah yaitu sebanyak 952,07 ribu orang atau sebesar 31,07 persen, sementara yang paling kecil disumbang oleh tenaga kerja berpendidikan tinggi yaitu Diploma I/II/III yang hanya sebanyak 111,10 ribu orang atau sebesar 3,64 persen. Sementara itu, pekerja dengan berpendidikan SMP sebanyak 529,23 ribu orang atau sebesar 17,27 persen, pekerja dengan berpendidikan SMA sebanyak 738,13 ribu orang atau sebesar 24,09 persen, dan pekerja dengan berpendidikan SMK sebanyak 320,57 ribu orang atau sebesar 10,46 persen.



Grafik I. 20 Distribusi Pekerja Berdasarkan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, Februari 2026



Sumber: BPS Sumatera Barat, diolah

Berdasarkan lapangan pekerjaan, terdapat lima lapangan pekerjaan yang menyerap tenaga kerja paling banyak di Sumatera Barat per Februari 2026 yaitu sektor Pertanian, Kehutanan, Perikanan sebanyak 1.009,42 ribu orang atau sebesar 32,95 persen; sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor sebanyak 522,69 ribu orang atau sebesar 17,06 persen; serta sektor Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum sebanyak 273,32 ribu orang atau sebesar 8,92 persen.





BAB 2

ANALISIS FISKAL REGIONAL



Burung Kuau Rajo tersebar di Asia Tenggara. Spesies ini ditemukan di hutan tropis Sumatra, Borneo dan Semenanjung Malaysia. Pada musim berbiak, burung jantan memamerkan bulu sayap dan ekornya di depan burung betina. Bulu-bulu sayapnya dibuka membentuk kipas, memamerkan "ratusan mata" di depan pasangannya. Berdasarkan dari hilangnya habitat hutan serta penangkapan liar yang terus berlanjut, Kuau Rajo dievaluasi sebagai berisiko Hampir Terancam di dalam IUCN Red List. Burung ini didaftarkan dalam CITES Appendix II.

Foto: Shutterstock Sunti



BAB II ANALISIS FISKAL REGIONAL

2.1. Analisis Laporan Realisasi Anggaran

Pelaksanaan APBN

APBN tahun 2026 berperan sebagai instrumen kebijakan yang adaptif dan responsif dalam merespons dinamika global yang masih berfluktuasi. Disiplin fiskal terus dijaga dengan defisit APBN terkendali dalam batas aman. Salah satu kebijakan pemerintah adalah dengan melanjutkan kebijakan efisiensi anggaran dengan potensi penghematan Rp121,2 triliun hingga Rp130,2 triliun. Adapun fokus efisiensi dilakukan pada belanja yang kurang prioritas dan non operasional seperti perjalanan dinas, rapat, dan kegiatan seremonial, untuk dialihkan ke belanja yang berdampak langsung pada masyarakat. Kebijakan ini bertujuan menekan defisit anggaran ke 2,48% PDB serta mengalihkan dana ke program produktif dan rekonstruksi pasca-bencana.

Hingga triwulan I 2026, realisasi Pendapatan Negara di wilayah Sumatera Barat tercatat sebesar Rp1,58 triliun atau 16,34% dari target APBN 2026. Angka ini berada di bawah angka realisasi pada periode yang sama tahun lalu yang mencapai Rp1,91 triliun atau turun sebesar 17,26%. Di sisi lain, Belanja Negara telah terealisasi sebesar Rp9,90 triliun atau 30,68% dari pagu dan tumbuh signifikan hingga 33,27% dibandingkan tahun 2025. Dengan kondisi tersebut, posisi APBN Regional Sumatera Barat hingga akhir Maret 2026 mengalami defisit sebesar Rp8,33 triliun, lebih dalam 50,70% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang hanya mencapai Rp5,52 triliun.

Tabel II.11-Account APBN Wilayah Sumatera Barat Triwulan I Tahun 2025–2026 (dalam miliar Rp)

I-Account APBN	TA 2025			TA 2026			Growth
	Pagu	Realisasi	%Real	Pagu	Realisasi	%Real	
PENDAPATAN NEGARA	8.059,10	1.905,29	23,64%	9.645,20	1.576,45	16,34%	(17,26%)
Pendapatan Perpajakan	6.425,96	1.406,50	21,89%	7.745,77	1.034,62	13,36%	(26,44%)
Pendapatan Negara Bukan Pajak	1.633,14	498,79	30,54%	1.899,43	541,84	28,53%	8,63%
BELANJA NEGARA	32.617,61	7.429,66	22,78%	32.272,71	9.901,48	30,68%	33,27%
Belanja Pemerintah Pusat	12.012,78	1.949,02	16,22%	12.642,35	2.456,08	19,43%	26,02%
Belanja Pegawai	5,895,70	1,398,21	23,72%	6,173,37	1,688,54	27,35%	20,76%
Belanja Barang	4,546,25	517,04	11,37%	4,435,20	599,83	13,52%	16,01%
Belanja Modal	1,523,71	20,23	1,33%	2,033,78	167,70	8,25%	728,96%
Bantuan Sosial	47,12	12,54	28,74%	-	-	-	-
Transfer ke Daerah	20.604,83	5.480,64	26,60%	19.630,36	7.445,41	37,93%	35,85%
Dana Bagi Hasil	661,73	76,58	11,57%	724,81	369,26	50,95%	382,18%
Dana Alokasi Umum	14,074,85	3,942,02	28,01%	14,350,17	5,527,74	38,52%	40,23%
Dana Alokasi Khusus Fisik	475,89	-	-	91,93	-	-	-
Dana Alokasi Khusus Nonfisik	4,193,97	1,032,34	24,61%	4,115,15	1,409,43	34,25%	36,53%
Dana Desa	1,054,40	396,26	37,58%	348,30	138,98	39,90%	(64,93%)
Dana Insentif Fiskal	143,99	33,45	23,23%	-	-	-	-
SURPLUS/DEFISIT	(24.558,51)	(5.524,37)	22,49%	(22.627,51)	(8.325,03)	36,79%	50,70%
Penerimaan Pembiayaan	-	-	-	-	-	-	-
Pengeluaran Pembiayaan	-	-	-	-	-	-	-
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA)							

Sumber: OMSPAN, DJP, DJBC, diolah



Dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya, realisasi Pendapatan Negara sampai dengan 31 Maret 2026 mengalami kontraksi cukup signifikan sebesar 17,26% (yoy), turun dari Rp1,91 triliun pada 2025 menjadi Rp1,58 triliun. Penurunan ini terutama disebabkan oleh pendapatan perpajakan yang menurun signifikan sebesar 24,44% seiring dengan adanya permintaan masif atas pembayaran restitusi pajak pada awal tahun, terutama pada Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Sementara itu, PNBPN tumbuh positif lebih tinggi, yaitu sebesar 8,63%, yang disumbang oleh kenaikan Pendapatan Badan Layanan Umum sebesar 12,81%.

Di sisi lain, realisasi Belanja Negara mengalami pertumbuhan signifikan sebesar 30,68% (yoy), naik dari Rp7,43 triliun di tahun 2025 menjadi Rp9,90 triliun pada 2026. Peningkatan ini terjadi karena adanya kebijakan pemerintah pada tahun 2026. Beberapa kebijakan tersebut antara lain pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) yang dilakukan pada bulan Maret 2026 dan penyaluran dana tambahan TKD untuk penanganan bencana alam yang terjadi di Sumatera Barat pada akhir tahun 2025. Perubahan positif adalah capaian belanja modal pada triwulan I tahun 2026 ada peningkatan yang cukup besar yaitu mencapai 8,25%, dibandingkan dengan tahun 2025 yang hanya sebesar 1,33%. Belanja bantuan sosial pada tahun ini tidak ada alokasi karena perubahan mekanisme pembayaran. Pada tahun 2026 pembayaran bantuan

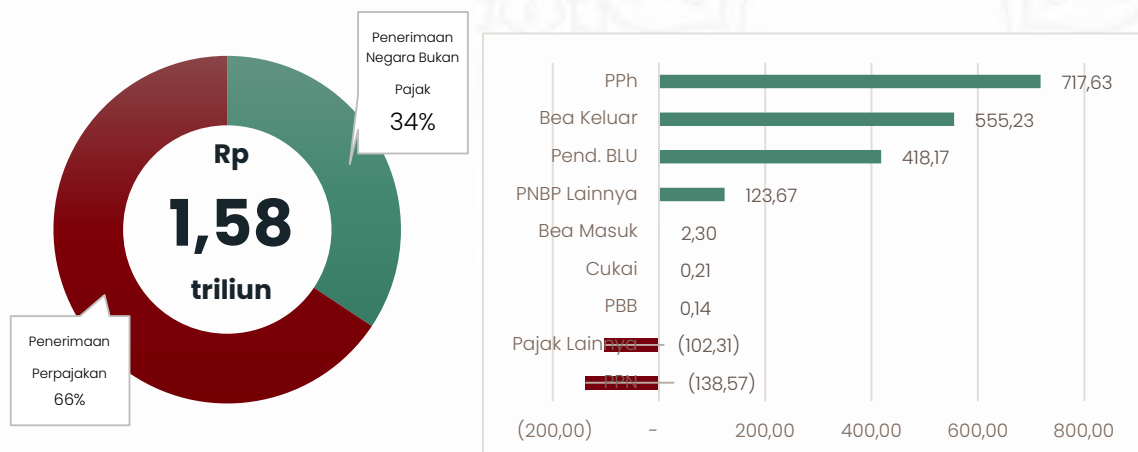
2.1.1. Pendapatan Negara

Pendapatan Negara di regional Sumatera Barat hingga akhir bulan Maret 2026 mencapai Rp1,58 triliun, didominasi oleh Penerimaan Perpajakan yang berkontribusi Rp1,03 triliun atau 65,63% dan sisanya berasal dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp541,84 miliar. Penerimaan Perpajakan didukung oleh Penerimaan Pajak Dalam Negeri yang memberikan kontribusi sebesar Rp477,10 miliar atau 46,11% dan Penerimaan Pajak Perdagangan Internasional dengan kontribusi senilai Rp557,52 miliar atau 53,89%. Penerimaan Pajak Dalam Negeri Sebagian besar berasal dari Pajak Penghasilan (PPH) sebesar Rp717,63 miliar. Sementara itu, Penerimaan Pajak Perdagangan Internasional sebagian besar berasal dari Bea Keluar senilai Rp555,23 miliar.

Pada periode ini Pendapatan Negara mengalami kontraksi yang cukup besar pada level 17,26% dibandingkan realisasi pada periode yang sama di tahun lalu. Penurunan realisasi ini diakibatkan dari adanya Penerimaan Perpajakan yang terkoreksi hingga mencapai 26,44%. Penerimaan pajak secara bruto masih ada pertumbuhan positif sebesar 9,30% dibandingkan dengan tahun 2025. Pertumbuhan bruto pajak pada triwulan I tahun 2026 menunjukkan adanya geliat ekonomi positif di Sumatera Barat. Penerimaan Pajak Perdagangan Internasional juga terkoreksi cukup signifikan sebesar 26,35% dibandingkan tahun sebelumnya. Penurunan kinerja pajak internasional didominasi oleh menurunnya harga CPO dan turunannya yang merupakan komoditas ekspor utama Sumatera Barat. Di sisi lain, PNBPN meningkat sebesar 8,63% yang disumbang oleh Pendapatan Badan Layanan Umum yang tumbuh sebesar 12,81%. BLU di Sumatera Barat terdapat 11 BLU dari rumpun pendidikan dan rumpun kesehatan. Secara umum pendapatan semua BLU meningkat dari tahun 2025 khususnya BLU di rumpun kesehatan.



Grafik II. 1 Realisasi dan Komposisi Pendapatan Negara Triwulan I Tahun 2026 (dalam miliar Rp)



Sumber: DJP, DJBC, diolah

a. Penerimaan Perpajakan

Penerimaan Perpajakan yang dipungut oleh Kementerian Keuangan di wilayah Provinsi Sumatera Barat sampai dengan 31 Maret 2026 tercatat sebesar Rp1,03 triliun atau 13,36% dari target yang ditetapkan dalam APBN 2026 sebesar Rp7,75 triliun. Kinerja penerimaan ini menunjukkan tren melambat dengan mencatatkan kontraksi signifikan sebesar 26,44% (yoy) jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2025 dengan realisasi Rp1,41 triliun. Secara komposisi, Penerimaan Perpajakan terbagi menjadi dua kelompok besar, yakni Pajak Dalam Negeri dan Pajak Perdagangan Internasional. Pajak Dalam Negeri hingga akhir triwulan I 2026 terealisasi sebesar Rp477,10 miliar atau 7,47% dari target tahun 2026 sebesar Rp6,04 triliun. Realisasi ini mengalami kontraksi yang signifikan sebesar 26,55% (yoy) dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang hanya mencapai Rp649,54 miliar.

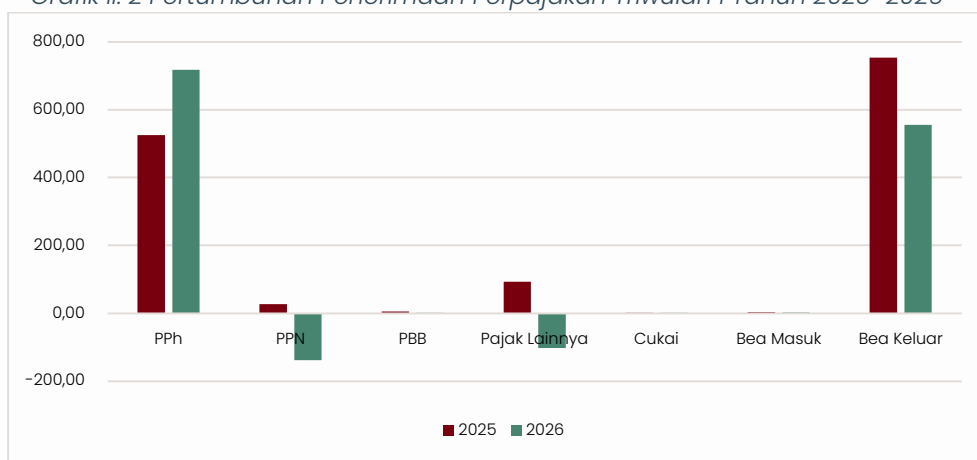
Penurunan kinerja pajak dalam negeri ini terutama dikarenakan adanya realisasi negatif dari penerimaan PPN yang turun sangat tajam hingga 623,30% dari Rp26,48 miliar pada kuartal pertama tahun lalu menjadi (Rp138,57) miliar pada periode yang sama tahun ini. Kondisi ini diperparah oleh turunnya penerimaan dari jenis pajak yang lainnya, kecuali penerimaan PPh yang tumbuh positif cukup signifikan. Penurunan secara umum pada pajak dalam negeri ini disebabkan oleh kebijakan pemusatan tempat terutang PPN (sentralisasi) di mana pendapatan pajak dari orang/badan yang masuk WP Pusat kini tercatat sebagai penerimaan pusat. Hal lain yang menjadi catatan adalah adanya restitusi pajak yang cukup besar sehingga menjadikan pertumbuhan pajak neto menjadi negatif.

Sejalan dengan Pajak Dalam Negeri yang mengalami tekanan, Pajak Perdagangan Internasional juga menunjukkan kinerja yang menurun dibandingkan periode tahun lalu. Hingga akhir Maret 2026, tercatat realisasinya mencapai Rp557,52 miliar atau 41,13% dari target sebesar Rp1,36 triliun, atau turun cukup signifikan hingga 26,35% (yoy). Penurunan ini diakibatkan oleh Bea Keluar/Pungutan Ekspor yang merosot 26,33% dari Rp753,69 miliar pada kuartal pertama 2025 menjadi Rp555,23 miliar. Selain itu, Bea Masuk juga mengalami penurunan cukup signifikan sebesar 29,77% menjadi Rp2,30 miliar. Kinerja perdagangan luar negeri ini mengalami penurunan karena gejolak global yang cukup



berpengaruh pada permintaan luar negeri. Hal yang perlu perhatian khusus adalah rendahnya bea masuk mungkin saja akibat gejolak global atau kinerja domestik yang melemah.

Grafik II. 2 Pertumbuhan Penerimaan Perpajakan Triwulan I Tahun 2025–2026



Sumber: DJP dan DJBC, diolah

1) Pajak Dalam Negeri

Realisasi Pajak Dalam Negeri di regional Sumatera Barat hingga 31 Maret 2026 tercatat sebesar Rp477,10 miliar atau baru mencapai 7,47% dari target APBN sebesar Rp6,39 triliun. Kinerja ini menurun dibandingkan periode yang sama tahun 2025 yang mencapai Rp649,54 miliar, sehingga terjadi kontraksi 26,55% (yoy). Penurunan terutama dipicu oleh koreksi pada pos-pos pajak utama, yakni PPN yang merosot sangat tajam pada level 623,30% yoy dan Pajak Lainnya yang terkoreksi dramatis sebesar 210,52%. Meskipun demikian, penerimaan PPh masih berada pada level yang aman dan tumbuh positif dengan signifikan pada level 36,61% dibandingkan periode tahun sebelumnya.

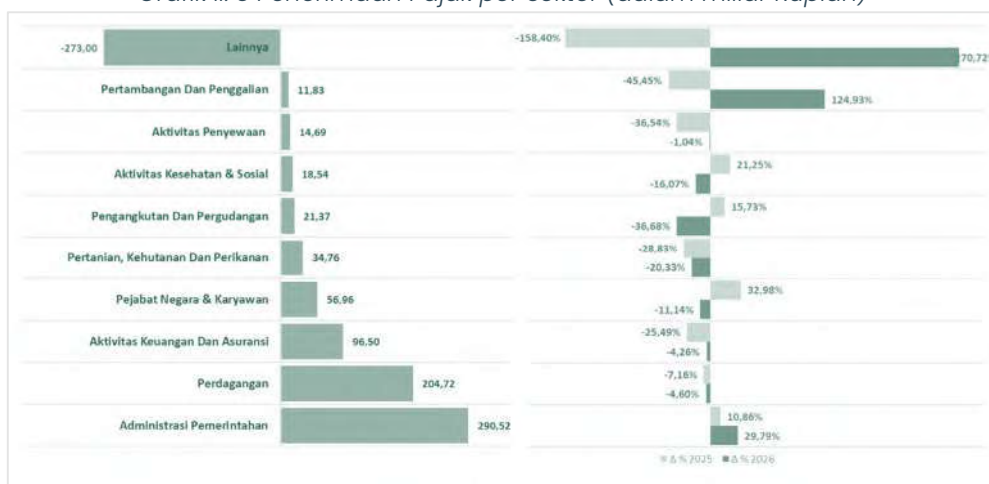
Berdasarkan komponen penyusunnya, PPh masih menjadi kontributor terbesar dengan realisasi Rp717,63 miliar atau 17,91% dari target Rp4,01 triliun miliar. Capaian ini lebih tinggi dibandingkan 2025 yang hanya terealisasi sebesar Rp525,33 miliar, sehingga tumbuh 36,61% (yoy). Sementara itu, komponen lainnya nilainya di bawah Rp1 miliar, bahkan bernilai negatif. Penerimaan PBB dan Cukai hanya terealisasi cukup kecil, masing-masing sebesar Rp0,14 miliar dan Rp0,21 miliar. Kedua jenis pajak tersebut merosot cukup tajam dibandingkan tahun sebelumnya. Selain itu, penerimaan PPN dan Pajak Lainnya mempunyai angka neto yang negatif, masing-masing sebesar (Rp138,57 miliar) dan (Rp102,31 miliar).

Dengan demikian, kontraksi Pajak Dalam Negeri hingga triwulan I 2026 terutama bersumber dari turunnya penerimaan PPN dan Pajak Lainnya. Penurunan kinerja ini didorong oleh banyaknya wajib pajak yang meminta pengembalian pajak atau restitusi pajak yang telah mereka setor pada periode sebelumnya. Besaran restitusi pajak ini melampaui nilai penerimaan PPN pada periode ini, sehingga secara neto berdampak pada realisasi negatif. Selain itu, Pajak Lainnya juga bernilai neto negatif karena adanya pemindahbukuan akun deposit pajak di sistem *Coretax* ke kewajiban pajak yang sebenarnya. Pajak ini bersaldo neto negatif akibat nilai pemindahbukuan akun deposit lebih besar dibandingkan nilai setoran pajak pada tahun 2026. Meskipun demikian, masih terdapat harapan bagi penerimaan Pajak Dalam Negeri yang berasal dari PPh



yang masih tumbuh positif. Hal ini mengindikasikan bahwa masih ada harapan dari pemulihan dan pertumbuhan ekonomi domestik yang terjaga, sehingga mendorong laba perusahaan membaik. Selain itu, faktor musiman juga turut menjadi andil kenaikan penerimaan PPh ini, mengingat pada kuartal pertama ini terdapat momen pembayaran THR, sehingga meningkatkan penghasilan pegawai.

Grafik II. 3 Penerimaan Pajak per Sektor (dalam miliar Rupiah)



Sumber: Kanwil DJP Sumbar dan Jambi, diolah

Sektor Administrasi Pemerintahan menjadi sektor penyumbang penerimaan terbesar di Sumatera Barat dengan total penerimaan sebesar Rp290,52 miliar. Sektor ini tumbuh positif sebesar 29,79% dibandingkan dengan tahun lalu periode yang sama. Sektor Perdagangan Besar dan Eceran menjadi penyumbang terbesar kedua dengan kontribusi senilai Rp204,72 miliar dan tumbuh negatif sebesar 4,60%. Sementara itu, sektor Lainnya tercatat memberikan pertumbuhan terbesar pada periode ini, yaitu sebesar 270,72%. Namun, sektor ini mempunyai nilai penerimaan neto negatif sebesar (Rp273 miliar). Selanjutnya, sektor Pertambangan dan Penggalian menjadi sektor dengan pertumbuhan positif terbesar kedua pada level 124,93% dan memberikan kontribusi positif terhadap Penerimaan Perpajakan Dalam Negeri sebesar Rp11,83 miliar.

2) Pajak Perdagangan Internasional

Realisasi Pajak Perdagangan Internasional di regional Sumatera Barat sampai dengan akhir Maret 2026 tercatat sebesar Rp557,52 miliar, atau 41,13% dari target APBN 2026 sebesar Rp1,36 triliun. Dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2025, penerimaan ini terkoreksi cukup signifikan sebesar 26,35% (yoy) dari capaian tahun sebelumnya sebesar Rp756,96 miliar. Penurunan ini terutama bersumber dari berkurangnya realisasi penerimaan Bea Keluar/Pungutan Ekspor yang hanya terkumpul sebesar Rp555,23 miliar atau 41,35% dari target APBN sebesar Rp1,34 triliun. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2025, Bea Keluar mengalami pertumbuhan negatif sebesar 26,33% (yoy).

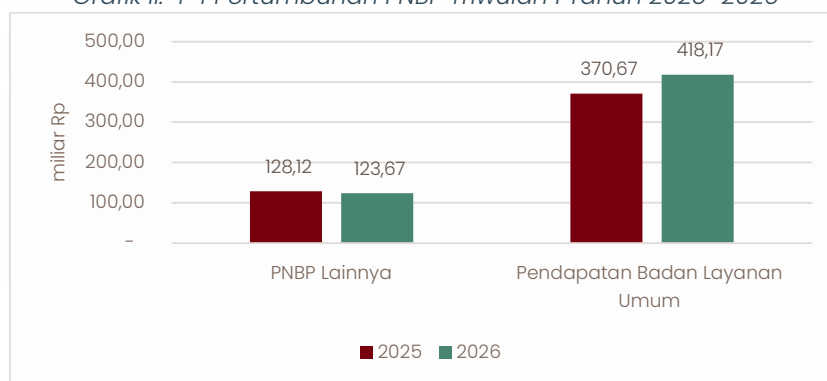
Penerimaan Pajak Perdagangan Internasional di Sumatera Barat diadministrasikan oleh KPPBC Teluk Bayur. Penurunan penerimaan ini sejalan dengan menurunnya volume ekspor komoditas khususnya produk sawit di pasar internasional.



Selain itu, harga komoditas produk sawit di pasar global pada periode ini tidak stabil dan terjadi fluktuasi permintaan komoditas yang mempengaruhi nilai ekspor.

b. Pendapatan PNBP

Grafik II. 4 4 Pertumbuhan PNBP Triwulan I Tahun 2025–2026



Sumber: OMSPAN, diolah

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) merupakan salah satu instrumen penting dalam mendukung kemampuan pemerintah untuk menyediakan pelayanan publik yang berkualitas, terutama pada sektor-sektor strategis seperti pendidikan dan kesehatan. Keberadaan PNBP menjadi pelengkap penerimaan pajak, sekaligus berfungsi sebagai sumber pendapatan negara yang memberikan ruang fiskal tambahan bagi pembiayaan program prioritas pemerintah. Realisasi PNBP di regional Sumatera Barat hingga 31 Maret 2025 tercatat sebesar Rp541,84 miliar atau 28,53% dari target APBN 2026 yang ditetapkan sebesar Rp1,90 triliun. Capaian ini menunjukkan pertumbuhan sebesar 8,63% (yoy) dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2025 yang terealisasi sebesar Rp498,79 miliar. Kinerja positif ini mengindikasikan bahwa kontribusi PNBP terhadap pendapatan negara di daerah terus mengalami penguatan dari tahun ke tahun.

Dari sisi struktur penerimaan, Pendapatan Badan Layanan Umum (BLU) menjadi kontributor terbesar dan menyumbang 77,18% dari total PNBP. Realisasi Pendapatan BLU sampai dengan akhir kuartal pertama 2026 mencapai Rp418,17 miliar atau 25,33% dari target tahun 2026, dan meningkat sebesar 12,81% (yoy) dibandingkan realisasi pada periode yang sama tahun sebelumnya yang tercatat Rp307,67 miliar. Peningkatan Pendapatan BLU ini didorong oleh dua sumber utama, yakni:

- 1) Jasa pelayanan rumah sakit, terealisasi sebesar Rp289,98 miliar, tumbuh sebesar 16,69% dibandingkan tahun sebelumnya.
- 2) Pendapatan tertinggi diterima oleh satker BLU pada Kementerian Kesehatan dengan total Rp290,21 miliar, diikuti oleh pendapatan BLU dari Kementerian Agama sebesar Rp82,74 miliar yang bergerak di bidang Pendidikan.

Selain BLU, kelompok penerimaan PNBP lainnya mencakup pendapatan dari pemanfaatan sumber daya alam, jasa giro, denda, dan penerimaan lain-lain. Meskipun kontribusinya tidak sebesar BLU, kelompok penerimaan ini tetap berperan dalam menopang kinerja keseluruhan PNBP di Sumatera Barat pada triwulan I 2026. Dengan persentase capaian 49,73% dari target tahunan hanya dalam tiga bulan pertama, tren PNBP Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2026 diharapkan menjadi indikasi positif terhadap

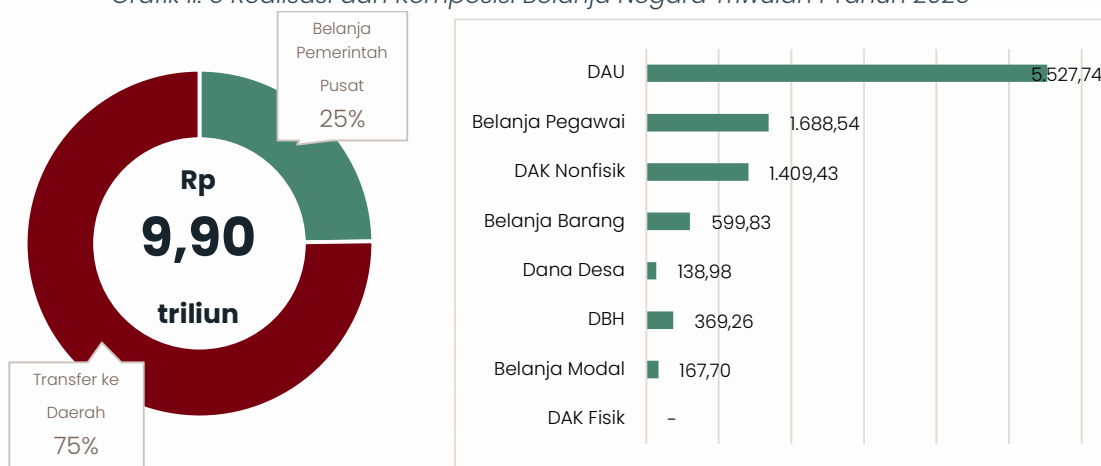


peluang pencapaian, bahkan potensi melampaui target tahunan jika tren pertumbuhan, terutama pada sektor BLU, dapat terus dipertahankan pada Triwulan selanjutnya sekaligus memperkuat peran PNPB sebagai salah satu tulang punggung pembiayaan layanan publik di luar penerimaan perpajakan.

2.1.2. Belanja Negara

Belanja Negara di Provinsi Sumatera Barat hingga akhir kuartal pertama 2026 terealisasi sebesar Rp9,90 triliun atau 30,68% dari pagu APBN 2026 yang ditetapkan sebesar Rp32,27 triliun. Capaian ini meningkat sebesar 33,27% (yoy) dibandingkan dengan realisasi pada periode yang sama tahun 2025 yang hanya mencapai Rp7,43 triliun.

Grafik II. 5 Realisasi dan Komposisi Belanja Negara Triwulan I Tahun 2025



Sumber: OMSPAN, SIKD, diolah

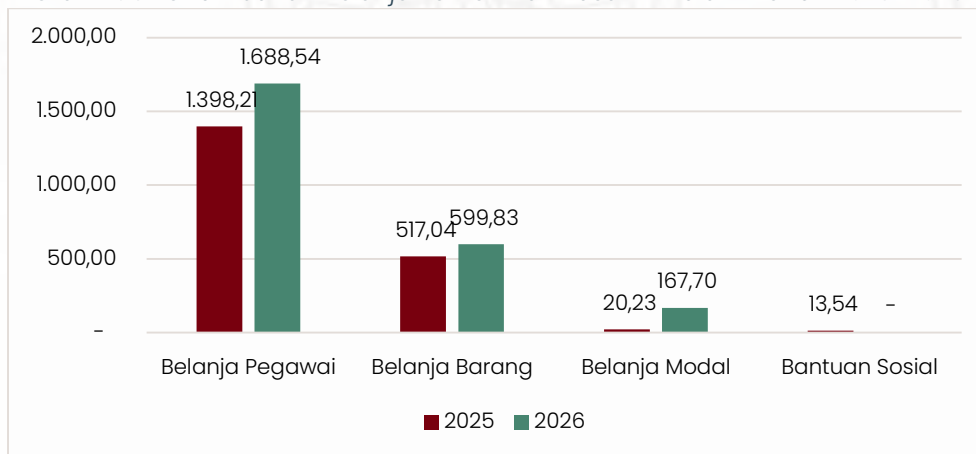
Belanja Negara terbagi menjadi dua komponen utama, yaitu Belanja Pemerintah Pusat dan Transfer ke Daerah (TKD), dengan komposisi masing-masing sebesar 25% dan 75% dari total realisasi Belanja Negara hingga 31 Maret 2025. Belanja Pemerintah Pusat dilaksanakan oleh satuan kerja Kementerian/Lembaga di wilayah Sumatera Barat, sedangkan TKD disalurkan kepada pemerintah daerah provinsi maupun kabupaten/kota di Sumatera Barat.

a. Belanja Pemerintah Pusat

Belanja Pemerintah Pusat terealisasi sebesar Rp2,46 triliun atau mencapai 19,43% dari pagu anggaran hingga 31 Maret 2026. Jumlah ini mengalami pertumbuhan sebesar 26,02% jika dibandingkan dengan tahun 2025. Peningkatan tersebut disebabkan oleh kenaikan seluruh komponen belanja, terutama Belanja Modal yang naik sangat tajam di atas 700%. Selain itu, terdapat kebijakan pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) di bulan Maret 2026 yang meningkatkan realisasi Belanja Pegawai. Di sisi lain, Belanja Bantuan Sosial tahun 2026 tidak mendapatkan alokasi anggaran, sehingga tidak terdapat realisasi belanja. Belanja Bantuan sosial tidak ada alokasi bukan berarti tidak ada bantuan sosial khususnya Kartu Indonesia Pintar (KIP), namun mekanisme berubah menjadi terpusat. Satker daerah dalam hal ini UIN Imam Bonjol hanya menyediakan data dan pembayaran dilakukan terpusat.



Grafik II. 6 Pertumbuhan Belanja Pemerintah Pusat Triwulan I Tahun 2025–2026



Sumber: OMSPAN, diolah

Belanja Pegawai terealisasi sebesar Rp1,40 triliun atau 23,72% dari pagu dan mengalami kenaikan cukup signifikan sebesar 27,35% dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan realisasi ini dipengaruhi oleh perubahan kebijakan pemerintah, termasuk kebijakan dalam memberikan THR pada menjelang Hari Raya Idul Fitri 1447 H di bulan Maret 2026. Komponen Belanja Pegawai terbesar adalah Belanja Gaji dan Tunjangan PNS yang terealisasi Rp680,29 miliar atau 24,65% dari pagu, diikuti oleh Belanja Gaji dan Tunjangan TNI/Polri sebesar Rp364,45 miliar (30,55%) dan Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK senilai Rp179,70 miliar atau 29,20% dari total pagu. Seluruh komponen belanja ini mengalami peningkatan dibandingkan periode sebelumnya, kecuali Belanja Honorarium yang tidak dialokasikan pada tahun 2026. Selain adanya Hari Raya Idulfitri, peningkatan gaji pegawai juga didorong oleh kenaikan tunjangan untuk kementerian tertentu seperti Mahkamah Agung dan tambahan pegawai ASN seperti di kepolisian.

Belanja Barang terealisasi sebesar Rp599,83 miliar atau 13,52% dari pagu, naik sebesar 16,01% dibandingkan Maret 2025. Pertumbuhan ini disebabkan oleh naiknya beberapa komponen Beban Barang yang sangat signifikan hingga sangat tajam, yaitu Belanja Barang untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda yang meningkat sangat tajam hingga 3.984%, diikuti oleh Belanja Jasa dan Beban Barang BLU yang naik signifikan pada level 32,20% dan 29,21%. Sementara itu, beberapa komponen mengalami penurunan, yaitu Belanja Barang Operasional, Belanja Barang Persediaan, dan Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri yang turun antara 5% hingga 10% dibandingkan tahun sebelumnya. Penurunan belanja ini kemungkinan akan terus terjadi seiring dengan adanya penajaman belanja di awal triwulan II tahun 2026.

Sejalan dengan realisasi Belanja Pegawai dan Belanja Barang, Belanja Modal juga mengalami realisasi pertumbuhan yang signifikan sebesar 42,87% dengan nominal Rp767,61 miliar atau 11,85% dari pagu. Peningkatan ini terjadi pada seluruh komponen Belanja Modal, terutama Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan yang naik tajam 7.388,52% (yoy), Belanja Modal Fisik Lainnya yang tumbuh 456,64% (yoy), dan Belanja Modal Peralatan dan Mesin meningkat 102,26%.

Peningkatan belanja yang disalurkan melalui KPPN di wilayah regional Sumatera Barat ini menunjukkan terdapat percepatan realisasi belanja. Selain merespons kebijakan pembayaran THR yang diberikan untuk persiapan momentum Ramadhan dan Idul Fitri,



kenaikan realisasi belanja juga didorong oleh percepatan belanja modal untuk proyek infrastruktur, yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan publik dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Selain itu, didukung dengan tingginya kebutuhan pemulihan pasca-bencana. Kebutuhan akan percepatan pemulihan ekonomi dan infrastruktur pasca bencana di Sumatera Barat turut memicu pemerintah pusat untuk meningkatkan alokasi belanja di wilayah ini. Percepatan belanja modal dan barang ini juga hasil dari sosialisasi/asistensi Kanwil DJPb dan KPPN wilayah Sumatera Barat untuk mendorong satker-satker melakukan percepatan belanja khususnya belanja modal.

1) Belanja Berdasarkan Kementerian Negara/Lembaga (K/L)

Belanja K/L selain ditujukan untuk mendukung keberlanjutan dan akselerasi transformasi ekonomi, juga dimanfaatkan untuk mendukung: (1) pemenuhan kebutuhan minimum pelayanan pemerintahan termasuk tunjangan hari raya (THR) dan gaji ke-13; (2) pendanaan proyek tahun jamak (*multi year*); (3) modernisasi Alutsista; dan (4) kelanjutan reformasi birokrasi dan reformasi penganggaran dengan melanjutkan dan mempertajam kebijakan konsolidasi dan pendisiplinan fiskal. Adapun 10 Kementerian Negara/Lembaga yang memiliki pagu terbesar di lingkup wilayah Provinsi Sumatera Barat berdasarkan data pada aplikasi Sintesa per tanggal 31 Maret 2026 sebagai berikut:

Tabel II. 2 Sepuluh Bagian Anggaran dengan Pagu Belanja Tertinggi

No	Nama BA	2025	2026
1	Kementerian Agama	2.242.911.888.000	2.683.073.369.000
2	Kementerian Pekerjaan Umum	1.301.751.443.000	1.751.741.121.000
3	Kementerian Kesehatan	1.139.442.786.000	1.459.428.151.000
4	Kepolisian Negara Republik Indonesia	1.429.067.068.000	1.419.485.895.000
5	Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, Dan Teknologi	1.002.994.556.000	1.113.744.839.000
6	Kementerian Perhubungan	449.667.588.000	690.867.775.000
7	Kementerian Pertahanan	611.718.182.000	687.523.484.000
8	Kementerian Pertanian	126.486.800.000	410.985.989.000
9	Kementerian Imigrasi Dan Pemasaryakatan	197.909.147.000	331.773.806.000
10	Mahkamah Agung	228.855.945.000	296.473.655.000

Sumber: Sintesa, diolah

Anggaran Pagu DIPA TA 2026 terbesar dialokasikan untuk sektor pelayanan publik, infrastruktur, dan keamanan. Kementerian Agama memimpin dengan DIPA senilai Rp2,68 triliun, fokus pada peningkatan mutu pendidikan madrasah, layanan keagamaan, dan dukungan manajemen serta tugas teknis lainnya. Pagu terbesar kedua dikelola oleh Kementerian Pekerjaan Umum sebesar Rp1,75 triliun yang memprioritaskan percepatan proyek strategis, pembangunan konektivitas jalan nasional, dan penyediaan prasarana dasar seperti sanitasi dan air minum. Alokasi pagu untuk Kementerian Pekerjaan Umum akan terus bertambah karena adanya kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi akibat bencana hidrometeorologi pada akhir tahun 2025. Sebagian kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi telah dilaksanakan dalam rangka penanganan bencana, namun alokasi dana masih dalam proses pembahasan. Selanjutnya, sektor kesehatan mendapat alokasi terbesar urutan ketiga yang diberikan



untuk Kementerian Kesehatan dengan nilai Rp1,46 triliun yang mengutamakan akses universal melalui JKN, pencegahan penyakit, kekarantinaaan, dan pembinaan dan pengelolaan perguruan tinggi. Alokasi pagu untuk kementerian kesehatan bersumber dari dana BLU sekitar Rp1,15 triliun, diikuti rupiah murni sebesar Rp0,297 triliun dan sisanya dari penerimaan PNBPN. Pagu kementerian kesehatan masih terdapat blokir anggaran sekitar Rp 300 miliar.

Di sisi lain Kepolisian Republik Indonesia memperoleh alokasi dana yang lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu sebesar Rp1,42 triliun, berfokus pada menjaga stabilitas Kamtibmas, mengoptimalkan pelayanan publik, dan penegakan hukum yang transparan. Realisasi sampai dengan triwulan I 2026 yang kurang baik adalah belanja modal yang hanya 1.72% dari pagu. Salah satu sumber masalahnya adalah administrasi dana SBSN yang belum selesai. Urutan kelima K/L yang memperoleh pagu terbesar adalah Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi dengan total Rp1,11 triliun, diarahkan untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi serta mendorong penelitian dan inovasi. Sebagian satker di kementerian ini adalah BLU, namun realisasi untuk sumber dana BLU masih kecil, dan didominasi oleh rupiah murni. Anggaran DIPA menengah dimiliki oleh Kementerian Perhubungan untuk penyelesaian proyek infrastruktur strategis dan Kementerian Pertahanan untuk modernisasi Alutsista dan profesionalisme prajurit, dengan pagu masing-masing sebesar Rp690,87 miliar dan Rp687,52 miliar.

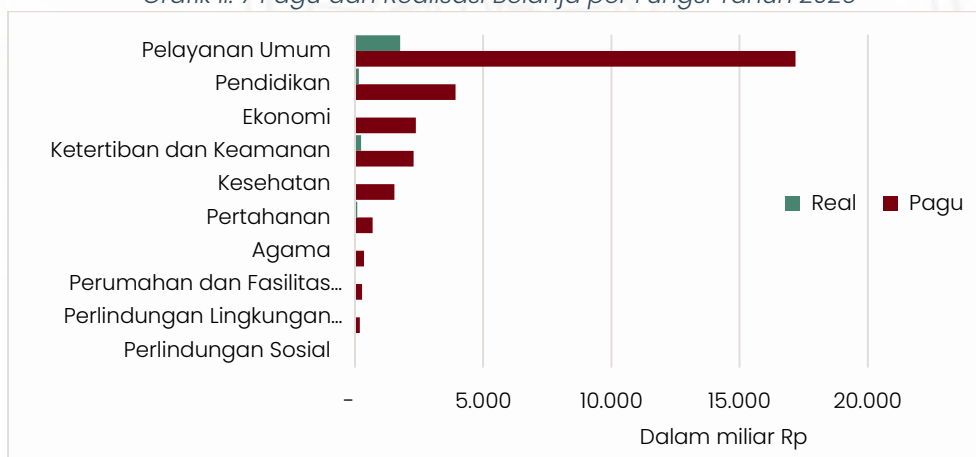
Selanjutnya, K/L dengan Pagu DIPA terbesar urutan terakhir dialokasikan untuk Kementerian Pertanian yang ditujukan untuk penguatan ketahanan pangan dan peningkatan produktivitas pertanian, Kementerian Imigrasi Dan Pemasaryakatan yang berfokus pada pelayanan imigrasi dan pembinaan pamasaryakatan, serta Mahkamah Agung yang berfokus pada penguatan penegakan dan pelayanan hukum yang berkeadilan. Alokasi pagu belanja ketiga K/L tersebut masing-masing sebesar Rp410,99 miliar, Rp331,77 miliar, dan Rp296,47 miliar. Secara umum, sebagian besar K/L juga memiliki Program Dukungan Manajemen untuk memastikan tata kelola internal yang efektif. Selain dari Rupiah murni, ketiga kementerian tersebut juga didanai oleh sumber dana PNBPN, namun sampai dengan triwulan I tahun 2026 masih belum signifikan realisasinya.

2) Belanja Berdasarkan Fungsi

Belanja negara dibagi menjadi 11 fungsi, yaitu fungsi pelayanan umum, fungsi pertahanan, fungsi ketertiban dan keamanan, fungsi ekonomi, fungsi lingkungan hidup, fungsi perumahan dan fasilitas umum, fungsi kesehatan, fungsi pariwisata dan budaya, fungsi agama, fungsi pendidikan, dan fungsi perlindungan sosial. Pembagian APBN berdasarkan fungsi ini dapat memperlihatkan peran APBN dalam melakukan alokasi sumber-sumber daya bagi perekonomian negara. Fungsi-fungsi ini merupakan penjabaran dari tugas negara sebagaimana tercantum dalam alinea IV pembukaan Undang-undang dasar 1945.



Grafik II. 7 Pagu dan Realisasi Belanja per Fungsi Tahun 2026



Sumber: Sintesa, diolah

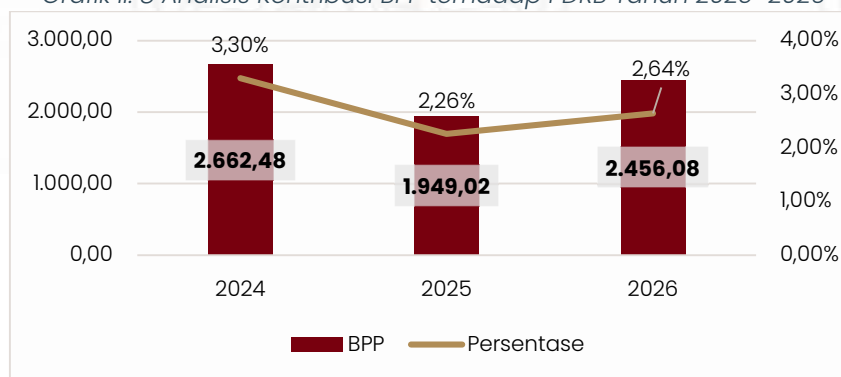
Berdasarkan grafik di atas, pagu belanja pemerintah pusat dialokasikan paling besar pada fungsi Pelayanan Umum dengan total pagu Rp17,19 triliun, diikuti fungsi Pendidikan dan fungsi Ekonomi dengan pagu masing-masing sebesar Rp3,92 triliun dan Rp2,37 triliun. Fungsi Pelayanan Umum mendapat alokasi terbesar dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik, meningkatkan kapasitas birokrasi, meningkatkan keterbukaan informasi dan komunikasi publik, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Alokasi belanja untuk Pemda berupa TKD masuk dalam kategori fungsi ini. Fungsi yang memiliki pagu terkecil adalah fungsi Perlindungan sosial sebesar Rp 17,83 miliar.

3) Analisis Kontribusi Belanja Pemerintah Pusat terhadap Perekonomian

Belanja Pemerintah Pusat (BPP) memiliki peran strategis sebagai salah satu penggerak utama perekonomian daerah melalui peningkatan konsumsi, penciptaan lapangan kerja, serta dukungan terhadap berbagai aktivitas pembangunan. Dalam struktur perekonomian daerah, belanja pemerintah berfungsi sebagai stimulus fiskal yang mampu menjaga stabilitas ekonomi, terutama pada saat aktivitas sektor swasta mengalami perlambatan atau ketidakpastian ekonomi meningkat. Melalui pelaksanaan berbagai program dan kegiatan pemerintah, BPP tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi secara langsung, tetapi juga menciptakan efek pengganda (*multiplier effect*) yang berdampak pada meningkatnya pendapatan masyarakat, aktivitas usaha, dan daya beli.

Belanja pemerintah pusat dialokasikan dalam berbagai bentuk, seperti belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, bantuan sosial, subsidi, serta program pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik. Belanja tersebut berkontribusi terhadap peningkatan permintaan agregat dan menjadi sumber perputaran ekonomi di daerah. Realisasi belanja pegawai, misalnya, dapat meningkatkan konsumsi rumah tangga melalui peningkatan pendapatan aparatur negara, sedangkan belanja modal dan pembangunan infrastruktur mampu mendorong investasi, memperlancar konektivitas, dan meningkatkan produktivitas sektor ekonomi. Di sisi lain, penyaluran bantuan sosial dan program perlindungan masyarakat juga berperan penting dalam menjaga daya beli masyarakat berpendapatan rendah.



Grafik II. 8 Analisis Kontribusi BPP terhadap PDRB Tahun 2025–2026

Sumber: BPS dan Sintesa, diolah

Peran strategis BPP terhadap perekonomian daerah tercermin dari kontribusinya terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Semakin besar kontribusi belanja pemerintah terhadap PDRB, maka semakin besar pula pengaruh fiskal pemerintah dalam menggerakkan aktivitas ekonomi daerah. Oleh karena itu, efektivitas dan percepatan realisasi belanja pemerintah menjadi faktor penting dalam menjaga momentum pertumbuhan ekonomi, khususnya pada awal tahun anggaran ketika aktivitas ekonomi biasanya masih mengalami penyesuaian. Selain dari sisi nominal, kualitas belanja juga menjadi perhatian utama agar setiap rupiah belanja pemerintah dapat memberikan manfaat optimal bagi pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, pengurangan kemiskinan, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan

Berdasarkan data triwulan I Provinsi Sumatera Barat, realisasi Belanja Pemerintah Pusat pada tahun 2026 tercatat sebesar Rp2.456,08 miliar, meningkat dibandingkan periode yang sama tahun 2025 sebesar Rp1.949,02 miliar. Sejalan dengan peningkatan tersebut, nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku juga meningkat dari Rp86.250,00 miliar pada tahun 2025 menjadi Rp92.960,00 miliar pada tahun 2026. Dengan demikian, kontribusi BPP terhadap PDRB Sumatera Barat pada Triwulan I 2026 tercatat sebesar 2,64 persen, lebih tinggi dibandingkan Triwulan I 2025 yang sebesar 2,26 persen.

Meskipun demikian, kontribusi tersebut masih berada di bawah capaian triwulan I 2024 yang mencapai 3,30 persen. Kondisi ini menunjukkan bahwa peran belanja pemerintah pusat dalam menopang aktivitas ekonomi daerah mulai mengalami perbaikan dibandingkan tahun sebelumnya, namun belum kembali pada tingkat kontribusi sebelum terjadinya perlambatan realisasi belanja pada tahun 2025.

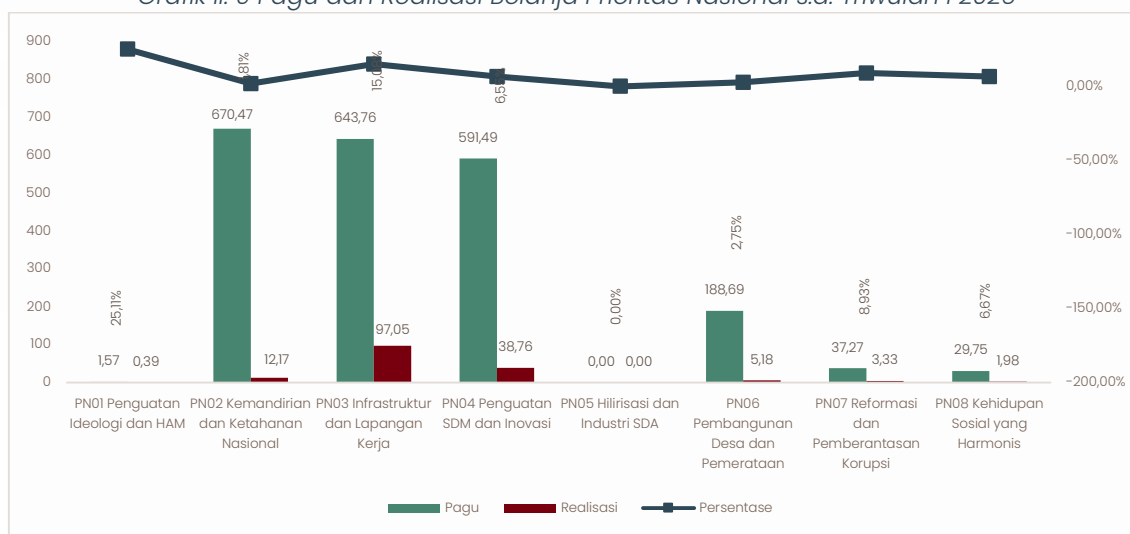
4) Analisis Kontribusi Belanja Pemerintah Pusat terhadap Perekonomian

Terdapat 8 Program Prioritas Nasional (PN) yang menjadi fokus pelaksanaan belanja negara di Provinsi Sumatera Barat sampai dengan Triwulan I Tahun 2026. Program-program tersebut diarahkan untuk mendukung agenda pembangunan nasional melalui penguatan kualitas sumber daya manusia, pembangunan infrastruktur, pengurangan kesenjangan wilayah, peningkatan daya saing ekonomi, serta penguatan tata kelola pemerintahan. Realisasi belanja pada masing-masing PN



mencerminkan tingkat pelaksanaan program pemerintah pusat di daerah sekaligus menunjukkan prioritas kebijakan fiskal yang sedang didorong pada awal tahun anggaran.

Grafik II. 9 Pagu dan Realisasi Belanja Prioritas Nasional s.d. Triwulan I 2026



Sumber: Sintesa, diolah

Berdasarkan data realisasi hingga Triwulan I 2026, PN02 Kemandirian dan Ketahanan Nasional mencatatkan realisasi belanja terbesar, yaitu sebesar Rp12,17 miliar atau 1,81 persen dari total pagu sebesar Rp670,47 miliar. Tingginya realisasi pada PN02 menunjukkan adanya fokus pemerintah dalam mendukung stabilitas nasional, penguatan ketahanan pangan, energi, serta sektor-sektor strategis lainnya yang memiliki dampak langsung terhadap stabilitas ekonomi dan sosial masyarakat. Selain itu, PN03 Infrastruktur dan Lapangan Kerja juga mencatatkan realisasi yang cukup signifikan sebesar Rp97,05 miliar atau 15,08 persen dari pagu Rp643,76 miliar, yang mengindikasikan mulai berjalannya program pembangunan infrastruktur dan dukungan terhadap penciptaan lapangan kerja di daerah.

Di sisi lain, beberapa program prioritas masih menunjukkan tingkat realisasi yang relatif rendah pada awal tahun anggaran. PN06 Pembangunan Desa dan Pemerataan, misalnya, baru terealisasi sebesar Rp5,18 miliar atau 2,75 persen dari pagu Rp188,69 miliar. Sementara itu, PN05 Hilirisasi dan Industri SDA belum mencatatkan realisasi belanja hingga Triwulan I 2026. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sebagian program masih berada pada tahap persiapan pelaksanaan, proses pengadaan, maupun penyesuaian administrasi anggaran sehingga realisasi belanja belum optimal pada awal tahun.

Program lainnya seperti PN04 Penguatan SDM dan Inovasi terealisasi sebesar Rp38,76 miliar atau 6,55 persen dari pagu, sedangkan PN07 Reformasi dan Pemberantasan Korupsi mencapai Rp3,33 miliar atau 8,93 persen dari pagu. Adapun PN01 Penguatan Ideologi dan HAM serta PN08 Kehidupan Sosial yang Harmonis masing-masing terealisasi sebesar Rp0,39 miliar dan Rp1,98 miliar. Meskipun nominal realisasi pada beberapa program masih relatif terbatas, pelaksanaan berbagai Prioritas Nasional tersebut tetap menjadi instrumen penting dalam mendukung pertumbuhan



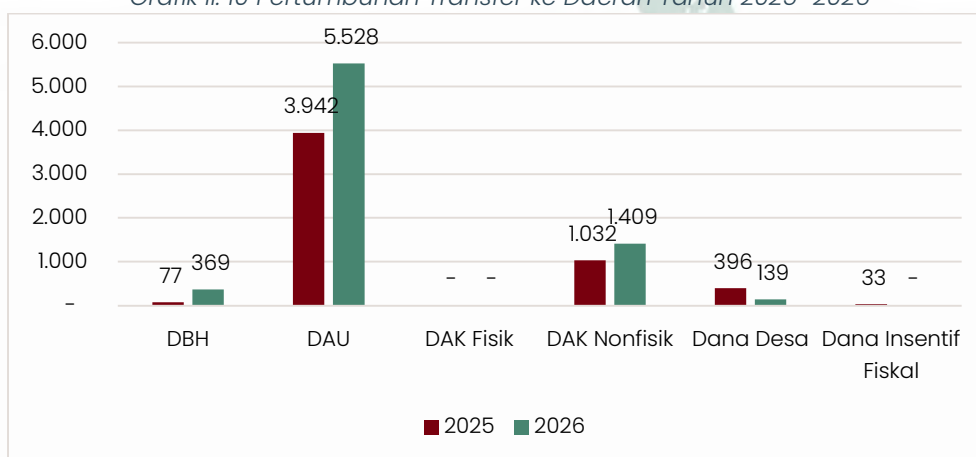
ekonomi, pemerataan pembangunan, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta penguatan kesejahteraan masyarakat di Sumatera Barat.

b. Belanja Transfer ke Daerah (TKD)

Realisasi TKD hingga triwulan I 2026 di Provinsi Sumatera Barat mencapai Rp7,45 triliun atau 37,93% dari alokasi pagu tahun 2026 sebesar Rp19,63 triliun. Capaian ini sebagian besar berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU) yang telah tersalur senilai Rp5,53 triliun atau 38,52% dari total pagu, diikuti oleh Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil (DBH) masing-masing senilai Rp1,41 triliun (33,50% pagu) dan Rp369,26 miliar (50,95% dari pagu). Sementara itu, Dana Desa terealisasi Rp138,98 miliar atau 39,90% dari pagu, turun signifikan sebesar 64,93% (yoy) dibandingkan tahun sebelumnya.

Apabila dibandingkan dengan realisasi kuartal pertama tahun lalu, realisasi TKD ini tumbuh signifikan sebesar 35,85% dibandingkan Triwulan I-2025. Peningkatan tersebut dipengaruhi oleh seluruh realisasi dana selain Dana Desa. DBH mencatatkan pertumbuhan tertinggi sebesar 382,18%, diikuti oleh DAU sebesar 40,23%. Berbeda dengan kedua jenis TKD tersebut, Dana Desa terealisasi lebih kecil dan turun sangat signifikan sebesar 64,90%. Sementara itu, DAK Fisik masih belum ada realisasi dan Dana Insentif Daerah tahun 2026 tidak ada alokasi dananya.

Grafik II. 10 Pertumbuhan Transfer ke Daerah Tahun 2025–2026



Sumber: Sintesa, diolah

DAU yang telah disalurkan senilai Rp5,53 triliun atau 38,52% dari pagu terdiri dari DAU *Block Grant* sebesar Rp3,92 triliun atau 33,33% pagu, DAU *Specific Grant* senilai Rp71,91 miliar atau 18,25% dari pagu, dan DAU *Block Grant* Tambahan Penanganan Bencana sebesar Rp1,53 triliun atau 70% pagu. Realisasi DAU terbesar terdapat di Provinsi Sumatera Barat dan Kota Padang masing-masing sebesar Rp849,50 miliar atau 15,37% dari total realisasi dan Rp572,82 miliar atau menyumbangkan porsi realisasi DAU di regional Sumatera Barat sebesar 10,36%. Sementara itu, realisasi terendah berasal dari Pemerintah Kota Sawahlunto dan Kota Padang Panjang masing-masing sebesar Rp148,41 miliar dan Rp155,73 miliar atau 2,68% dan 2,82% dari total realisasi DAU.



Tabel II. 3 Realisasi Transfer ke Daerah Triwulan I 2026 (dalam miliar Rp)

Nama Pemda	DAU	DBH	DAK Fisik	DAK Nonfisik	Dana Desa	Total
Prov. Sumbar	849,50	89,79	-	352,39	-	1.291,69
Kab. Agam	354,92	8,92	-	90,85	16,51	471,20
Kab. Pasaman	224,62	8,41	-	64,62	9,91	307,57
Kab. Limapuluh Kota	289,73	22,15	-	76,46	-	388,34
Kab. Solok	297,92	8,70	-	79,26	11,94	397,82
Kab. Padang Pariaman	278,52	7,37	-	81,70	15,76	383,36
Kab. Pesisir Selatan	327,83	13,62	-	101,09	29,48	472,01
Kab. Tanah Datar	300,84	8,26	-	61,59	3,85	374,55
Kab. Kep. Mentawai	206,74	8,65	-	38,63	1,58	255,61
Kab. Dharmasraya	167,87	23,28	-	49,80	9,48	250,44
Kab. Solok Selatan	161,96	29,26	-	35,12	6,81	233,15
Kab. Pasaman Barat	262,79	14,37	-	77,38	13,60	368,13
Kab. Sijunjung	194,41	22,08	-	52,35	8,66	277,50
Kota Bukittinggi	184,60	9,49	-	23,99	-	218,08
Kota Padang Panjang	155,73	5,72	-	13,17	-	174,62
Kota Solok	181,23	6,49	-	17,86	-	205,59
Kota Sawahlunto	148,41	23,29	-	14,92	3,79	190,41
Kota Padang	572,82	47,18	-	126,61	-	746,61
Kota Payakumbuh	195,06	6,79	-	28,94	-	230,78
Kota Pariaman	172,26	5,43	-	22,67	7,60	207,95
TOTAL	5.527,74	369,26	-	1.409,42	138,98	7.445,40

Sumber: OMSPAN TKD, diolah

Dana Bagi Hasil yang telah disalurkan hingga triwulan I 2026 mencapai Rp369,29 miliar (48,61% dari pagu), yang berasal dari DBH Reguler dan DBH Tambahan Penanggulangan Bencana masing-masing sebesar Rp36,91 miliar dan Rp332,35 miliar. DBH terbesar yang disalurkan adalah DBH PPh Pasal 21 dan DBH SDA Minerba-Royalti dengan realisasi masing-masing sebesar Rp156,43 miliar dan Rp54,21 miliar, sedangkan DBH terkecil disalurkan kepada DBH PBB Perhutanan Bagian Daerah – Provinsi sebesar Rp202,30 juta. Berdasarkan daerah penerima, DBH terbesar disalurkan untuk Pemerintah Provinsi Sumatera Barat senilai Rp89,79 miliar dan Kota Padang sebesar Rp47,18 miliar, sedangkan Kota Pariaman menerima penyaluran terkecil, yaitu senilai Rp5,43 miliar.

Dana Alokasi Khusus (DAK) hingga akhir Maret 2026 tersalurkan sebesar Rp1,41 triliun atau 33,50% pagu, yang berasal dari DAK Nonfisik, sementara DAK Fisik belum ada penyaluran. DAK Nonfisik terbesar berasal dari penyaluran Bantuan Operasional Kesehatan (BOK), Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP), dan Tunjangan Profesi Guru (TPG) masing-masing sebesar Rp824,17 miliar, Rp842,29 miliar, dan Rp627,08 miliar, sementara terkecil disalurkan untuk Tunjangan Khusus Dokter senilai Rp221,61 juta. Pemda penerima DAK terbesar adalah Provinsi Sumatera Barat dengan nilai realisasi sebesar Rp352,39 miliar dan terkecil disalurkan untuk Kota Padang Panjang senilai Rp13,17 miliar.

Dana Desa hingga triwulan I 2026 telah tersalurkan sebesar Rp138,38 miliar atau 39,90% dari pagu, turun 64,93% dibandingkan tahun lalu. Dana Desa Tahun 2026 terbagi menjadi Dana Desa Reguler dan Dana Desa Dukungan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Dana Desa Reguler telah disalurkan ke 1.009 desa atau nagari untuk Tahap I sebesar Rp168,56 miliar dan Tahap II sebesar Rp10,14 miliar kepada 76 nagari. Pagu Dana Desa yang dikelola



oleh KPPN setempat hanya berupa Dana Desa Reguler yang dialokasikan sebesar 42% dari total anggaran Dana Desa, sedangkan Dana Desa Dukungan KDMP disalurkan melalui KPPN Jakarta I yang dialokasikan sebesar 58%. Pagu dana yang tercatat di Kanwil DJPb Provinsi Sumatera Barat hanya berupa pagu Dana Desa Reguler.

2.2. Pelaksanaan APBD Tingkat Provinsi

Tabel II. 4 I-Account APBD Konsolidasi Sumatera Barat Triwulan I Tahun 2025 dan 2026 (Rp M)

I-Account APBD	TA 2025			TA 2026			Growth
	Pagu	Realisasi	% Real	Pagu	Realisasi	% Real	
PENDAPATAN DAERAH	27.868,78	6.655,94	23,88%	25.497,73	7.874,81	30,88%	18,31%
PAD	6.115,32	1.411,97	23,09%	7.169,00	1.300,36	18,14%	-7,90%
Pendapatan Transfer	20.847,54	5.233,29	25,10%	17.555,61	6.568,76	37,42%	25,52%
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	905,92	10,68	1,18%	773,12	5,70	0,74%	-46,66%
BELANJA DAERAH	28.617,42	4.534,29	15,84%	26.530,49	4.441,08	16,74%	-2,06%
Belanja Operasi	2.648,35	4.007,95	17,70%	21.913,77	4.224,83	19,28%	5,41%
Belanja Pegawai	14.415,52	3.082,65	21,38%	14.159,04	3.288,73	23,23%	6,69%
Belanja Barang dan Jasa	7.618,73	864,17	11,34%	7.150,07	823,58	11,52%	-4,70%
Belanja Bunga	8,01	1,32	16,48%	9,01	0,63	7,03%	-52,00%
Belanja Subsidi	55,30	8,27	14,95%	68,75	12,12	17,63%	46,58%
Belanja Hibah	520,08	51,30	9,86%	507,51	99,53	19,61%	94,02%
Belanja Bantuan Sosial	30,71	0,24	0,78%	19,39	0,23	1,18%	-5,00%
Belanja Modal	2.887,12	62,99	2,18%	1.557,34	29,89	1,92%	-52,55%
Belanja Modal	2.887,12	62,99	2,18%	1.557,34	29,89	1,92%	-52,55%
Belanja Tidak Terduga	84,38	8,47	10,04%	104,37	0,24	0,23%	-97,22%
Belanja Tidak Terduga	84,38	8,47	10,04%	104,37	0,24	0,23%	-97,22%
Belanja Transfer	2.997,57	454,88	15,17%	2.955,01	186,13	6,30%	-59,08%
Belanja Bagi Hasil	943,13	5,66	0,60%	1.197,12	0,98	0,08%	-
Belanja Bantuan Keuangan	2.054,44	449,22	21,87%	1.757,89	185,15	10,53%	-58,78%
SURPLUS/(DEFISIT)	(748,64)	2.121,65	-283,40%	(1.032,76)	3.433,73	-332,48%	61,84%
PEMBIAYAAN	748,64	246,02	32,86%	1.026,75	459,76	44,78%	86,88%
Penerimaan Pembiayaan	822,82	256,27	0,31	1.169,19	466,76	0,40	0,82
Pengeluaran Pembiayaan	74,19	10,25	0,14	142,44	7,00	0,05	(0,32)
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SiKPA)	-	2.367,67			3.893,49		

Sumber: GFS Sumatera Barat, diolah

Kinerja APBD Konsolidasi Pemerintah Daerah se-Sumatera Barat hingga triwulan I 2026 menunjukkan perbaikan pada sisi pendapatan daerah, meskipun realisasi belanja masih mengalami kontraksi dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Realisasi Pendapatan Daerah tercatat sebesar Rp25,50 triliun dengan capaian 30,88 persen dari target dan tumbuh 18,31 persen (yoy), yang terutama didorong oleh peningkatan Pendapatan Transfer. Di sisi lain, realisasi Belanja Daerah mencapai Rp4,44 triliun atau 16,74 persen dari pagu, mengalami kontraksi sebesar 2,06 persen dibandingkan Triwulan I-2025. Penurunan terutama terjadi pada Belanja Modal dan Belanja Transfer seiring masih terbatasnya percepatan pelaksanaan program dan kegiatan daerah pada awal tahun anggaran. Dengan realisasi pendapatan yang lebih tinggi dibandingkan belanja, APBD konsolidasi mencatat surplus



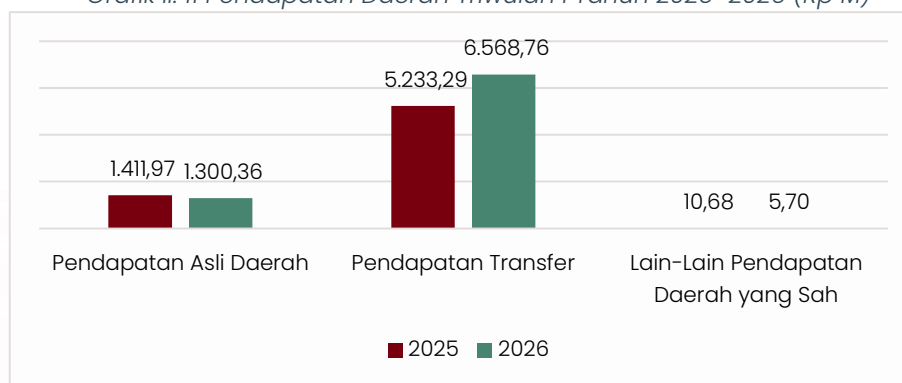
sebesar Rp3,43 triliun. Sementara itu, realisasi Pembiayaan Daerah mencapai Rp459,76 miliar sehingga posisi SILPA pada akhir triwulan I 2026 tercatat sebesar Rp3,89 triliun.

2.2.1. Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah merupakan semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan (UU No. 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah). Sumber Pendapatan Daerah terdiri dari tiga komponen yaitu PAD (Pendapatan Asli Daerah), Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Sampai dengan triwulan I 2026, Pendapatan Transfer masih menjadi sumber utama Pendapatan Daerah dengan kontribusi sebesar 83,41 persen terhadap total pendapatan daerah. Sementara itu, PAD memberikan kontribusi sebesar 16,51 persen dan lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar 0,07 persen.

Grafik II. 11 Pendapatan Daerah Triwulan I Tahun 2025–2026 (Rp M)



Sumber: GFS Sumatera Barat, diolah

Salah satu indikator untuk melihat kemampuan fiskal daerah dalam mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah pusat adalah melalui komposisi penerimaan daerah. Semakin besar komposisi PAD, maka kemandirian pemerintah daerah tersebut dinilai semakin tinggi. Tingkat kemandirian Sumatera Barat masih terbilang rendah, yang ditandai dengan belum optimalnya peran PAD terhadap total pendapatan daerah, perlu menjadi perhatian.

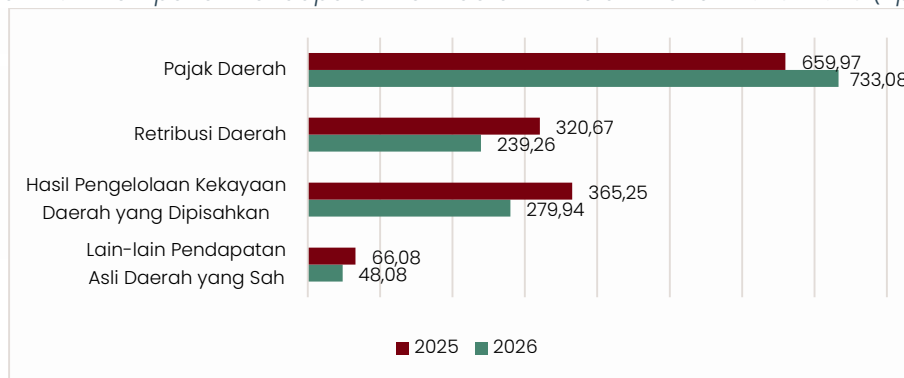
Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Sumatera Barat sampai dengan triwulan I 2026 menunjukkan kinerja yang bervariasi antar komponennya. Pajak Daerah tercatat sebesar Rp733,08 miliar, meningkat sebesar Rp73,11 miliar atau tumbuh 11,08 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp659,97 miliar. Peningkatan ini mencerminkan optimalisasi penerimaan pajak daerah dan membaiknya aktivitas ekonomi daerah. Sementara itu, Retribusi Daerah terealisasi sebesar Rp239,26 miliar, menurun sebesar Rp81,41 miliar atau berkontraksi 25,39 persen dibandingkan Triwulan I-2025 yang sebesar Rp320,67 miliar. Penurunan ini dipengaruhi oleh belum optimalnya realisasi beberapa jenis layanan dan pungutan daerah pada awal tahun anggaran.

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan tercatat sebesar Rp279,94 miliar, turun sebesar Rp85,31 miliar atau berkontraksi 23,36 persen dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp365,25 miliar, terutama dipengaruhi oleh menurunnya pembagian laba/dividen BUMD. Di sisi lain, Lain-lain PAD yang Sah terealisasi sebesar Rp66,08 miliar, meningkat sebesar Rp18,00 miliar atau tumbuh 37,44 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya



sebesar Rp48,08 miliar. Secara umum, struktur PAD Sumatera Barat masih didominasi oleh Pajak Daerah sebagai sumber utama penerimaan daerah. Secara umum, struktur PAD Sumatera Barat masih didominasi oleh Pajak Daerah sebagai sumber utama penerimaan daerah.

Grafik II. 12 Komponen Pendapatan Asli Daerah Triwulan I Tahun 2025–2026 (Rp M)



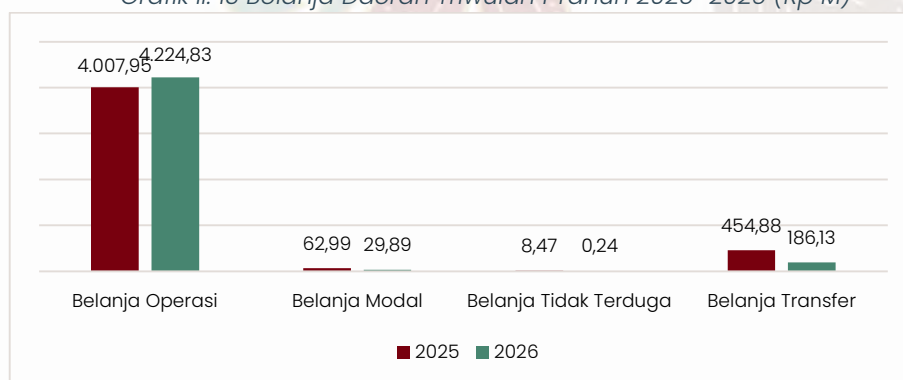
Sumber: GFS Sumatera Barat, diolah

Sementara itu, Pendapatan Transfer pada APBD Konsolidasi Sumatera Barat hingga triwulan I 2026 terealisasi sebesar Rp6,57 triliun atau mencapai 37,42 persen dari pagu tahun 2026. Realisasi tersebut tumbuh positif sebesar 25,52 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Peningkatan ini didorong oleh akselerasi penyaluran Transfer ke Daerah dari pemerintah pusat, terutama pada komponen Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH).

Di sisi lain, Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah hingga triwulan I 2026 terealisasi sebesar Rp5,70 miliar atau 0,74 persen dari target tahun 2026. Realisasi tersebut mengalami kontraksi sebesar 46,86 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Penurunan ini dipengaruhi oleh lebih rendahnya realisasi pendapatan hibah dan penerimaan sah lainnya pada awal tahun anggaran.

2.2.2. Belanja Daerah

Grafik II. 13 Belanja Daerah Triwulan I Tahun 2025–2026 (Rp M)



Sumber: GFS Sumatera Barat, diolah

Dari keempat komponen belanja, Belanja Daerah pada APBD Konsolidasi Sumatera Barat hingga triwulan I 2026 masih didominasi oleh Belanja Operasi dengan realisasi mencapai Rp4,22 triliun atau sebesar 95,09 persen dari total Belanja Daerah. Belanja Pegawai masih



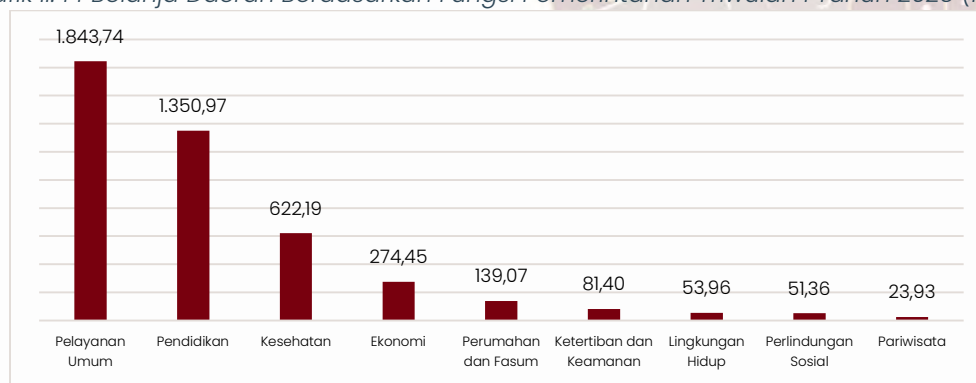
menjadi komponen terbesar dengan realisasi sebesar Rp3,29 triliun dan mengambil porsi 77,84 persen terhadap total Belanja Operasi atau sekitar 74,06 persen terhadap total Belanja Daerah. Kondisi ini menunjukkan bahwa struktur belanja daerah masih didominasi oleh belanja rutin aparatur, sehingga ruang fiskal untuk belanja yang lebih produktif dan berorientasi pelayanan publik masih perlu terus diperkuat.

Komponen Belanja Operasi yang mengalami pertumbuhan tertinggi adalah Belanja Hibah yang tumbuh sebesar 94,02 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, didorong oleh meningkatnya penyaluran hibah kepada lembaga dan masyarakat. Sementara itu, komponen adalah Belanja Barang dan Jasa mengalami kontraksi sebesar 4,70 persen, dipengaruhi oleh masih terbatasnya realisasi pengadaan barang dan jasa pada awal tahun anggaran.

Belanja Modal mengalami kontraksi sebesar 52,55 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Hingga triwulan I 2026, realisasi Belanja Modal baru mencapai Rp29,89 miliar atau 1,92 persen dari total pagu. Rendahnya serapan tersebut dipengaruhi oleh masih berlangsungnya tahapan persiapan pelaksanaan kegiatan fisik dan proses pengadaan barang dan jasa pada sebagian besar pemerintah daerah. Realisasi Belanja Modal terutama berasal dari belanja modal peralatan dan mesin serta belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi.

Sementara itu, realisasi Belanja Tidak Terduga sampai dengan triwulan I 2026 tercatat sebesar Rp0,24 miliar atau 0,23 persen dari pagu, yang digunakan untuk kebutuhan mendesak dan penanganan keadaan darurat daerah. Adapun realisasi Belanja Transfer mencapai Rp186,13 miliar atau 6,30 persen dari pagu, yang terdiri atas transfer bagi hasil dan bantuan keuangan kepada pemerintah kabupaten/kota dan desa.

Grafik II. 14 Belanja Daerah Berdasarkan Fungsi Pemerintahan Triwulan I Tahun 2025 (Rp M)



Sumber: GFS Sumatera Barat, diolah

Jika dirinci berdasarkan fungsi pemerintahan, Belanja Daerah di Sumatera Barat sampai dengan triwulan I 2026 paling banyak terealisasi untuk fungsi pelayanan umum yakni senilai Rp1,84 triliun. Realisasi belanja untuk fungsi pelayanan umum mencapai 41,52 persen dari total keseluruhan Belanja Daerah. Belanja fungsi pendidikan mendapatkan porsi sebesar 30,43 persen atau senilai Rp1,35 triliun, sedangkan belanja kesehatan berkontribusi sebesar 14,01 persen dengan capaian Rp622,19 miliar.

Selanjutnya, belanja fungsi ekonomi terealisasi sebesar Rp274,45 miliar atau 6,18 persen dari total Belanja Daerah. Adapun fungsi-fungsi pemerintahan lainnya memperoleh porsi di bawah 4 persen, dengan porsi terkecil terdapat pada belanja pariwisata sebesar 0,54 persen atau senilai Rp23,93 miliar.



Pagu kegiatan di Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2026 menunjukkan bahwa alokasi belanja pemerintah masih difokuskan pada sektor-sektor strategis yang berkaitan langsung dengan peningkatan kualitas pelayanan publik dan penguatan pertumbuhan ekonomi daerah. Fokus utama belanja diarahkan pada bidang infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan sebagai sektor prioritas yang memiliki peran penting dalam meningkatkan konektivitas wilayah, kualitas sumber daya manusia, serta kesejahteraan masyarakat.

Pada sektor infrastruktur, pemerintah daerah mengalokasikan pagu yang cukup besar untuk mendukung pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana publik. Kegiatan dengan pagu terbesar antara lain Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota sebesar Rp643,32 miliar yang diarahkan untuk pembangunan, peningkatan, dan pemeliharaan ruas jalan guna memperlancar mobilitas masyarakat serta distribusi barang dan jasa antarwilayah. Selain itu, terdapat Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman sebesar Rp358,37 miliar, Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Kabupaten/Kota sebesar Rp140,17 miliar, serta Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota sebesar Rp138,37 miliar. Anggaran tersebut juga didukung oleh berbagai kegiatan pengembangan drainase, sanitasi, irigasi, dan infrastruktur permukiman yang bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan dasar masyarakat dan mendukung aktivitas ekonomi daerah. Besarnya alokasi pada sektor ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam memperkuat konektivitas dan pemerataan pembangunan antarwilayah di Sumatera Barat.

Di bidang pendidikan, alokasi pagu kegiatan diarahkan untuk mendukung peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan di seluruh jenjang. Pagu terbesar tercatat pada Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan sebesar Rp985,59 miliar, Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas sebesar Rp669,40 miliar, serta Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar sebesar Rp511,29 miliar. Selain itu, pemerintah daerah juga mengalokasikan anggaran untuk pendidikan kejuruan, pendidikan khusus, peningkatan kompetensi tenaga pendidik, serta pengembangan sarana dan prasarana pendidikan. Alokasi tersebut menunjukkan bahwa pembangunan sumber daya manusia masih menjadi prioritas utama dalam mendukung peningkatan kualitas tenaga kerja dan daya saing daerah.

Sementara itu, pada sektor kesehatan, pemerintah daerah mengalokasikan pagu yang signifikan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat dan memperkuat fasilitas kesehatan daerah. Kegiatan dengan pagu terbesar meliputi Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp978,48 miliar serta Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp343,56 miliar. Selain itu, alokasi anggaran juga diarahkan untuk pengadaan alat kesehatan, peningkatan layanan kesehatan dasar, penguatan layanan rujukan, serta kegiatan promotif dan preventif kesehatan masyarakat. Fokus belanja tersebut menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan guna mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

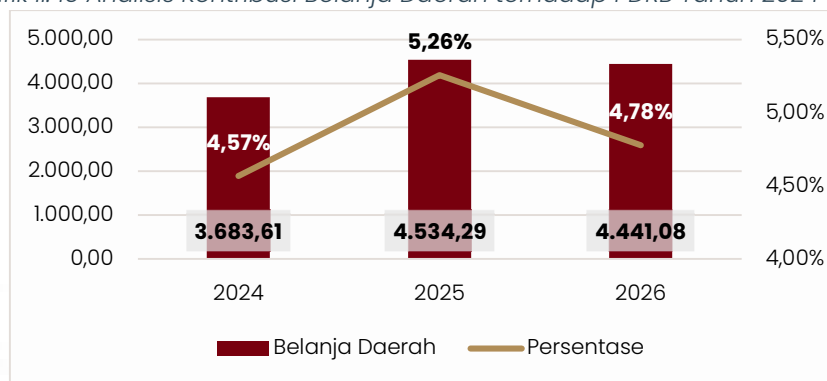
Belanja Daerah merupakan salah satu instrumen utama dalam pelaksanaan kebijakan fiskal daerah yang berfungsi untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat. Melalui realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), pemerintah daerah dapat mendorong aktivitas ekonomi, meningkatkan kualitas infrastruktur, memperluas pelayanan publik, serta menjaga stabilitas



ekonomi daerah. Selain itu, belanja daerah juga memiliki efek pengganda terhadap perekonomian melalui peningkatan konsumsi pemerintah, penyerapan tenaga kerja, dan dukungan terhadap sektor usaha lokal.

Peran strategis Belanja Daerah terhadap perekonomian tercermin dari kontribusinya terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Semakin optimal realisasi belanja daerah, maka semakin besar pula dampaknya dalam menjaga momentum pertumbuhan ekonomi regional. Oleh karena itu, efektivitas dan percepatan pelaksanaan APBD menjadi faktor penting dalam mendukung pemulihan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta memperkuat daya tahan ekonomi daerah di tengah berbagai tantangan ekonomi yang dihadapi.

Grafik II. 15 Analisis Kontribusi Belanja Daerah terhadap PDRB Tahun 2024–2026



Sumber: BPS dan Sintesa, diolah

Kontribusi Belanja Daerah terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku (ADHB) pada triwulan I 2026 tercatat sebesar 4,78 persen. Angka tersebut lebih rendah dibandingkan kontribusi pada triwulan I 2025 yang sebesar 5,26 persen, namun masih lebih tinggi dibandingkan triwulan I 2024 yang sebesar 4,57 persen. Penurunan proporsi kontribusi terhadap PDRB tersebut mengindikasikan bahwa pertumbuhan ekonomi daerah pada Triwulan I 2026 relatif lebih cepat dibandingkan peningkatan realisasi belanja daerah.

Secara umum, Belanja Daerah tetap memiliki peran penting sebagai instrumen fiskal dalam menjaga aktivitas ekonomi regional, terutama melalui belanja operasional pemerintah, belanja modal, belanja sosial, dan program pelayanan publik. Realisasi APBD yang optimal dapat mendorong peningkatan konsumsi masyarakat, memperkuat aktivitas usaha, serta mendukung pembangunan infrastruktur dan pelayanan dasar. Oleh karena itu, percepatan pelaksanaan belanja dan peningkatan kualitas belanja daerah perlu terus didorong agar memberikan dampak yang lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di Sumatera Barat.

2.2.3. Surplus/Defisit APBD

Berdasarkan realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah, hingga triwulan I 2026 APBD Konsolidasi Sumatera Barat mencatat surplus sebesar Rp3,43 triliun. Nilai surplus tersebut meningkat sebesar 61,84 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang mencatat surplus sebesar Rp2,12 triliun. Kondisi ini menunjukkan bahwa akumulasi kas pada Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) masih relatif tinggi seiring realisasi pendapatan yang lebih cepat dibandingkan realisasi belanja daerah.



Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu terus mengoptimalkan percepatan pelaksanaan program dan penyerapan Belanja Daerah agar dana yang tersedia dapat segera dimanfaatkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan pelayanan publik. Hingga triwulan I 2026, persentase realisasi Belanja Daerah sebesar 16,74 persen masih lebih rendah dibandingkan persentase realisasi Pendapatan Daerah yang mencapai 30,88 persen.

2.2.4. Pembiayaan Daerah

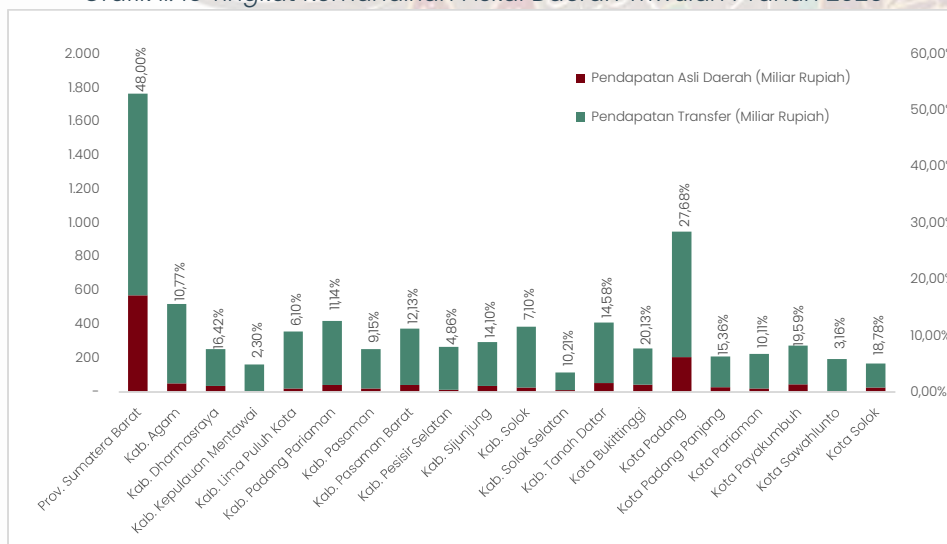
Pembiayaan neto APBD Konsolidasi Sumatera Barat hingga triwulan I 2026 tercatat sebesar Rp459,76 miliar, meningkat signifikan sebesar 86,88 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Secara rinci, Pembiayaan Daerah terdiri dari Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp466,76 miliar dan Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp7,00 miliar.

Penerimaan Pembiayaan daerah sebagian besar berasal dari pemanfaatan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya yang digunakan untuk mendukung kebutuhan pembiayaan pada awal tahun anggaran. Sementara itu, Pengeluaran Pembiayaan terutama dialokasikan untuk penyertaan modal pemerintah daerah serta pembayaran pokok pinjaman sesuai kewajiban jatuh tempo. Kondisi ini menunjukkan bahwa kapasitas pembiayaan daerah masih cukup kuat untuk menopang pelaksanaan APBD pada awal tahun 2026.

2.2.5. Analisis Tingkat Kemandirian Daerah

Tingkat kemandirian Fiskal Daerah merepresentasikan kemampuan daerah dalam membiayai kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan serta urusan pemerintahannya sendiri. Rasio kemandirian daerah dapat diukur dengan perhitungan proporsi PAD terhadap Pendapatan Transfer yang diterima oleh Pemda berkenaan.

Grafik II. 16 Tingkat Kemandirian Fiskal Daerah Triwulan I Tahun 2026



Sumber: GFS Sumatera Barat, diolah



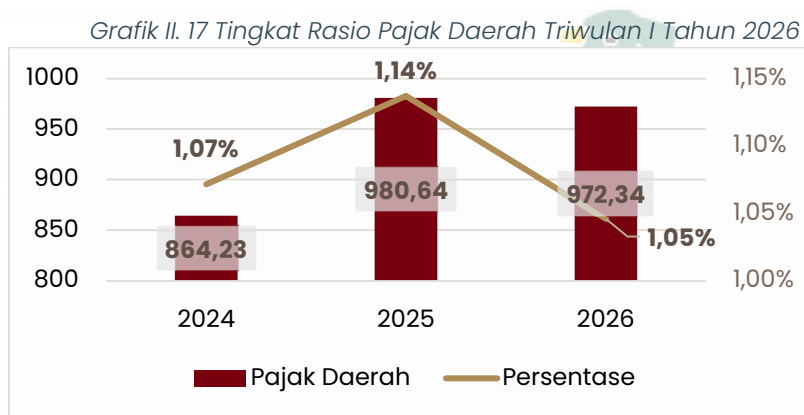
Kategori	Rasio (%)	Pola Hubungan
Rendah Sekali	0 – 25	Instruktif
Rendah	> 25 – 50	Konsultatif
Sedang	> 50 – 75	Partisipatif
Tinggi	>75 – 100	Delegatif

Berdasarkan data realisasi APBD sampai dengan triwulan I 2026, sebagian besar pemerintah daerah kabupaten/kota di Sumatera Barat masih memiliki tingkat kemandirian fiskal yang rendah. Terdapat 18 kabupaten/kota dengan kategori ‘rendah sekali’ dan 1 daerah dengan kategori ‘rendah’, yaitu Kota Padang dengan tingkat kemandirian fiskal sebesar 27 persen.

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mencatat tingkat kemandirian fiskal sebesar 44,00 persen yang juga tergolong kategori ‘rendah’ dengan pola hubungan konsultatif. Di tingkat kabupaten/kota, Kota Padang memiliki tingkat kemandirian fiskal tertinggi, sedangkan Kabupaten Kepulauan Mentawai menjadi daerah dengan tingkat kemandirian fiskal terendah sebesar 2,18 persen.

2.2.6. Rasio Pajak Daerah (*Local Tax Ratio*)

Rasio Pajak Daerah merupakan perbandingan antara penerimaan pajak daerah terhadap pendapatan perekonomian daerah yang direpresentasikan oleh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).



Sumber: BPS dan GFS Sumatera Barat, diolah

Secara umum, perkembangan *tax ratio* Sumatera Barat selama periode 2024–2026 menunjukkan bahwa optimalisasi penerimaan pajak daerah masih menjadi tantangan. Rendahnya *tax ratio* mengindikasikan bahwa potensi perpajakan daerah belum tergali secara maksimal dibandingkan kapasitas ekonomi yang ada. Oleh karena itu, diperlukan penguatan ekstensifikasi dan intensifikasi pajak daerah, digitalisasi sistem pemungutan, serta peningkatan kepatuhan wajib pajak untuk mendorong peningkatan *tax ratio* di Sumatera Barat.





RAB 3

KESIMPULAN & REKOMENDASI



Burung Kuu Rajo adalah fauna identitas (maskot) Provinsi Sumatera Barat yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 48 tahun 1989. Burung ini sering dijuluki "hewan bermata seratus" karena corak bulat-bulat kecil seperti mata pada bulu ekor jantan. Suara khas jantan, "ku-wau", dapat terdengar hingga ratusan meter. Walaupun menjadi fauna khas Sumatera Barat namun konservasi Kuu Rajo berada di Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS) dan beberapa laporan lain menunjukkan keberadaan mereka di Taman Nasional Batang Gadis.

Foto: Flickr bill_48



BAB III

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

3.1. Kesimpulan

1. Kondisi perekonomian Provinsi Sumatera Barat pada triwulan I tahun 2026 menunjukkan kinerja yang relatif positif di tengah dinamika global, tekanan inflasi, serta proses pemulihan pasca-bencana. Ekonomi Sumatera Barat tumbuh sebesar 5,02 persen (yoy), meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya maupun periode yang sama tahun lalu. Pertumbuhan tersebut didorong oleh meningkatnya konsumsi rumah tangga selama Ramadhan dan Idulfitri, penguatan sektor pertanian dan perikanan, peningkatan aktivitas perdagangan dan transportasi, serta percepatan belanja pemerintah dan proyek pemulihan pasca-bencana. Struktur ekonomi masih didominasi oleh sektor pertanian, perdagangan, transportasi, konstruksi, dan industri pengolahan.
2. Dari sisi kesejahteraan masyarakat, berbagai indikator menunjukkan perbaikan. IPM Sumatera Barat tahun 2025 meningkat menjadi 77,27 dan berada di atas rata-rata nasional. Tingkat kemiskinan turun menjadi 5,31 persen dan *gini ratio* membaik menjadi 0,280, menunjukkan tingkat ketimpangan yang relatif rendah. Tingkat Pengangguran Terbuka juga menurun menjadi 5,51 persen. Di sisi lain, daya beli petani dan nelayan masih relatif terjaga yang tercermin dari NTP dan NTN yang berada di atas angka 100, meskipun NTP menunjukkan tren penurunan sepanjang triwulan I 2026 akibat kenaikan biaya konsumsi dan produksi.
3. Perkembangan inflasi pada triwulan I 2026 masih sesuai target sasaran inflasi daerah, terutama dipengaruhi oleh faktor musiman Ramadhan dan Idulfitri, gangguan distribusi pasca-bencana, serta kenaikan harga komoditas tertentu seperti emas perhiasan, tarif listrik, dan bahan pangan strategis. Namun demikian, upaya pengendalian inflasi melalui sinergi TPID, pelaksanaan Gerakan Pangan Murah, distribusi bantuan pangan, dan penguatan koordinasi antar daerah telah membantu menjaga stabilitas harga dan pasokan.
4. Kinerja fiskal regional menunjukkan bahwa APBN masih berperan sebagai instrumen *countercyclical* dalam menjaga momentum pemulihan ekonomi daerah. Hingga triwulan I 2026, pendapatan negara di Sumatera Barat mengalami kontraksi akibat penurunan penerimaan perpajakan dan perdagangan internasional, sementara belanja negara tumbuh signifikan didorong oleh percepatan belanja modal, pembayaran THR ASN, dan dukungan pemulihan pasca-bencana. Kondisi tersebut menyebabkan APBN regional mengalami defisit yang lebih dalam dibandingkan tahun sebelumnya.
5. Sementara itu, kinerja APBD konsolidasi menunjukkan pendapatan daerah tumbuh cukup tinggi, terutama ditopang oleh transfer dari pemerintah pusat. Namun, struktur fiskal daerah masih sangat bergantung pada dana transfer dengan kontribusi PAD yang relatif rendah. Realisasi belanja daerah masih didominasi oleh belanja operasi dan belanja pegawai, sedangkan belanja modal belum optimal akibat lambatnya pelaksanaan kegiatan fisik dan pengadaan barang/jasa pada awal tahun. Kondisi ini menunjukkan bahwa efektivitas dan



kualitas belanja daerah masih perlu terus diperkuat agar mampu memberikan dampak yang lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

3.2. Rekomendasi

1. Pemerintah daerah perlu terus meningkatkan kontribusi PAD terhadap total Pendapatan Daerah secara bertahap melalui optimalisasi pajak dan retribusi daerah, digitalisasi sistem pembayaran, serta pemanfaatan aset daerah yang belum optimal. Upaya ini penting untuk mengurangi ketergantungan terhadap transfer pusat yang masih mendominasi struktur pendapatan daerah.
2. Optimalisasi Rasio Pajak Daerah perlu dilakukan melalui perluasan basis pajak, peningkatan kepatuhan wajib pajak, serta penguatan pengawasan dan integrasi data transaksi ekonomi daerah. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan penerimaan daerah secara lebih berkelanjutan tanpa menambah beban masyarakat secara berlebihan.
3. Pemerintah daerah perlu mempercepat realisasi belanja daerah, khususnya belanja modal, melalui percepatan proses pengadaan barang dan jasa, pelaksanaan kontrak dini, dan peningkatan kualitas perencanaan kegiatan agar pembangunan fisik dapat berjalan lebih efektif sejak awal tahun anggaran.
4. Komposisi belanja daerah perlu diarahkan secara lebih produktif dengan meningkatkan porsi belanja modal dan mengendalikan pertumbuhan rutin, sehingga ruang fiskal untuk pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, dan penguatan ekonomi masyarakat menjadi lebih besar.
5. Efisiensi belanja pegawai dan belanja operasional perlu terus dilakukan secara bertahap agar anggaran daerah dapat lebih difokuskan pada program prioritas yang berdampak langsung terhadap pengurangan kemiskinan, pengendalian inflasi, peningkatan kualitas layanan publik, dan penguatan ekonomi daerah.
6. Tingkat kemandirian fiskal daerah perlu diperkuat melalui pengembangan sektor ekonomi unggulan daerah, peningkatan investasi, penguatan UMKM, hilirisasi komoditas unggulan, serta pengembangan sektor pariwisata dan jasa yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan penerimaan daerah.
7. Pemerintah daerah perlu meningkatkan kontribusi sektor-sektor produktif terhadap perekonomian daerah melalui pengembangan kawasan industri skala lokal, agroindustri, perdagangan digital, dan penguatan rantai pasok komoditas unggulan agar pertumbuhan ekonomi daerah lebih berkelanjutan.
8. Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) perlu diperkuat melalui perbaikan tata kelola, peningkatan profesionalisme manajemen, dan fokus pada sektor usaha yang memiliki potensi ekonomi dan pelayanan publik yang kuat sehingga dapat memberikan kontribusi yang lebih optimal terhadap pendapatan daerah.
9. Pemerintah daerah perlu memperkuat sistem *monitoring* dan evaluasi pelaksanaan APBD melalui pemanfaatan *dashboard* digital dan evaluasi berkala agar realisasi pendapatan dan belanja daerah dapat dipantau secara lebih cepat, tepat, dan akuntabel.

DAFTAR PUSTAKA

- BPS. (2025). *Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Tahun 2025*. Padang: Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat.
- BPS. (2025). *Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Tahun 2025*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- BPS. (2026). *Keadaan Ketenagakerjaan di Indonesia Februari 2026*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- BPS. (2026). *Keadaan Ketenagakerjaan Provinsi Sumatera Barat Februari 2026*. Padang: Badan Pusat Statistik.
- BPS. (2026). *Perkembangan Indeks Harga Konsumen Februari 2026*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- BPS. (2026). *Perkembangan Indeks Harga Konsumen Januari 2026*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- BPS. (2026). *Perkembangan Indeks Harga Konsumen Maret 2026*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- BPS. (2026). *Perkembangan Indeks Harga Konsumen Provinsi Sumatera Barat Februari 2026*. Padang: Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat.
- BPS. (2026). *Perkembangan Indeks Harga Konsumen Provinsi Sumatera Barat Januari 2026*. Padang: Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat.
- BPS. (2026). *Perkembangan Indeks Harga Konsumen Provinsi Sumatera Barat Maret 2026*. Padang: Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat.
- BPS. (2026). *Perkembangan Nilai Tukar Petani Bulan Februari 2026*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- BPS. (2026). *Perkembangan Nilai Tukar Petani Bulan Januari 2026*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- BPS. (2026). *Perkembangan Nilai Tukar Petani Bulan Maret 2026*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- BPS. (2026). *Perkembangan Nilai Tukar Petani Provinsi Sumatera Barat Februari 2026*. Padang: Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat.
- BPS. (2026). *Perkembangan Nilai Tukar Petani Provinsi Sumatera Barat Januari 2026*. Padang: Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat.
- BPS. (2026). *Perkembangan Nilai Tukar Petani Provinsi Sumatera Barat Maret 2025*. Padang: Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat.
- BPS. (2026). *Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Triwulan I-2026*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- BPS. (2026). *Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sumatera Barat Triwulan I-2026*. Padang: Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat.
- BPS. (2026). *Profil Kemiskinan di Indonesia, September 2025*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.



Bab III Kesimpulan dan Rekomendasi

- BPS. (2026). *Profil Kemiskinan di Provinsi Sumatera Barat, September 2025*. Padang: Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat.
- BPS. (2026). *Tingkat Ketimpangan Pengeluaran Penduduk Indonesia, September 2025*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- BPS. (2026). *Tingkat Ketimpangan Pengeluaran Penduduk Provinsi Sumatera Barat, September 2025*. Padang: Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat.
- Indonesia. (2025). *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025–2029*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Indonesia. (2025). *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Indonesia. (2025). *Undang-Undang No. 59 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025–2045*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Provinsi Sumatera Barat. (2025). *Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025 – 2029*. Padang: Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
- Provinsi Sumatera Barat. (2026). *Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2025 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026*. Padang: Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.





LAMPIRAN

Burung Kuau Rajo muncul di dalam kisah kaba/folklore di Nagari Lunang Sumatera Barat. Di sebuah hutan bernama Hutan Tatayan, diceritakan bahwasanya Kuau Rajo ditemukan di dalam hutan tersebut dalam keadaan yang sangat memprihatinkan, dan orang-orang Nagari Lunang pun iba dan menolongnya, hingga Burung Kuau itupun berterimakasih dan membalas budi orang-orang Nagari Lunang dengan menjaga Nagari tersebut dari marabahaya secara gaib bersama dengan Buaya Putih, Siamang, Burung Garuda, dan Kerbau.

Foto: Getty Images Thipwan



Transformasi dan Resiliensi Ekonomi Sumatera Barat

Dinamika Pertumbuhan, Transformasi Struktur Ekonomi, dan Ketahanan Pasca-pandemi serta Pasca-bencana

Tren dan Struktur Pertumbuhan Ekonomi Sumatera Barat Tahun 2010 s.d. Triwulan I 2026

Kajian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat selama periode 2010 hingga Triwulan I Tahun 2026 dengan menggunakan data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menurut lapangan usaha dan pengeluaran. Analisis dilakukan untuk melihat pola pertumbuhan ekonomi jangka panjang, perubahan struktur ekonomi daerah, sumber utama pertumbuhan, serta ketahanan ekonomi Sumatera Barat dalam menghadapi berbagai dinamika domestik maupun global.

Selama periode pengamatan, perekonomian Sumatera Barat mengalami beberapa fase penting yang mencerminkan perubahan kondisi ekonomi regional maupun nasional. Pada periode 2010–2014, ekonomi Sumatera Barat berada dalam fase ekspansi dengan pertumbuhan yang relatif tinggi dan stabil, ditopang oleh konsumsi rumah tangga, sektor perdagangan, pertanian, dan membaiknya aktivitas investasi. Selanjutnya, pada periode 2015–2019 terjadi moderasi pertumbuhan seiring melambatnya perekonomian nasional dan perubahan dinamika harga komoditas, meskipun struktur ekonomi daerah masih relatif terjaga.

Pandemi COVID-19 pada periode 2020–2021 menjadi titik disrupsi utama yang menyebabkan perlambatan signifikan pada berbagai sektor ekonomi, terutama transportasi, akomodasi makan minum, dan perdagangan. Namun demikian, beberapa sektor seperti informasi dan komunikasi tetap menunjukkan resiliensi di tengah pembatasan aktivitas masyarakat.

Memasuki periode 2022 hingga triwulan III Tahun 2025, perekonomian Sumatera Barat mulai memasuki fase pemulihan dan penguatan kembali yang ditandai dengan meningkatnya mobilitas masyarakat, membaiknya konsumsi domestik, pulihnya sektor perdagangan dan transportasi, serta meningkatnya aktivitas investasi dan ekspor daerah.

Namun demikian, pada triwulan IV Tahun 2025, pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat mengalami perlambatan yang dipengaruhi oleh dampak bencana alam di sejumlah wilayah Sumatera Barat. Bencana tersebut menyebabkan terganggunya aktivitas ekonomi masyarakat, distribusi barang, mobilitas, serta aktivitas produksi pada beberapa sektor utama daerah. Kondisi tersebut tercermin dari melambatnya pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat pada triwulan IV Tahun 2025 menjadi sebesar 1,69 persen (*year-on-year*).

Pada Triwulan I Tahun 2026, perekonomian Sumatera Barat mulai menunjukkan fase pemulihan pasca-bencana dengan pertumbuhan ekonomi mencapai 5,02 persen (*year-on-year*), sekaligus menjadi salah satu pertumbuhan tertinggi di Pulau Sumatera. Pemulihan tersebut didorong oleh kembali meningkatnya aktivitas konsumsi masyarakat selama Ramadan dan Idulfitri, membaiknya sektor perdagangan dan transportasi, meningkatnya ekspor komoditas unggulan, serta percepatan rehabilitasi infrastruktur dan aktivitas investasi pasca-bencana.

Selain melihat tren pertumbuhan, kajian ini juga menganalisis perubahan struktur ekonomi Sumatera Barat selama lebih dari satu dekade terakhir. Analisis dilakukan terhadap

kontribusi sektor-sektor utama seperti pertanian, perdagangan, transportasi, konstruksi, industri pengolahan, dan jasa-jasa lainnya. Dari sisi pengeluaran, kajian ini akan menelaah perkembangan konsumsi rumah tangga, investasi (PMTB), konsumsi pemerintah, serta ekspor dan impor dalam membentuk struktur pertumbuhan ekonomi daerah.

Melalui kajian ini diharapkan dapat diperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai karakteristik pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat, sektor-sektor yang menjadi motor penggerak ekonomi, tingkat resiliensi ekonomi daerah terhadap guncangan, serta prospek dan tantangan ekonomi Sumatera Barat ke depan. Hasil kajian juga diharapkan dapat menjadi bahan masukan dalam perumusan kebijakan fiskal regional dan penguatan strategi pembangunan ekonomi daerah secara berkelanjutan.

Periode 2010–2014: Fase Ekspansi dan Penguatan Fondasi Ekonomi Daerah

Periode 2010–2014 dapat dikategorikan sebagai fase ekspansi ekonomi Sumatera Barat. Pada periode ini, pertumbuhan ekonomi daerah cenderung berada pada level yang relatif tinggi dan stabil, didukung oleh kuatnya konsumsi domestik, membaiknya aktivitas perdagangan, pertumbuhan investasi, serta masih terjaganya kinerja sektor pertanian sebagai fondasi utama ekonomi daerah.

Secara umum, fase ini merupakan periode ketika perekonomian Sumatera Barat menikmati dampak positif dari pertumbuhan ekonomi nasional yang masih cukup kuat pascakrisis global 2008–2009. Stabilitas ekonomi nasional, meningkatnya daya beli masyarakat, serta berkembangnya aktivitas perdagangan dan jasa memberikan dorongan terhadap pertumbuhan ekonomi regional.

Dari sisi lapangan usaha, struktur ekonomi Sumatera Barat pada periode ini masih sangat didominasi oleh sektor primer, khususnya sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan. Tingginya kontribusi sektor pertanian menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi masyarakat masih bertumpu pada komoditas pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan. Namun demikian, pada periode ini mulai terlihat peningkatan peran sektor tersier seperti perdagangan, transportasi, dan jasa-jasa lainnya.

Fenomena penting yang mulai muncul pada periode 2010–2014 adalah meningkatnya aktivitas perdagangan dan urbanisasi ekonomi di wilayah perkotaan seperti Kota Padang dan Bukittinggi. Pertumbuhan sektor perdagangan besar dan eceran mencerminkan meningkatnya konsumsi masyarakat serta mulai berkembangnya aktivitas distribusi barang dan jasa antarwilayah.

Selain itu, sektor konstruksi juga mulai mengalami peningkatan seiring berkembangnya pembangunan infrastruktur, perumahan, dan fasilitas publik. Peningkatan investasi pemerintah maupun swasta pada periode tersebut turut mendorong pertumbuhan sektor konstruksi dan perdagangan bahan bangunan.

Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat pada periode ini terutama ditopang oleh konsumsi rumah tangga yang menjadi motor utama pertumbuhan ekonomi daerah. Tingginya kontribusi konsumsi rumah tangga menunjukkan bahwa struktur ekonomi

Sumatera Barat masih berbasis *domestic demand*. Stabilitas konsumsi masyarakat pada periode ini didukung oleh:

- meningkatnya pendapatan masyarakat,
- inflasi yang relatif terkendali,
- pertumbuhan sektor perdagangan,
- serta meningkatnya aktivitas UMKM dan sektor informal.

Selain konsumsi rumah tangga, Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) juga mulai menunjukkan penguatan. Hal ini mencerminkan meningkatnya aktivitas investasi, baik berupa pembangunan fisik, infrastruktur, maupun pengadaan alat produksi. Penguatan PMTB menjadi indikasi awal meningkatnya kapasitas ekonomi daerah.

Dari sisi eksternal, kinerja ekspor Sumatera Barat pada periode ini masih cukup dipengaruhi oleh dinamika harga komoditas global, terutama komoditas berbasis pertanian dan perkebunan. Ketergantungan terhadap sektor primer menyebabkan ekonomi Sumatera Barat relatif sensitif terhadap perubahan harga komoditas internasional dan kondisi cuaca.

Meskipun demikian, secara umum periode 2010–2014 menunjukkan karakteristik ekonomi daerah yang:

- tumbuh stabil,
- berbasis konsumsi domestik,
- ditopang sektor pertanian dan perdagangan,
- serta mulai mengalami penguatan sektor jasa dan investasi.

Fase ini dapat dikatakan sebagai periode pembentukan fondasi pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat sebelum memasuki fase moderasi pertumbuhan pada periode 2015–2019.

Tabel dan Grafik PDRB Sumatera Barat Periode 2010–2014 Menurut Lapangan Usaha dan Pengeluaran (Triwulan I)

**PDRB Menurut Lapangan Usaha
(ADHK, Triwulan I, Miliar Rupiah)**

Lapangan Usaha	2010	2011	2012	2013	2014
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	6.698,78	6.819,96	7.310,73	7.094,41	7.613,22
Pertambangan dan Penggalian	1.157,31	1.247,80	1.297,18	1.401,72	1.474,98
Industri Pengolahan	3.066,20	3.239,87	3.174,91	3.551,07	3.676,14
Pengadaan Listrik dan Gas	24,36	26,99	27,27	29,74	31,03
Pengadaan Air dan Daur Ulang	27,90	30,04	29,87	31,95	32,94
Konstruksi	1.960,22	2.200,23	2.442,81	2.591,65	2.793,39
Perdagangan Besar dan Eceran	3.750,09	4.062,73	4.410,38	4.681,69	5.000,68
Transportasi dan Pergudangan	2.651,13	2.878,57	3.146,53	3.362,57	3.648,58
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	255,95	280,94	301,35	332,94	365,49
Informasi dan Komunikasi	1.367,45	1.573,71	1.762,93	1.973,74	2.202,61
Jasa Keuangan dan Asuransi	878,98	835,99	958,64	1.098,40	1.213,77
Real Estate	526,41	551,90	586,41	629,35	671,39
Administrasi Pemerintahan	1.600,83	1.759,49	1.956,08	2.108,17	2.227,38
Jasa Pendidikan	686,47	818,35	965,95	1.101,13	1.213,61
Jasa Kesehatan dan Sosial	286,82	326,46	373,95	425,26	478,80
Jasa Lainnya	511,76	566,37	625,88	692,38	761,58
Total PDRB	25.793,00	27.219,00	29.053,00	30.998,00	33.406,00

Grafik dan Fenomena Utama Lapangan Usaha

1. Pertanian Tetap Menjadi Fondasi Ekonomi
 - Sektor pertanian menjadi kontributor terbesar sepanjang 2010–2014.
 - Kontribusi sektor primer masih sangat dominan dalam struktur ekonomi Sumatera Barat.
 - Kinerja pertanian relatif stabil meskipun sempat mengalami perlambatan pada 2013.
2. Perdagangan dan Transportasi Mengalami Penguatan
 - Perdagangan besar dan eceran meningkat signifikan dari Rp3,75 triliun menjadi Rp5,00 triliun.
 - Transportasi dan pergudangan juga meningkat seiring meningkatnya mobilitas ekonomi.
 - Fenomena ini menunjukkan mulai berkembangnya aktivitas urban dan distribusi barang antarwilayah.
3. Informasi dan Komunikasi Mulai Tumbuh Pesat
 - Sektor informasi dan komunikasi tumbuh paling cepat pada periode ini.
 - Pertumbuhan didorong oleh meningkatnya penggunaan telekomunikasi dan internet.
 - Menjadi indikasi awal transformasi ekonomi menuju sektor jasa modern.
4. Konstruksi dan Investasi Menguat
 - Sektor konstruksi meningkat konsisten selama 2010–2014.
 - Mengindikasikan meningkatnya pembangunan infrastruktur, perumahan, dan investasi fisik.

PDRB Menurut Pengeluaran (Triwulan I, Juta Rupiah)

Komponen Pengeluaran	2010	2011	2012	2013	2014
Konsumsi Rumah Tangga	14.014.203	16.016.143	17.219.842	18.766.294	20.432.764
Konsumsi LNPRT	266.162	291.157	316.224	350.419	383.505
Konsumsi Pemerintah	2.066.608	2.474.778	2.867.613	3.291.235	3.694.493
PMTB	7.024.197	8.483.382	9.443.806	10.547.695	11.811.690
Perubahan Inventori	9.614	28.103	770.588	115.596	254.319
Net Ekspor Barang dan Jasa	1.412.023	949.650	673.570	584.972	812.304
Total PDRB	24.792.806	28.243.212	31.291.643	33.656.211	37.389.075

Grafik dan Fenomena Utama Pengeluaran

1. Konsumsi Rumah Tangga Menjadi Motor Utama Ekonomi
 - Konsumsi rumah tangga menjadi komponen terbesar dalam struktur PDRB.
 - Menunjukkan bahwa ekonomi Sumatera Barat masih berbasis *domestic demand*.
 - Stabilitas konsumsi mencerminkan daya beli masyarakat yang relatif kuat.
2. PMTB Mengalami Peningkatan Signifikan
 - PMTB meningkat dari Rp7,02 triliun menjadi Rp11,81 triliun.
 - Menggambarkan meningkatnya investasi dan pembangunan infrastruktur.
 - Menjadi indikasi penguatan kapasitas ekonomi daerah.
3. Konsumsi Pemerintah Meningkatkan Stabil
 - Belanja pemerintah meningkat konsisten selama 2010–2014.
 - Mendukung aktivitas ekonomi melalui pembangunan dan belanja daerah.

4. Ketergantungan terhadap Konsumsi Domestik Masih Tinggi
 - Net ekspor relatif kecil dibanding konsumsi domestik.
 - Struktur ekonomi Sumatera Barat pada periode ini masih lebih ditopang pasar domestik dibanding perdagangan eksternal.

Kesimpulan Fase 2010–2014

- Periode 2010–2014 merupakan fase ekspansi ekonomi Sumatera Barat yang ditandai dengan pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi dan stabil. Struktur ekonomi daerah masih didominasi sektor pertanian dan konsumsi rumah tangga, namun mulai terlihat penguatan sektor perdagangan, transportasi, konstruksi, dan informasi komunikasi.
- Fenomena penting pada periode ini adalah mulai terjadinya transformasi bertahap dari ekonomi berbasis sektor primer menuju penguatan sektor jasa dan perdagangan. Selain itu, peningkatan PMTB menunjukkan mulai meningkatnya aktivitas investasi dan pembangunan infrastruktur di Sumatera Barat.

Periode 2015–2019: Fase Moderasi Pertumbuhan dan Penguatan Sektor Jasa

Periode 2015–2019 dapat dikategorikan sebagai fase moderasi pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat. Pada periode ini, pertumbuhan ekonomi daerah masih berada pada level yang relatif stabil, namun cenderung mengalami perlambatan dibanding fase ekspansi 2010–2014. Fenomena tersebut sejalan dengan perlambatan ekonomi nasional, melemahnya harga beberapa komoditas global, serta mulai terjadinya perubahan struktur ekonomi daerah menuju sektor jasa dan perdagangan.

Meskipun demikian, perekonomian Sumatera Barat pada periode ini tetap menunjukkan ketahanan yang cukup baik. Stabilitas konsumsi rumah tangga, meningkatnya aktivitas perdagangan dan jasa, serta pembangunan infrastruktur yang terus berlangsung menjadi faktor utama yang menjaga pertumbuhan ekonomi daerah tetap positif.

Dari sisi lapangan usaha, sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan masih menjadi sektor dengan kontribusi terbesar terhadap PDRB Sumatera Barat. Namun demikian, mulai terlihat penurunan dominasi sektor primer secara bertahap seiring meningkatnya kontribusi sektor perdagangan, transportasi, informasi dan komunikasi, serta jasa-jasa lainnya.

Fenomena penting pada periode ini adalah semakin kuatnya transformasi ekonomi menuju sektor tersier. Hal tersebut tercermin dari **meningkatnya aktivitas:**

- perdagangan besar dan eceran,
- transportasi dan pergudangan,
- informasi dan komunikasi,
- jasa keuangan,
- serta akomodasi dan makan minum.

Pertumbuhan sektor informasi dan komunikasi menjadi salah satu fenomena paling menonjol selama periode 2015–2019. Meningkatnya penggunaan internet, telepon seluler,

digitalisasi layanan, dan perkembangan perdagangan berbasis daring mulai mendorong pertumbuhan ekonomi digital di Sumatera Barat.

Di sisi lain, sektor konstruksi juga tetap tumbuh positif seiring berlanjutnya pembangunan infrastruktur pemerintah, pembangunan jalan, fasilitas publik, kawasan perdagangan, serta pembangunan perumahan masyarakat. Peningkatan investasi pemerintah dan swasta turut menjaga aktivitas ekonomi daerah selama periode ini.

Dari sisi pengeluaran, konsumsi rumah tangga masih menjadi motor utama pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat. Struktur ekonomi daerah masih sangat bergantung pada konsumsi domestik sehingga stabilitas daya beli masyarakat menjadi faktor penting dalam menjaga pertumbuhan ekonomi.

Selain konsumsi rumah tangga, Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) juga menunjukkan tren peningkatan yang mencerminkan penguatan investasi dan pembangunan fisik. Namun demikian, pertumbuhan investasi pada periode ini cenderung lebih moderat dibanding fase sebelumnya.

Sementara itu, kontribusi ekspor terhadap pertumbuhan ekonomi daerah masih relatif dipengaruhi oleh dinamika harga komoditas global. Ketergantungan ekonomi Sumatera Barat terhadap komoditas primer menyebabkan kinerja ekspor cukup sensitif terhadap fluktuasi harga internasional dan perlambatan perdagangan global.

Secara umum, karakteristik utama ekonomi Sumatera Barat pada periode 2015–2019 antara lain:

- pertumbuhan ekonomi tetap stabil namun lebih moderat,
- mulai terjadinya transformasi struktur ekonomi,
- meningkatnya peran sektor jasa dan perdagangan,
- konsumsi rumah tangga tetap dominan,
- serta penguatan bertahap sektor informasi dan komunikasi.

Fase ini menjadi periode transisi penting bagi perekonomian Sumatera Barat sebelum memasuki fase disrupsi besar akibat pandemi COVID-19 pada tahun 2020–2021.

Tabel dan Grafik PDRB Sumatera Barat Periode 2015–2019 Menurut Lapangan Usaha dan Pengeluaran (Triwulan I)

**PDRB Menurut Lapangan Usaha
(ADHK, Triwulan I, Miliar Rupiah)**

Lapangan Usaha	2015	2016	2017	2018	2019
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	7.936	8.213	8.504	8.812	9.146
Pertambangan dan Penggalian	1.512	1.556	1.603	1.649	1.688
Industri Pengolahan	3.842	4.001	4.176	4.358	4.546
Pengadaan Listrik dan Gas	32	34	36	38	40
Pengadaan Air dan Daur Ulang	34	36	38	40	42
Konstruksi	3.004	3.201	3.412	3.653	3.901
Perdagangan Besar dan Eceran	5.327	5.682	6.071	6.495	6.952
Transportasi dan Pergudangan	3.924	4.172	4.445	4.746	5.081
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	392	425	461	501	546
Informasi dan Komunikasi	2.456	2.758	3.086	3.451	3.864

Jasa Keuangan dan Asuransi	1.309	1.402	1.506	1.617	1.736
Real Estate	712	753	797	845	895
Administrasi Pemerintahan	2.356	2.479	2.603	2.734	2.871
Jasa Pendidikan	1.321	1.426	1.541	1.667	1.804
Jasa Kesehatan dan Sosial	524	574	628	688	752
Jasa Lainnya	816	882	954	1.034	1.120
Total PDRB	35.761	37.794	40.361	43.128	46.021

Fenomena Utama Lapangan Usaha 2015–2019

1. Sektor Jasa Mengalami Penguatan Signifikan

Periode 2015–2019 menunjukkan peningkatan pesat sektor jasa, khususnya:

- informasi dan komunikasi,
- transportasi,
- perdagangan,
- serta akomodasi dan makan minum.

Fenomena ini menunjukkan mulai terjadinya transformasi ekonomi menuju aktivitas berbasis jasa dan *urban economy*.

2. Informasi dan Komunikasi Menjadi Sektor dengan Pertumbuhan Tertinggi

Sektor informasi dan komunikasi meningkat hampir dua kali lipat selama periode ini.

Faktor pendorong:

- penetrasi internet,
- penggunaan *smartphone*,
- digitalisasi layanan,
- berkembangnya *e-commerce*,
- serta meningkatnya aktivitas komunikasi **digital**.

3. Perdagangan dan Transportasi Semakin Dominan

Perdagangan besar dan eceran meningkat dari Rp5,3 triliun menjadi Rp6,95 triliun.

Transportasi dan pergudangan juga meningkat signifikan seiring:

- meningkatnya mobilitas masyarakat,
- pertumbuhan perdagangan antarwilayah,
- dan meningkatnya aktivitas logistik.

4. Pertanian Masih Menjadi Fondasi Utama

Meskipun sektor jasa tumbuh cepat, sektor pertanian tetap menjadi kontributor terbesar terhadap PDRB Sumatera Barat.

Hal ini menunjukkan bahwa struktur ekonomi Sumatera Barat masih bersifat *dual economy*:

- sektor primer tetap dominan,
- namun sektor jasa mulai tumbuh lebih cepat.

PDRB Menurut Pengeluaran
(Triwulan I, Miliar Rupiah)

Komponen Pengeluaran	2015	2016	2017	2018	2019
Konsumsi Rumah Tangga	22.185	24.046	26.003	28.167	30.512
Konsumsi LNPRT	418	453	492	536	584
Konsumsi Pemerintah	3.998	4.263	4.551	4.853	5.162
PMTB	12.836	13.918	15.062	16.374	17.781
Perubahan Inventori	302	335	367	401	446
Net Ekspor Barang dan Jasa	892	941	1.004	1.086	1.173
Total PDRB	40.631	43.956	47.477	51.417	55.658

Fenomena Utama Pengeluaran 2015–2019

1. Konsumsi Rumah Tangga Tetap Menjadi Penopang Utama
Konsumsi rumah tangga tetap mendominasi struktur ekonomi Sumatera Barat. Hal ini menunjukkan:
 - ekonomi masih berbasis *domestic demand*,
 - daya beli masyarakat relatif stabil,
 - dan aktivitas konsumsi tetap menjadi penggerak utama ekonomi daerah.
2. PMTB Menunjukkan Penguatan Investasi
PMTB meningkat cukup signifikan selama periode 2015–2019. Fenomena ini mencerminkan:
 - meningkatnya pembangunan infrastruktur,
 - pembangunan properti,
 - pengadaan alat produksi,
 - dan aktivitas investasi pemerintah maupun swasta.
3. Belanja Pemerintah Tetap Menjadi *Stabilizer*
Konsumsi pemerintah meningkat konsisten dan membantu menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi regional.
4. Struktur Ekonomi Masih Didominasi Permintaan Domestik
Kontribusi net ekspor masih relatif kecil dibanding konsumsi rumah tangga dan PMTB. Hal ini menunjukkan bahwa:
 - ketergantungan ekonomi terhadap pasar domestik masih tinggi,
 - sementara orientasi ekspor belum menjadi motor utama pertumbuhan ekonomi daerah.

Kesimpulan Fase 2015–2019

Periode 2015–2019 merupakan fase moderasi pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat yang ditandai dengan:

- pertumbuhan ekonomi yang stabil namun lebih moderat,
- meningkatnya transformasi menuju sektor jasa,
- penguatan perdagangan dan transportasi,
- serta berkembangnya ekonomi digital melalui sektor informasi dan komunikasi.

Meskipun sektor pertanian masih menjadi fondasi utama ekonomi daerah, sektor jasa mulai menunjukkan peran yang semakin penting dalam menopang pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat.

Periode 2020–2021: Fase Disrupsi Pandemi dan Uji Ketahanan Ekonomi Daerah

Periode 2020–2021 merupakan fase disrupsi terbesar bagi perekonomian Sumatera Barat selama lebih dari satu dekade terakhir akibat pandemi COVID-19. Pandemi menyebabkan perlambatan signifikan pada aktivitas ekonomi regional maupun nasional akibat pembatasan mobilitas masyarakat, gangguan rantai pasok, penurunan aktivitas perdagangan, serta melemahnya konsumsi dan investasi.

Pada tahun 2020, pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat mengalami tekanan cukup dalam seiring penerapan pembatasan sosial, penurunan aktivitas transportasi, melemahnya sektor pariwisata, serta tertundanya berbagai aktivitas ekonomi masyarakat. Sektor-sektor yang sangat bergantung pada mobilitas masyarakat menjadi kelompok yang paling terdampak, terutama:

- transportasi dan pergudangan,
- penyediaan akomodasi dan makan minum,
- perdagangan,
- serta jasa-jasa lainnya.

Fenomena utama pada periode ini adalah terjadinya perubahan pola aktivitas ekonomi masyarakat secara drastis. Aktivitas ekonomi berbasis tatap muka mengalami perlambatan tajam, sementara aktivitas berbasis digital mulai meningkat secara signifikan.

Dari sisi lapangan usaha, sektor Informasi dan Komunikasi menjadi salah satu sektor yang paling resilien selama pandemi. Peningkatan penggunaan internet, pembelajaran daring, *work from home*, transaksi digital, serta meningkatnya aktivitas komunikasi menyebabkan sektor ini tetap tumbuh positif di tengah kontraksi ekonomi pada sektor lainnya.

Sementara itu, sektor pertanian kembali menunjukkan perannya sebagai bantalan ekonomi daerah (*economic buffer*). Ketika sektor jasa dan perdagangan mengalami perlambatan, sektor pertanian relatif tetap bertahan karena masih menjadi sumber utama pendapatan masyarakat di banyak wilayah Sumatera Barat. Ketahanan sektor pertanian membantu menahan kontraksi ekonomi agar tidak lebih dalam.

Dari sisi pengeluaran, konsumsi rumah tangga mengalami perlambatan signifikan akibat:

- turunnya mobilitas masyarakat,
- meningkatnya ketidakpastian ekonomi,
- menurunnya aktivitas perdagangan,
- dan melemahnya daya beli pada awal pandemi.

Selain konsumsi rumah tangga, PMTB juga mengalami perlambatan akibat tertundanya investasi dan pembangunan fisik selama pandemi. Dunia usaha cenderung menahan ekspansi akibat tingginya ketidakpastian ekonomi global maupun domestik.

Namun demikian, konsumsi pemerintah justru meningkat dan menjadi faktor penahan utama perlambatan ekonomi daerah. Peningkatan belanja pemerintah terutama diarahkan untuk:

- penanganan kesehatan,
- bantuan sosial,
- program pemulihan ekonomi,
- perlindungan UMKM,
- serta dukungan terhadap kelompok masyarakat rentan.

Fenomena lain yang sangat penting pada periode ini adalah meningkatnya peran APBN sebagai *shock absorber* dalam menjaga stabilitas ekonomi regional. Intervensi fiskal pemerintah melalui bansos, program PEN, subsidi, serta belanja kesehatan menjadi faktor penting dalam menjaga daya beli masyarakat dan menahan penurunan aktivitas ekonomi lebih lanjut.

Memasuki tahun 2021, perekonomian Sumatera Barat mulai menunjukkan tanda-tanda pemulihan seiring:

- pelonggaran aktivitas masyarakat,
- membaiknya mobilitas,
- meningkatnya konsumsi domestik,
- serta mulai pulihnya perdagangan dan transportasi.

Meskipun pemulihan belum sepenuhnya merata, beberapa sektor mulai menunjukkan *rebound*, terutama:

- perdagangan,
- transportasi,
- akomodasi makan minum,
- dan konstruksi.
- Secara umum, karakteristik utama fase 2020–2021 antara lain:
- terjadinya disrupsi besar akibat pandemi COVID-19,
- perlambatan signifikan konsumsi dan investasi,
- meningkatnya peran APBN sebagai penyangga ekonomi,
- sektor pertanian menjadi bantalan ekonomi daerah,
- serta percepatan transformasi digital melalui sektor informasi dan komunikasi.

Fase ini menjadi titik balik penting dalam struktur perekonomian Sumatera Barat karena pandemi mempercepat perubahan pola konsumsi, digitalisasi aktivitas ekonomi, serta transformasi menuju ekonomi berbasis teknologi dan jasa digital.

**PDRB Menurut Lapangan Usaha
(ADHK, Triwulan I, Miliar Rupiah)**

Lapangan Usaha	2020	2021
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	9.482	9.861
Pertambangan dan Penggalian	1.702	1.746
Industri Pengolahan	4.631	4.812
Pengadaan Listrik dan Gas	42	44
Pengadaan Air dan Daur Ulang	44	46

Konstruksi	3.742	3.918
Perdagangan Besar dan Eceran	6.418	6.792
Transportasi dan Pergudangan	4.102	4.486
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	401	446
Informasi dan Komunikasi	4.362	4.941
Jasa Keuangan dan Asuransi	1.841	1.924
Real Estate	931	972
Administrasi Pemerintahan	2.944	3.018
Jasa Pendidikan	1.896	1.971
Jasa Kesehatan dan Sosial	831	938
Jasa Lainnya	1.041	1.086
Total PDRB	47.710	50.003

Fenomena Utama Lapangan Usaha 2020–2021

1. Pandemi Menyebabkan Disrupsi pada Sektor Berbasis Mobilitas

Pandemi COVID-19 menyebabkan perlambatan pada:

- perdagangan,
- transportasi,
- akomodasi makan minum,
- dan jasa lainnya.

Pembatasan mobilitas masyarakat menyebabkan aktivitas ekonomi berbasis tatap muka mengalami tekanan cukup besar.

2. Informasi dan Komunikasi Menjadi Sektor Paling Resilien

Sektor informasi dan komunikasi mengalami pertumbuhan paling tinggi selama pandemi.

Fenomena ini didorong oleh:

- *work from home*,
- pembelajaran daring,
- digitalisasi layanan,
- peningkatan transaksi *online*,
- dan penggunaan internet yang meningkat tajam.

Sektor ini menjadi motor baru pertumbuhan ekonomi daerah selama pandemi.

3. Pertanian Menjadi Bantalan Ekonomi Daerah

Sektor pertanian tetap tumbuh positif dan menjadi penopang utama ekonomi masyarakat.

Hal ini menunjukkan bahwa:

- sektor primer masih memiliki daya tahan tinggi,
- ketergantungan masyarakat terhadap sektor pertanian masih besar,
- serta pertanian berperan sebagai *economic buffer* selama krisis.

4. Konstruksi dan Investasi Mengalami Perlambatan

Aktivitas pembangunan fisik dan investasi sempat tertahan akibat:

- ketidakpastian ekonomi,
- *refocusing* anggaran,
- dan penundaan proyek pembangunan.

Namun demikian, pada 2021 mulai terlihat pemulihan bertahap aktivitas konstruksi.

PDRB Menurut Pengeluaran
(Triwulan I, Miliar Rupiah)

Komponen Pengeluaran	2020	2021
Konsumsi Rumah Tangga	31.284	32.046
Konsumsi LNPRT	612	645
Konsumsi Pemerintah	5.446	5.882
PMTB	18.226	18.874
Perubahan Inventori	482	518
Net Ekspor Barang dan Jasa	1.268	1.495
Total PDRB	57.318	59.460

Fenomena Utama Pengeluaran 2020–2021

1. Konsumsi Rumah Tangga Mengalami Perlambatan

Konsumsi masyarakat melemah akibat:

- pembatasan mobilitas,
- meningkatnya ketidakpastian ekonomi,
- penurunan pendapatan masyarakat,
- dan tertundanya aktivitas ekonomi.

Meskipun tetap menjadi komponen terbesar, pertumbuhannya jauh lebih rendah dibanding periode sebelum pandemi.

2. PMTB Tertahan Akibat Ketidakpastian Ekonomi

Investasi dan pembangunan fisik mengalami perlambatan selama pandemi. Dunia usaha cenderung:

- menahan ekspansi,
- mengurangi investasi,
- dan lebih fokus menjaga likuiditas usaha.

3. Konsumsi Pemerintah Menjadi Penyangga Utama

Belanja pemerintah meningkat signifikan selama pandemi. Peningkatan tersebut digunakan untuk:

- penanganan kesehatan,
- bantuan sosial,
- program PEN,
- perlindungan UMKM,
- dan pemulihan ekonomi daerah.

4. APBN Berperan Sebagai *Shock Absorber*

Pada periode ini, APBN memiliki peran yang sangat dominan dalam menjaga stabilitas ekonomi regional. Intervensi fiskal pemerintah membantu:

- menjaga daya beli masyarakat,
- menopang konsumsi,
- menjaga keberlangsungan UMKM,
- dan menahan perlambatan ekonomi lebih dalam.

Kesimpulan Fase 2020–2021

Periode 2020–2021 merupakan fase disrupsi ekonomi akibat pandemi COVID-19 yang menyebabkan perlambatan signifikan pada berbagai sektor ekonomi Sumatera Barat. Namun demikian, ekonomi daerah menunjukkan resiliensi melalui:

- ketahanan sektor pertanian,
- penguatan sektor informasi dan komunikasi,
- serta meningkatnya peran APBN sebagai *shock absorber* ekonomi daerah.

Selain menjadi periode krisis, fase ini juga menjadi titik percepatan transformasi digital dan perubahan struktur aktivitas ekonomi masyarakat di Sumatera Barat.

Periode 2022–2025: Fase Pemulihan, Reakselerasi, dan Gangguan Bencana Alam

Periode 2022–2025 merupakan fase pemulihan dan penguatan kembali perekonomian Sumatera Barat pasca-pandemi COVID-19. Pada periode ini, aktivitas ekonomi masyarakat mulai kembali normal seiring meningkatnya mobilitas, pulihnya perdagangan dan transportasi, meningkatnya konsumsi rumah tangga, serta membaiknya aktivitas investasi dan ekspor daerah.

Fase ini ditandai dengan meningkatnya optimisme ekonomi dan membaiknya hampir seluruh sektor lapangan usaha yang sebelumnya terdampak pandemi. Sektor perdagangan, transportasi, akomodasi makan minum, serta jasa-jasa lainnya mulai mengalami *rebound* seiring kembali meningkatnya aktivitas masyarakat dan pariwisata daerah.

Dari sisi lapangan usaha, sektor perdagangan besar dan eceran kembali menjadi salah satu motor utama pertumbuhan ekonomi daerah. Meningkatnya konsumsi masyarakat, pemulihan aktivitas distribusi barang, serta berkembangnya perdagangan digital mendorong penguatan sektor perdagangan selama periode ini.

Sektor transportasi dan pergudangan juga menunjukkan pemulihan signifikan setelah mengalami tekanan selama pandemi. Meningkatnya mobilitas masyarakat, aktivitas perjalanan, serta distribusi logistik menyebabkan sektor ini kembali tumbuh positif.

Selain itu, sektor penyediaan akomodasi dan makan minum menjadi salah satu sektor dengan pemulihan tercepat. Pulihnya aktivitas wisata, meningkatnya kegiatan masyarakat, serta kembali normalnya aktivitas perhotelan dan restoran menjadi faktor utama penguatan sektor ini.

Fenomena penting lainnya pada periode 2022–2025 adalah semakin kuatnya transformasi ekonomi digital. Sektor informasi dan komunikasi tetap menunjukkan pertumbuhan tinggi seiring meningkatnya penggunaan layanan digital, transaksi elektronik, dan aktivitas ekonomi berbasis teknologi.

Dari sisi pengeluaran, konsumsi rumah tangga kembali menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat. Membaiknya daya beli masyarakat, meningkatnya mobilitas, serta pulihnya aktivitas perdagangan mendorong penguatan konsumsi domestik selama periode pemulihan ekonomi.

Selain konsumsi rumah tangga, Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) juga menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan. Hal tersebut mencerminkan mulai pulihnya aktivitas investasi dan pembangunan fisik, baik oleh pemerintah maupun sektor swasta.

Konsumsi pemerintah tetap memainkan peran penting dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah melalui:

- belanja perlindungan sosial,
- pembangunan infrastruktur,
- dukungan pemulihan ekonomi,
- serta berbagai program stimulus fiskal daerah dan nasional.

Di sisi eksternal, kinerja ekspor Sumatera Barat juga mulai mengalami penguatan seiring meningkatnya permintaan terhadap beberapa komoditas unggulan daerah. Kondisi tersebut turut mendukung percepatan pemulihan ekonomi regional.

Namun demikian, pada akhir triwulan IV Tahun 2025, pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat mengalami perlambatan yang dipengaruhi oleh terjadinya bencana alam di sejumlah wilayah Sumatera Barat. Bencana tersebut menyebabkan terganggunya aktivitas ekonomi masyarakat, distribusi barang, mobilitas penduduk, serta aktivitas produksi pada beberapa sektor utama ekonomi daerah.

Dampak bencana terlihat pada:

- melambatnya aktivitas perdagangan,
- terganggunya transportasi dan distribusi logistik,
- tertundanya aktivitas investasi dan konstruksi,
- serta menurunnya aktivitas ekonomi masyarakat di wilayah terdampak.

Kondisi tersebut menyebabkan pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat pada triwulan IV Tahun 2025 melambat menjadi sekitar 1,69 persen (*year-on-year*), lebih rendah dibanding beberapa triwulan sebelumnya.

Meskipun demikian, perlambatan tersebut bersifat sementara. Memasuki Triwulan I Tahun 2026, perekonomian Sumatera Barat kembali menunjukkan pemulihan yang cukup kuat seiring membaiknya aktivitas masyarakat, percepatan rehabilitasi infrastruktur, meningkatnya konsumsi domestik selama Ramadan dan Idulfitri, serta pulihnya perdagangan dan transportasi.

Secara umum, karakteristik utama fase 2022–2025 antara lain:

- pemulihan ekonomi pasca-pandemi,
- penguatan konsumsi domestik,
- *rebound* sektor perdagangan dan transportasi,
- meningkatnya investasi dan pembangunan,
- penguatan ekonomi digital,
- serta munculnya risiko bencana alam terhadap stabilitas ekonomi daerah.

Fase ini menunjukkan bahwa perekonomian Sumatera Barat memiliki tingkat resiliensi yang cukup baik dalam menghadapi tekanan pasca-pandemi maupun gangguan bencana alam, meskipun struktur ekonomi daerah masih cukup sensitif terhadap gangguan eksternal dan faktor geografis.

PDRB Menurut Lapangan Usaha
(ADHK, Triwulan I, Miliar Rupiah)

Lapangan Usaha	2022	2023	2024	2025
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	10.238	10.612	10.945	11.284
Pertambangan dan Penggalian	1.788	1.842	1.893	1.941
Industri Pengolahan	5.024	5.281	5.506	5.742
Pengadaan Listrik dan Gas	46	48	50	53
Pengadaan Air dan Daur Ulang	48	50	53	55
Konstruksi	4.158	4.432	4.736	5.048
Perdagangan Besar dan Eceran	7.243	7.781	8.324	8.914
Transportasi dan Pergudangan	4.892	5.316	5.764	6.241
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	512	603	702	811
Informasi dan Komunikasi	5.426	5.983	6.594	7.258
Jasa Keuangan dan Asuransi	2.008	2.121	2.243	2.376
Real Estate	1.018	1.067	1.122	1.181
Administrasi Pemerintahan	3.114	3.246	3.391	3.548
Jasa Pendidikan	2.046	2.138	2.242	2.351
Jasa Kesehatan dan Sosial	1.012	1.086	1.163	1.244
Jasa Lainnya	1.182	1.293	1.418	1.553
Total PDRB	52.755	56.858	61.146	65.600

Fenomena Utama Lapangan Usaha 2022–2025

- Rebound* Sektor Perdagangan dan Transportasi

Perdagangan besar dan eceran serta transportasi mengalami pemulihan paling signifikan pasca-pandemi. Faktor pendorong:

 - meningkatnya mobilitas masyarakat,
 - pulihnya aktivitas distribusi barang,
 - meningkatnya konsumsi,
 - dan normalisasi aktivitas ekonomi.
- Akomodasi dan Makan Minum Mengalami Pemulihan Cepat

Sektor akomodasi dan makan minum meningkat tajam setelah pandemi. Fenomena ini menunjukkan:

 - pulihnya sektor wisata,
 - meningkatnya aktivitas restoran dan hotel,
 - serta membaiknya aktivitas ekonomi berbasis konsumsi masyarakat.
- Informasi dan Komunikasi Tetap Tumbuh Tinggi

Sektor informasi dan komunikasi tetap menjadi salah satu sektor dengan pertumbuhan tertinggi. Digitalisasi ekonomi yang meningkat selama pandemi tetap berlanjut pada fase pemulihan ekonomi.
- Pertanian Tetap Menjadi Fondasi Ekonomi

Meskipun sektor jasa tumbuh cepat, sektor pertanian tetap menjadi kontributor terbesar terhadap struktur ekonomi Sumatera Barat. Hal ini menunjukkan sektor primer masih menjadi penopang utama ekonomi masyarakat, terutama di wilayah perdesaan.

5. Perlambatan Akhir 2025 Akibat Bencana Alam

Pada akhir triwulan IV Tahun 2025, pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat mengalami perlambatan akibat dampak bencana alam di sejumlah wilayah. Dampak bencana menyebabkan:

- terganggunya distribusi logistik,
- menurunnya aktivitas perdagangan,
- terhambatnya mobilitas masyarakat,
- serta tertundanya aktivitas konstruksi dan investasi.

Kondisi tersebut menyebabkan pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat pada triwulan IV 2025 melambat menjadi sekitar 1,69 persen (y-on-y).

PDRB Menurut Pengeluaran (Triwulan I, Miliar Rupiah)

Komponen Pengeluaran	2022	2023	2024	2025
Konsumsi Rumah Tangga	34.214	36.487	38.962	41.624
Konsumsi LNPRT	688	732	781	834
Konsumsi Pemerintah	6.124	6.392	6.704	7.031
PMTB	19.842	21.401	23.085	24.916
Perubahan Inventori	552	604	661	718
Net Ekspor Barang dan Jasa	1.684	1.932	2.248	2.577
Total PDRB	63.104	67.548	72.441	77.700

Fenomena Utama Pengeluaran 2022–2025

1. Konsumsi Rumah Tangga Kembali Menjadi Motor Utama

Konsumsi masyarakat meningkat signifikan selama fase pemulihan ekonomi. Didorong oleh:

- membaiknya daya beli,
- meningkatnya mobilitas,
- pulihnya perdagangan,
- dan normalisasi aktivitas masyarakat.

2. PMTB Menunjukkan Penguatan Investasi

PMTB meningkat cukup tinggi selama 2022–2025. Fenomena ini mencerminkan:

- pulihnya aktivitas investasi,
- meningkatnya pembangunan infrastruktur,
- dan kembalinya ekspansi usaha.

3. Konsumsi Pemerintah Tetap Menjadi *Stabilizer*

Belanja pemerintah tetap berperan penting dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah melalui pembangunan, perlindungan sosial, dan stimulus ekonomi.

4. Ekspor Mulai Menguat

Net ekspor menunjukkan peningkatan bertahap selama fase pemulihan. Didorong oleh:

- meningkatnya permintaan komoditas,
- membaiknya perdagangan global,
- serta penguatan ekspor komoditas unggulan Sumatera Barat.

Kesimpulan Fase 2022–2025

Periode 2022–2025 merupakan fase pemulihan dan penguatan kembali ekonomi Sumatera Barat pasca-pandemi COVID-19. Fase ini ditandai dengan:

- *rebound* sektor perdagangan dan transportasi,
- pemulihan sektor akomodasi dan makan minum,
- meningkatnya konsumsi domestik dan investasi,
- serta penguatan ekonomi digital.

Namun demikian, pada akhir triwulan IV 2025 terjadi perlambatan ekonomi akibat dampak bencana alam yang mengganggu aktivitas ekonomi dan distribusi barang di sejumlah wilayah Sumatera Barat.

Periode Triwulan I Tahun 2026: Fase Pemulihan Pascabencana dan Penguatan Ekonomi Regional

Triwulan I Tahun 2026 menjadi fase penting bagi perekonomian Sumatera Barat karena menunjukkan terjadinya pemulihan ekonomi yang cukup kuat setelah perlambatan pada akhir tahun 2025 akibat dampak bencana alam di sejumlah wilayah. Setelah mengalami tekanan pada triwulan IV Tahun 2025, aktivitas ekonomi masyarakat mulai kembali membaik seiring pulihnya mobilitas, distribusi barang, aktivitas perdagangan, serta percepatan rehabilitasi infrastruktur di wilayah terdampak.

Berdasarkan Berita Resmi Statistik Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat, ekonomi Sumatera Barat pada Triwulan I Tahun 2026 tumbuh sebesar 5,02 persen *secara year-on-year* (y-on-y), meningkat signifikan dibandingkan pertumbuhan Triwulan IV Tahun 2025 yang sebesar 1,69 persen. Secara *quarter-to-quarter* (q-to-q), ekonomi Sumatera Barat juga tumbuh sebesar 3,15 persen.

Pertumbuhan tersebut menunjukkan bahwa perlambatan ekonomi akibat bencana alam pada akhir 2025 bersifat sementara dan perekonomian daerah memiliki tingkat resiliensi yang cukup baik untuk kembali pulih dalam waktu relatif cepat.

Fenomena utama pada Triwulan I Tahun 2026 adalah menguatnya kembali aktivitas konsumsi masyarakat selama momentum Ramadan dan Idulfitri. Peningkatan konsumsi rumah tangga mendorong penguatan sektor perdagangan, transportasi, akomodasi makan minum, serta berbagai aktivitas jasa lainnya.

Dari sisi lapangan usaha, sektor Perdagangan Besar dan Eceran menjadi sumber pertumbuhan utama ekonomi Sumatera Barat. Meningkatnya transaksi perdagangan masyarakat, distribusi barang, serta aktivitas perdagangan digital mendorong pertumbuhan sektor ini secara signifikan.

Selain itu, sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum menjadi sektor dengan pertumbuhan tertinggi. Pulihnya aktivitas wisata, meningkatnya perjalanan masyarakat, serta kembali normalnya aktivitas restoran dan perhotelan menjadi faktor utama yang mendorong penguatan sektor tersebut.

Sektor transportasi dan pergudangan juga kembali menunjukkan pertumbuhan positif seiring meningkatnya mobilitas masyarakat dan distribusi logistik pasca-bencana. Hal ini menunjukkan mulai pulihnya konektivitas ekonomi antarwilayah di Sumatera Barat.

Di sisi lain, sektor pertanian tetap menjadi fondasi utama ekonomi daerah dengan kontribusi terbesar terhadap PDRB Sumatera Barat. Ketahanan sektor pertanian kembali menjadi faktor

penting dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah di tengah tekanan bencana alam dan dinamika ekonomi global.

Dari sisi pengeluaran, konsumsi rumah tangga tetap menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat. Momentum Ramadan dan Idulfitri meningkatkan konsumsi masyarakat pada kelompok makanan dan minuman, transportasi, pakaian, restoran, serta kebutuhan rumah tangga lainnya.

Selain konsumsi rumah tangga, komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) juga mengalami penguatan yang mencerminkan meningkatnya aktivitas investasi dan rehabilitasi infrastruktur pasca-bencana. Pembangunan kembali fasilitas publik, perbaikan infrastruktur, serta meningkatnya aktivitas konstruksi turut mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.

Kinerja ekspor Sumatera Barat juga menunjukkan penguatan pada Triwulan I Tahun 2026. Meningkatnya ekspor komoditas unggulan seperti CPO dan produk kimia berbasis gambir menjadi salah satu faktor yang menopang penguatan ekonomi regional.

Konsumsi pemerintah juga berperan penting dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah melalui:

- pembayaran THR,
- belanja pegawai,
- bantuan sosial,
- serta dukungan rehabilitasi dan pemulihan pasca-bencana.

Hal tersebut menunjukkan bahwa APBN masih memiliki peran strategis sebagai *shock absorber* dalam menjaga daya beli masyarakat dan mempercepat pemulihan ekonomi regional.

Secara umum, karakteristik utama fase Triwulan I Tahun 2026 antara lain:

- terjadinya pemulihan ekonomi pasca-bencana,
- meningkatnya konsumsi masyarakat,
- *rebound* sektor perdagangan dan transportasi,
- penguatan investasi dan rehabilitasi infrastruktur,
- meningkatnya aktivitas wisata dan jasa,
- serta tetap kuatnya peran APBN dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah.

Fase ini menunjukkan bahwa perekonomian Sumatera Barat memiliki kapasitas pemulihan yang cukup baik meskipun masih menghadapi tantangan berupa risiko bencana alam, ketidakpastian global, dan sensitivitas ekonomi terhadap sektor primer dan konsumsi domestik.

PDRB Menurut Lapangan Usaha (ADHK, Triwulan I Tahun 2026, Miliar Rupiah)

Lapangan Usaha	Nilai PDRB 2026	Pertumbuhan (yoy, %)	Fenomena Utama
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	11.409,88	3,14	Tetap menjadi fondasi ekonomi daerah
Pertambangan dan Penggalian	2.066,99	2,45	Aktivitas produksi mulai stabil
Industri Pengolahan	4.884,43	4,43	Didukung pengolahan hasil pertanian
Pengadaan Listrik dan Gas	48,22	4,92	Mobilitas ekonomi mulai meningkat
Pengadaan Air dan Daur Ulang	48,84	4,35	Aktivitas domestik dan usaha membaik

Konstruksi	4.622,34	8,20	Rehabilitasi infrastruktur pascabencana
Perdagangan Besar dan Eceran	9.011,74	6,11	Menjadi sumber pertumbuhan utama
Transportasi dan Pergudangan	5.589,22	3,80	Mobilitas dan logistik kembali pulih
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	697,20	17,77	Pertumbuhan tertinggi akibat Ramadan dan wisata
Informasi dan Komunikasi	4.787,19	9,02	Digitalisasi ekonomi terus meningkat
Jasa Keuangan dan Asuransi	1.661,05	7,94	Aktivitas pembiayaan dan transaksi meningkat
Real Estate	1.108,53	5,12	Aktivitas properti mulai meningkat
Jasa Perusahaan	239,95	0,03	Pemulihan aktivitas jasa masyarakat
Administrasi Pemerintahan	3.145,22	4,31	Dukungan belanja pemerintah
Jasa Pendidikan	2.198,78	3,84	Aktivitas pendidikan normal kembali
Jasa Kesehatan dan Sosial	924,34	7,07	Aktivitas layanan kesehatan meningkat
Jasa Lainnya	1.041,14	8,44	Pemulihan aktivitas jasa masyarakat
Total PDRB	53.485,06	5,02	Pemulihan ekonomi pasca-bencana

Grafik dan Fenomena Utama Lapangan Usaha Triwulan I 2026

- Perdagangan Menjadi Motor Utama Pemulihan
Sektor perdagangan menjadi sumber pertumbuhan tertinggi akibat:
 - meningkatnya konsumsi masyarakat,
 - momentum Ramadan dan Idulfitri,
 - pulihnya distribusi barang,
 - serta meningkatnya aktivitas perdagangan digital.
- Akomodasi dan Makan Minum Tumbuh Paling Tinggi
Pertumbuhan mencapai 17,77 persen. Fenomena ini menunjukkan:
 - pulihnya aktivitas wisata,
 - meningkatnya perjalanan masyarakat,
 - normalisasi aktivitas hotel dan restoran,
 - serta meningkatnya konsumsi masyarakat selama Ramadan.
- Konstruksi Menguat Akibat Rehabilitasi Pasca-bencana
Peningkatan sektor konstruksi didorong oleh:
 - pembangunan kembali infrastruktur,
 - rehabilitasi fasilitas publik,
 - dan meningkatnya aktivitas investasi fisik.
- Informasi dan Komunikasi Tetap Menjadi Sektor Strategis
Transformasi digital yang meningkat sejak pandemi masih terus berlanjut pada 2026.

PDRB Menurut Pengeluaran
(Triwulan I Tahun 2026, Miliar Rupiah)

Komponen Pengeluaran	Nilai PDRB 2026	Pertumbuhan (yoy, %)	Fenomena Utama
Konsumsi Rumah Tangga	44.015	3,11	Konsumsi Ramadan dan Idulfitri meningkat
Konsumsi LNPRT	878	5,28	Aktivitas sosial masyarakat meningkat
Konsumsi Pemerintah	8.070	14,77	THR, bansos, dan belanja pemerintah
PMTB	26.819	7,64	Investasi dan rehabilitasi meningkat
Perubahan Inventori	756	5,31	Aktivitas produksi mulai meningkat
Net Ekspor Barang dan Jasa	2.962	15,24	Penguatan ekspor CPO dan gambir
Total PDRB	82.500	5,02	Pemulihan ekonomi regional

Grafik dan Fenomena Utama Pengeluaran Triwulan I 2026

- Konsumsi Rumah Tangga Tetap Menjadi Penopang Utama
Konsumsi domestik masih menjadi motor utama pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat. Didorong oleh:
 - Ramadan dan Idulfitri,
 - meningkatnya mobilitas masyarakat,
 - serta membaiknya daya beli.
- PMTB Menunjukkan Penguatan Investasi
PMTB tumbuh tinggi akibat:
 - rehabilitasi pasca-bencana,
 - pembangunan infrastruktur,
 - dan meningkatnya investasi fisik.
- Konsumsi Pemerintah Menjadi *Shock Absorber*
Belanja pemerintah meningkat signifikan melalui:
 - pembayaran THR,
 - bantuan sosial,
 - belanja pegawai,
 - serta dukungan pemulihan ekonomi daerah.
- Ekspor Menjadi Akselerator Pertumbuhan
Kinerja ekspor meningkat signifikan seiring:
 - meningkatnya permintaan komoditas,
 - membaiknya perdagangan global,
 - serta penguatan ekspor komoditas unggulan daerah.

Kesimpulan Fase Triwulan I 2026

Triwulan I Tahun 2026 menunjukkan fase pemulihan ekonomi Sumatera Barat pasca-bencana alam pada akhir tahun 2025. Pertumbuhan ekonomi kembali menguat menjadi 5,02 persen (y-on-y), didorong oleh:

- penguatan konsumsi masyarakat,
- *rebound* perdagangan dan transportasi,
- meningkatnya investasi dan rehabilitasi infrastruktur,
- serta penguatan ekspor komoditas unggulan.

Fase ini menunjukkan bahwa perekonomian Sumatera Barat memiliki tingkat resiliensi yang cukup baik dalam menghadapi tekanan bencana alam maupun dinamika ekonomi global



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA



Kanwil DJPb Sumbar

ambd

amanah, melayani, berakhlak, optimis



<https://djp.kemenkeu.go.id/kanwil/sumbar>



@djpsumbar



Kanwil DJPb Sumatera Barat



Kanwil DJPb Sumbar



Jl. Khatib Sulaiman No. 3, Kota Padang



(0751) 7054731